

LAPORAN KINERJA

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS I YOGYAKARTA

2025



SCAN UNTUK
MENGAkses
LAPORAN DIGITAL



LAPORAN KINERJA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

2025



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta (Balmon Yogyakarta) dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi kinerja, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Transformasi digital nasional telah mencapai titik krusial pada tahun 2025, ditandai dengan perubahan fundamental nomenklatur kementerian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Perubahan ini bukan sekadar pergantian label, melainkan representasi dari pergeseran paradigma pemerintah untuk lebih fokus pada penguatan ekosistem digital yang terintegrasi, aman, dan berdaulat. Dalam kerangka besar ini, pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas namun strategis menjadi pondasi utama bagi seluruh infrastruktur digital nasional. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta, sebagai unit pelaksana teknis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, memegang tanggung jawab vital dalam memastikan bahwa ruang udara frekuensi di wilayah tersebut tetap tertib, efisien, dan bebas dari gangguan yang dapat merugikan kepentingan publik maupun keselamatan negara.

Yogyakarta merupakan wilayah dengan karakteristik unik, yang mencakup pusat pendidikan, destinasi wisata internasional, serta objek vital nasional seperti Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo. Kepadatan penggunaan frekuensi radio di wilayah ini sangat tinggi, mulai dari kebutuhan komunikasi seluler, penyiaran digital, hingga frekuensi navigasi penerbangan dan maritim. Tantangan pasca-pandemi yang semula berupa adaptasi terhadap mobilitas terbatas telah bertransformasi menjadi tuntutan kualitas layanan broadband yang stabil dan inklusif. Seiring dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi "Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga" menjadi kompas bagi setiap gerak langkah organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini didasarkan pada kesadaran bahwa akuntabilitas instansi pemerintah merupakan elemen kunci dalam reformasi birokrasi. Tahun 2025 menjadi saksi bagaimana Balai Monitor Kelas I Yogyakarta menghadapi dinamika teknologi seperti ekspansi jaringan 5G di pita frekuensi tinggi serta tuntutan perlindungan masyarakat dari radiasi elektromagnetik dan peredaran perangkat telekomunikasi ilegal. Kinerja organisasi tidak hanya diukur dari angka-angka penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya dalam menikmati layanan digital yang berkualitas dan aman. Melalui laporan ini, dipaparkan secara mendalam mengenai capaian indikator kinerja, optimalisasi anggaran, serta strategi mitigasi atas risiko teknis yang muncul sepanjang tahun berjalan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, Januari 2026
Kepala Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta,

Enik Sarjumanah, SH.,MH



Ringkasan Eksekutif



Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta (Balmon Yogyakarta) adalah pelayanan, monitoring, pengukuran, inspeksi, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio. Peran tersebut untuk mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat.

Tahun 2025, Balmon Yogyakarta telah melaksanakan program pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Adapun rincian program pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1

Bidang teknis menunjukkan hasil yang melampaui ekspektasi melalui pengawasan ketat dan penanganan gangguan yang responsif.
- 2

Kepercayaan masyarakat terhadap layanan Balmon Yogyakarta berada pada level yang sangat baik.
- 3

Pengelolaan sumber daya organisasi dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Tahun 2025 ditandai dengan **capaian yang melampaui target pada seluruh indikator kinerja utama**, Balmon Yogyakarta tidak hanya sukses secara operasional teknis, tetapi juga berhasil menjaga integritas dan kepuasan masyarakat serta akuntabilitas keuangan yang sangat baik.

Capaian Kinerja 2025

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta di bawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Sasaran Kegiatan (I)	Indikator Kinerja (II)	Target (III)	Capaian (IV)	Kinerja (V)
1. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	125%
	2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105.26%
	4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133.33%
	5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	117.65%
	6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	99.09%	123.86%
	7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	125%	125%
	8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS - IKRAN)	100%	216.66%	216.66%
	9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
	10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
	11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	122.80%	122.80%
	12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	108.90%	108.90%
	13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi)	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Tahun 2025	86.95	85.51	98.34%
	2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97.00	100	103.09%

*Note : (5) didapat dari nilai (4) dibagi (3)

Realisasi Anggaran

1. Realisasi Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 9.241.803.834,-** atau sebesar **98.19%** dari Pagu **Rp 9.411.880.000,-**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	7
Latar Belakang Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Potensi Dan Permasalahan Strategis Sistematika Pelaporan	
BAB II PERJANJIAN KINERJA	17
Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Sasaran Program Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	97
Penutup	
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN	99
DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025	101

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Potensi dan Permasalahan Strategis
Sistematika Pelaporan



Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan telekomunikasi, penyiaran, serta berbagai layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus dilakukan secara tertib, efisien, dan bebas dari gangguan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan penggunaannya harus mendapat izin dari pemerintah.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, kebutuhan akan penggunaan spektrum frekuensi radio terus meningkat. Spektrum frekuensi radio saat ini dimanfaatkan dalam berbagai sektor, antara lain telekomunikasi seluler, penyiaran, navigasi penerbangan dan pelayaran, komunikasi instansi pemerintah, serta berbagai layanan komunikasi lainnya yang menunjang aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Peningkatan pemanfaatan spektrum frekuensi radio tersebut berpotensi menimbulkan gangguan (interferensi) apabila tidak dikelola secara baik, sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio secara berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menugaskan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio, termasuk kegiatan monitoring, inspeksi, penertiban, serta penanganan gangguan frekuensi radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balmon Yogyakarta melaksanakan berbagai kegiatan antara lain monitoring spektrum frekuensi radio, inspeksi stasiun radio, penanganan gangguan frekuensi radio, penertiban penggunaan frekuensi radio, serta kegiatan pengukuran dan pengujian perangkat telekomunikasi.

Wilayah kerja Balmon Yogyakarta memiliki karakteristik yang cukup dinamis dengan tingkat penggunaan spektrum frekuensi radio yang relatif tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan berbagai penyelenggara layanan telekomunikasi dan penyiaran, instansi pemerintah, sektor pendidikan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi. Kondisi tersebut menuntut pelaksanaan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio yang optimal guna memastikan pemanfaatannya berjalan secara tertib, efisien, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan komunikasi lainnya

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta.



Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balmon Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Balmon Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

FUNGSI

- | | | | | | |
|----|---|----|--|----|--|
| 01 | Penyusunan rencana dan program; | 02 | Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio; | 03 | Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika; |
| 04 | Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio; | 05 | Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio; | 06 | Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio; |
| 07 | Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio; | 08 | Pelaksanaan ujian amatir radio; | 09 | Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. |

STRUKTUR ORGANISASI BALMON YOGYAKARTA

- | | |
|----|--|
| 01 | Subbagian Umum
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan. |
| 02 | Tim Kerja Monitoring Dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Montib)
Tim kerja Montib mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio melalui kegiatan pengamatan, deteksi, pengukuran, pemeriksaan, pemantauan, evaluasi, penertiban, penegakan hukum, penanganan gangguan, pemusnahan barang hasil penertiban, serta pengenaan sanksi administratif atas penggunaan spektrum frekuensi radio, alat dan perangkat telekomunikasi, telekomunikasi khusus, dan infrastruktur digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

03

Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan (SPML)

Tim Kerja SPML mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan layanan teknis spektrum frekuensi radio dilaksanakan melalui kegiatan pengoperasian, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio; penanganan piutang Biaya Hak Pengguna (BHP) frekuensi radio; pelayanan pengaduan masyarakat terkait gangguan spektrum frekuensi radio dan/atau kualitas layanan infrastruktur digital; penyelenggaraan ujian amatir radio serta sertifikasi izin komunikasi radio perikanan; serta pelaksanaan konsultasi perizinan di bidang spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, dan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

04

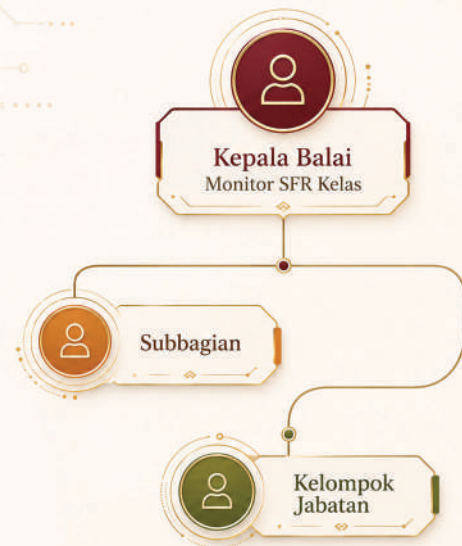
Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital (QoS)

Tim Kerja QoS mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kualitas layanan infrastruktur digital dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital, analisis dan pembaruan data hasil pengukuran, pemantauan pembangunan dan penyediaan infrastruktur digital, pemantauan gangguan layanan telekomunikasi, pemeriksaan stasiun radio *Microwave Link* dan data seluler, serta verifikasi ketidaksesuaian site Izin Stasiun Radio (ISR) *Microwave Link* melalui mekanisme Prima Aksi guna menjamin kualitas, keandalan, dan kepatuhan penyelenggaraan layanan telekomunikasi

05

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



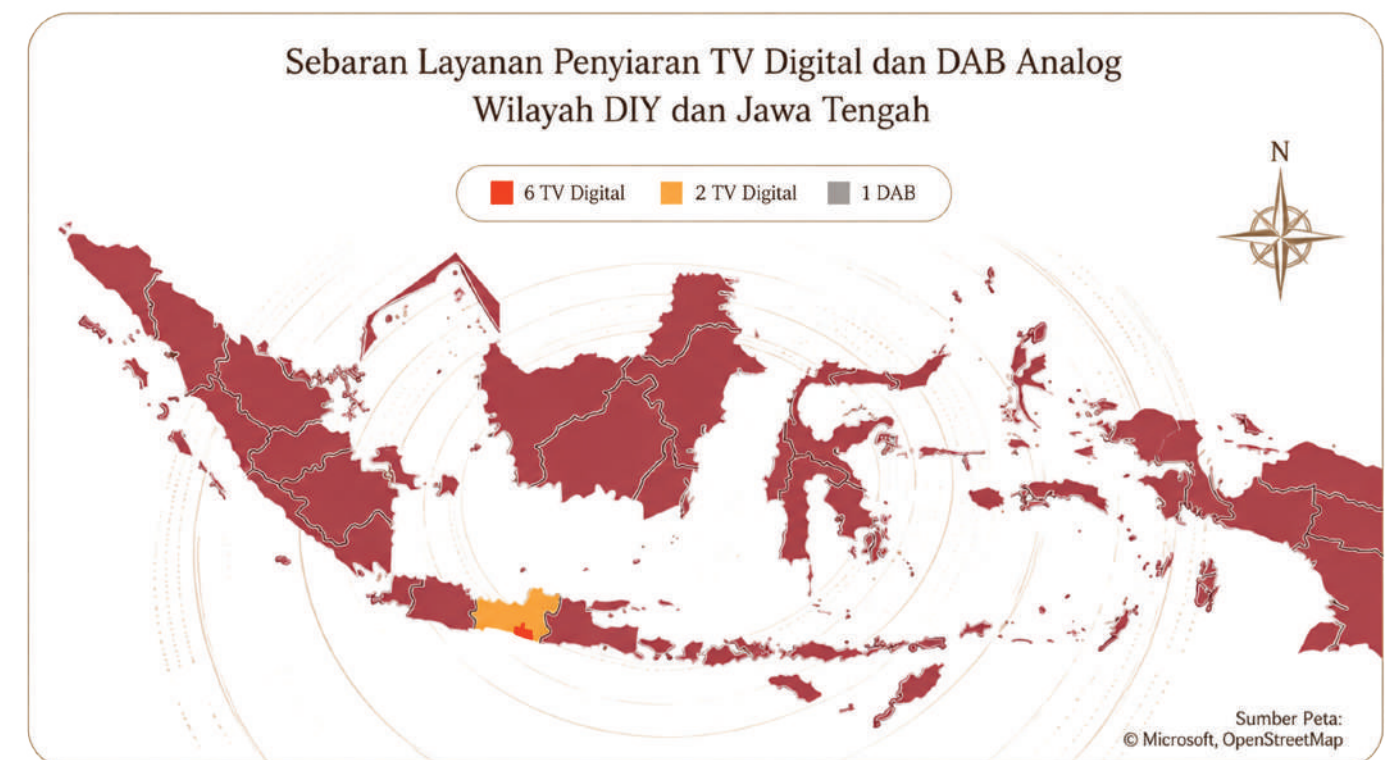
Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta

Potensi dan Permasalahan Strategis

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Setiap kabupaten/ kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini menentukan dalam rencana pengembangan daerah. Wilayah kerja Balmon Yogyakarta meliputi seluruh Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen.

Dalam pengembangan daerah salah satu pendukungnya adalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti pembangunan *transportable*, layanan internet, dan akses jaringan telekomunikasi. Perubahan infrastruktur telekomunikasi juga tidak hanya mempengaruhi pengembangan daerah, namun juga mengalami perubahan seiring adanya kebutuhan masyarakat di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Keberadaan penyelenggara TV dan penyelenggara radio FM di wilayah Yogyakarta menjadi salah satu potensi karena mengembangkan sektor bisnis dunia penyiaran dan untuk operator telekomunikasi mendukung tersedia layanan telekomunikasi di daerah. Dalam mendukung pengembangan bisnis stakeholder tersebut, harus dijalankan sesuai dengan peraturan. Untuk itu memiliki Izin Stasiun Radio menjadi kewajiban dalam penyelenggara siaran dan telekomunikasi. Berikut beberapa data penyelenggara ISR di wilayah kerja Balmon Yogyakarta.

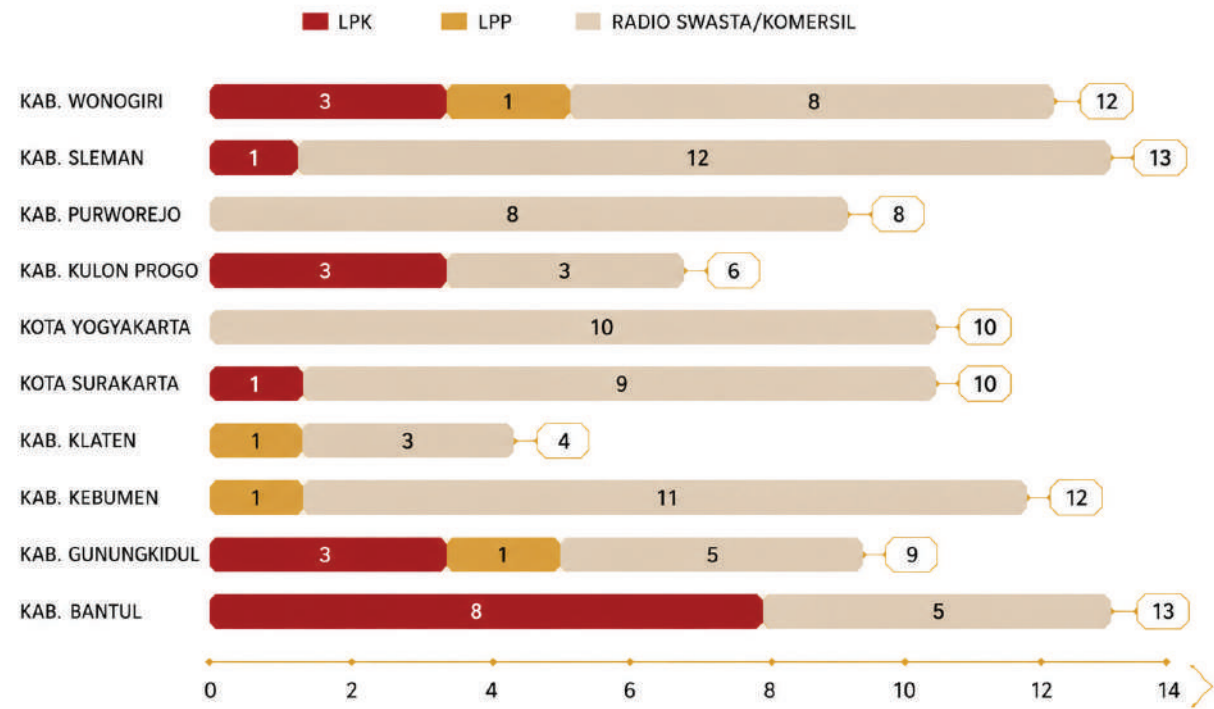
Data Penyelenggara Televisi Eksisting 2025



Berdasarkan data sebaran layanan penyiaran pada wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kebumen, Kota Yogyakarta, dan Purworejo, tercatat bahwa infrastruktur TV Digital paling banyak terdapat di Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 6 layanan. Kabupaten Kebumen dan Purworejo masing-masing memiliki 2 layanan TV Digital, sedangkan Kota Yogyakarta tidak memiliki layanan TV Digital pada periode pelaporan ini.

Untuk layanan *Digital Audio Broadcasting* (DAB), hanya terdapat 1 layanan yang berlokasi di Kota Yogyakarta, sementara kabupaten lainnya tidak tercatat memiliki layanan DAB. Secara umum, sebaran infrastruktur penyiaran menunjukkan konsentrasi layanan TV Digital yang lebih dominan dibandingkan DAB. Hal ini mencerminkan arah penguatan transformasi penyiaran digital di wilayah kerja Balmon Yogyakarta.

Data Penyelenggara Radio FM Ber-ISR Tahun 2025



Berdasarkan data Penyelenggara Radio FM Ber-ISR Tahun 2025, penyelenggaraan layanan radio FM tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah meliputi Kabupaten Wonogiri, Sleman, Purworejo, Kulon Progo, Kebumen, Klaten, Gunung Kidul, Bantul, serta Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan spektrum frekuensi radio FM telah menjangkau berbagai wilayah dengan karakteristik yang beragam.

Secara komposisi, kategori Radio Swasta/ Komersil mendominasi jumlah penyelenggara di hampir seluruh kabupaten/kota. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor komersial masih menjadi penggerak utama dalam penyelenggaraan penyiaran radio, baik dari sisi jumlah lembaga maupun intensitas pemanfaatan frekuensi. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penyelenggara terbanyak, diikuti oleh Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Kebumen, yang menunjukkan tingginya kebutuhan layanan informasi dan aktivitas penyiaran di wilayah tersebut.

Di sisi lain, keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) tersebar pada beberapa kabupaten dengan jumlah yang relatif lebih terbatas dibandingkan radio swasta. LPK berperan dalam menyediakan siaran berbasis komunitas yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal. Sementara itu, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) tercatat dalam jumlah yang lebih sedikit dan terpusat pada wilayah tertentu, dengan fungsi utama sebagai penyedia layanan informasi publik dan penyiaran yang bersifat non-komersial.

Secara keseluruhan, struktur penyelenggara Radio FM Ber-ISR Tahun 2025 menunjukkan ekosistem penyiaran yang didominasi sektor swasta dengan dukungan penyiaran komunitas dan publik sebagai pelengkap. Distribusi ini menggambarkan tingkat pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang cukup aktif serta mencerminkan dinamika kebutuhan informasi masyarakat di masing-masing wilayah kerja.

Data Pengguna ISR Berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2025

Jenis Layanan	Pengguna Layanan Pada Tahun 2023	Pengguna Teraftar Pada Aplikasi Tahun 2024	Pengguna Teraftar Pada Aplikasi Tahun 2025 *data berdasarkan pemegang izin
Aeronautical	34	35	5
Broadcast	106	116	123
Fixed Service	4197	3684	15
Land Mobile Private	552	541	370
Land Mobile Public	3697	3698	9
Other Services	3	3	1
TOTAL	8589	8077	523

Pada tahun 2025, jumlah pengguna yang tercatat dalam aplikasi sebanyak 523 pemegang izin. Jika dilihat dari komposisinya, layanan *Broadcast* masih menjadi jenis layanan dengan jumlah pengguna paling banyak yaitu 123 pengguna, diikuti oleh *Land Mobile Private* sebanyak 370 pengguna. Sementara itu, layanan lain seperti *Aeronautical* (5 pengguna), *Fixed Service* (15 pengguna), *Land Mobile Public* (9 pengguna), dan *Other Services* (1 pengguna) tercatat dalam jumlah yang lebih kecil. Perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah pengguna pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya dapat mengindikasikan bahwa data yang tercatat pada aplikasi merupakan data pengguna yang telah melakukan pembaruan atau pendaftaran pada periode berjalan. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai dengan jumlah perangkat atau stasiun radio yang dioperasikan, sehingga jumlah izin yang tercatat tidak selalu merepresentasikan jumlah entitas pengguna yang berbeda secara langsung.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan spektrum frekuensi radio masih didominasi oleh layanan komunikasi bergerak dan penyiaran. Selain itu, dinamika jumlah pengguna yang tercatat dalam aplikasi dari tahun ke tahun juga menggambarkan adanya proses pemutakhiran data, integrasi sistem perizinan, serta penyesuaian administrasi izin yang dilakukan dalam rangka meningkatkan akurasi dan pengelolaan data pengguna spektrum frekuensi radio.

Data Jumlah Aduan Berdasarkan Jenis Aduan Gangguan Tahun 2025



Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran Surakarta, LPP RRI Surakarta, PT. Radio Andalan Muda, PT. Radio Esti Mada Citra, PT. Radio Permata Swaranusa, PT. Radio Sangga Buana Citra, PT. Radio Rama Metta, PT. Radio Swara Gunung Payung, Perkumpulan Penyiaran Komunitas Gema MTA, Radio Swara Mahasiswa Sanata Dharma, PT. Radio Yasa Sindi Kalyena, PT. Radio Retjo Buntung

19



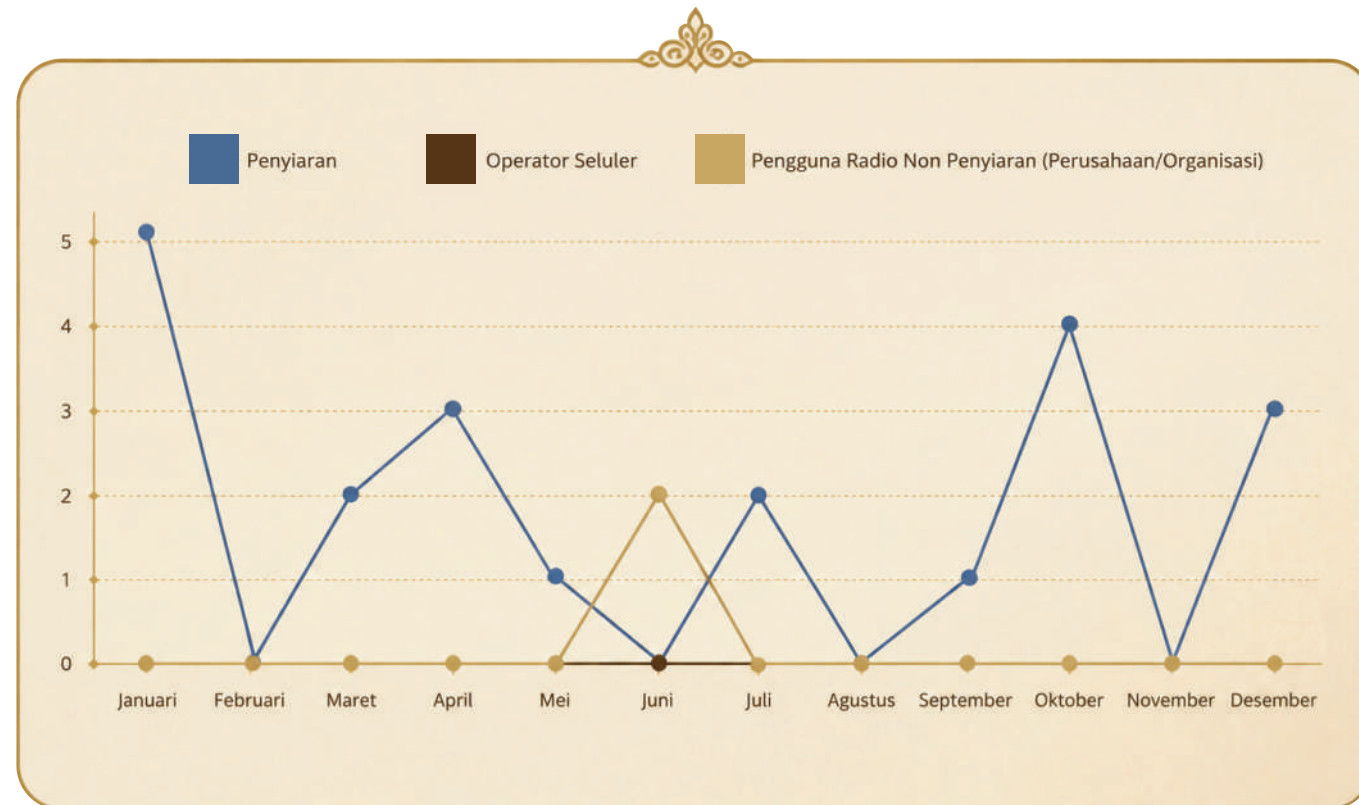
PT. Buwana Mataram Sejati (Hotel Aveta)
CV. Jagad Warna Gemilang
RAPI Kebumen

3



PT. Indosat Ooredoo
Hutchinson

3



Berdasarkan klasifikasi jenis aduan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025, sebagian besar aduan berasal dari sektor penyiaran dengan jumlah 19 aduan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan penyiaran masih menjadi sektor yang paling sering mengalami potensi interferensi frekuensi, baik yang disebabkan oleh faktor teknis perangkat pemancar maupun penggunaan kanal frekuensi yang berdekatan. Sementara itu, operator seluler tercatat sebanyak 3 aduan, dan pengguna radio non penyiaran seperti perusahaan atau organisasi komunikasi radio juga tercatat sebanyak 3 aduan.

Berbagai permasalahan dalam bidang spektrum frekuensi radio yaitu beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 01 Masih ditemukannya penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin**
 Dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio masih ditemukan pengguna yang mengoperasikan perangkat pemancar tanpa memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Pengoperasian frekuensi tanpa izin berpotensi menimbulkan interferensi atau gangguan terhadap layanan telekomunikasi yang telah memiliki izin. Kondisi ini memerlukan peningkatan kegiatan pengawasan, penertiban, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna frekuensi radio agar penggunaan spektrum dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 02 Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum**
 Ketersediaan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang spektrum frekuensi radio, masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja yang cukup luas.
- 03 Pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi yang meningkatkan kompleksitas pengelolaan spektrum**
 Perkembangan teknologi telekomunikasi dan penggunaan perangkat komunikasi nirkabel yang semakin beragam meningkatkan kebutuhan akan spektrum frekuensi radio serta kompleksitas dalam pengelolaannya. Kondisi ini menuntut peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta optimalisasi sarana monitoring agar pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dapat dilakukan secara efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balmon Yogyakarta berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta meliputi :

- 01** Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- 02** Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- 03** Capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
- 04** Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dan lampiran dokumentasi foto kegiatan.



BAB II PERJANJIAN KERJA

Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Sasaran Program
Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai panduan strategis lima tahunan yang menjabarkan visi dan misi kepemimpinan nasional hasil Pemilihan Umum 2024. Dokumen hukum ini berfungsi sebagai instrumen pengarah bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja serta alokasi pendanaan yang selaras dengan target pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur digital. Ruang lingkup tugas Ditjen Infrastruktur Digital mencakup pengelolaan *broadband*, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, pusat data (*data center*), industri telekomunikasi, perangkat TIK, beserta telekomunikasi khusus.

Dalam periode 2025-2029, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital bertindak sebagai orkestrator dalam perencanaan dan penggelaran infrastruktur secara menyeluruh guna mewujudkan konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau. Salah satu pilar utamanya adalah pengelolaan spektrum frekuensi radio yang diarahkan untuk optimalisasi alokasi spektrum bagi kebutuhan layanan *broadband*, termasuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan melalui adopsi teknologi baru seperti *Non-Terrestrial Network* (NTN).

Hingga akhir tahun 2025, penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband telah mencapai 1.720 MHz, melampaui target periode sebelumnya. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan layanan digital dan proyeksi trafik internet global yang terus meningkat, pengelolaan spektrum ke depan difokuskan pada penataan ulang (*refarming*), pengawasan penggunaan spektrum untuk mencegah penurunan kualitas layanan, serta pemutakhiran regulasi terkait Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Frekuensi Radio untuk menjaga kesehatan industri telekomunikasi. Upaya ini sangat krusial dalam memperkuat fondasi transformasi digital menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sasaran Program

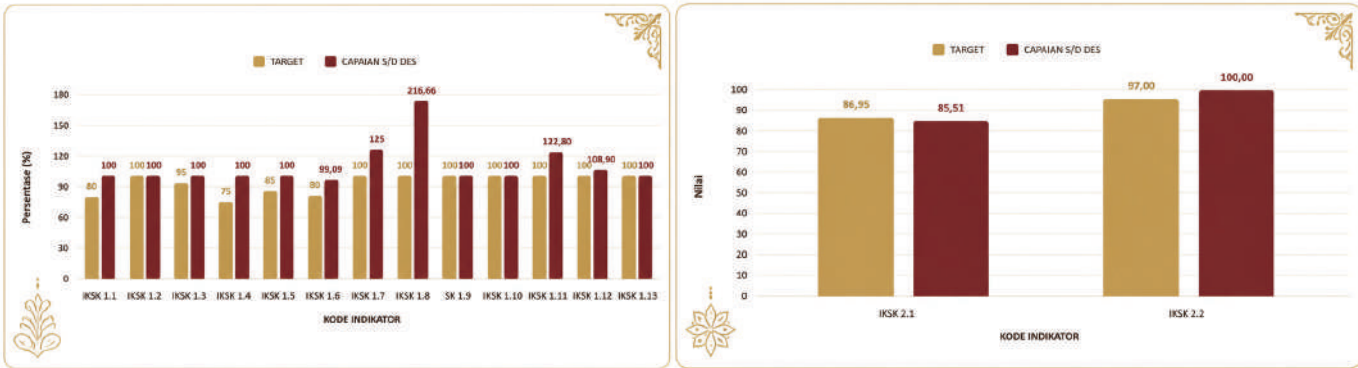
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada periode 2025 - 2029 yang telah disusun adalah sasaran program yang akan dicapai. Sasaran dalam kegiatan ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan. Tahun 2025 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan yang menjadi sasaran kegiatan yang menjadi sasaran kegiatan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta dengan rincian masing-masing indikator kinerja dan target sebagai berikut:

- 01
- Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.
- 02
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien.



Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025 dapat disajikan pada grafik berikut :



Sasaran: SK 1 Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

Sasaran: SK 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien



Jumlah Realisasi Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta pada **Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp 9.241.803.834,-** atau sebesar **98.19%** dari Pagu Rp 9.411.880.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi Anggaran



Akuntabilitas Tahun 2025 - 2029

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta (Balmon Yogyakarta) memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Perjanjian kinerja telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan dukungan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang tersedia. Pada Tahun 2025 Balmon Yogyakarta memiliki 2 (dua) sasaran kinerja yang sudah tercapai, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (I)	Indikator Kinerja (II)	Target (III)	Capaian (IV)	Kinerja (V)
1. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	125%
	2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105.26%
	4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133.33%
	5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	117.65%
	6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	99.09%	123.86%
	7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	125%	125%
	8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS - IKRAN)	100%	216.66%	216.66%
	9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
	10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
	11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	128.8%	122.8%
	12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%	108.9%
	13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi)	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Tahun 2025	86.95	85.51	98.34%
	2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103.09%

*Note : (5) didapat dari nilai (4) dibagi (3)

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



IK - 1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

1.1 Gambaran Indikator Kerja

Indikator Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota digunakan untuk mengukur tingkat cakupan pengawasan pemanfaatan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta.

Pengawasan spektrum frekuensi radio merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum, memastikan kesesuaian pemanfaatan frekuensi dengan izin yang dimiliki, serta mencegah terjadinya gangguan yang dapat berdampak pada kualitas layanan telekomunikasi dan komunikasi publik.

Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui kegiatan observasi, identifikasi, serta verifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio dengan memanfaatkan stasiun monitor tetap, *transportable*, dan stasiun monitor bergerak, serta didukung oleh sistem pelaporan digital melalui Aplikasi *Report Online* (ROL).

1.2 Capaian Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	125%

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 125% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Balmon Yogyakarta telah dilakukan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio secara menyeluruh.

Perhitungan capaian indikator dilakukan menggunakan rumus:

Capaian

=

Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitor

Jumlah Kabupaten/Kota wilayah kerja UPT

x 100%

Dengan demikian, realisasi monitoring yang mencakup seluruh wilayah kerja menunjukkan optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan spektrum frekuensi radio oleh Balmon Yogyakarta.

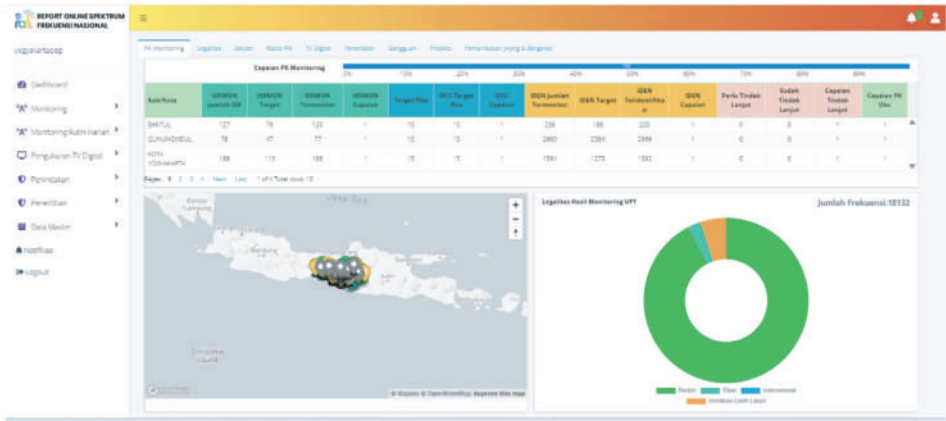
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota, terdiri dari:

a. Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kab/Kota

Monitoring pita frekuensi radio di Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio dengan menggunakan Stasiun Tetap/*Transportable* dan/atau Stasiun Jinjing/Bergerak dan dilaporkan melalui Aplikasi *Report Online* (ROL). Adapun perhitungan capaian monitoring pita frekuensi radio di Kabupaten/Kota mengacu pada parameter perhitungan:

- 1. 15 pita frekuensi radio dilakukan observasi dan identifikasi mengacu kepada data SIMS dan data referensi lainnya;
- 2. Memonitor 60% dari ISR yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Aplikasi *Report Online* (ROL);
- 3. 80% Hasil Monitor SFR harus teridentifikasi;
- 4. 100% tindak lanjut temuan pelanggaran hasil monitoring;
- 5. Kabupaten/kota yang memiliki stasiun tetap/transportable dilakukan observasi dan identifikasi minimal 1 (satu) kali setiap bulan per-stasiun tetap/*transportable*.

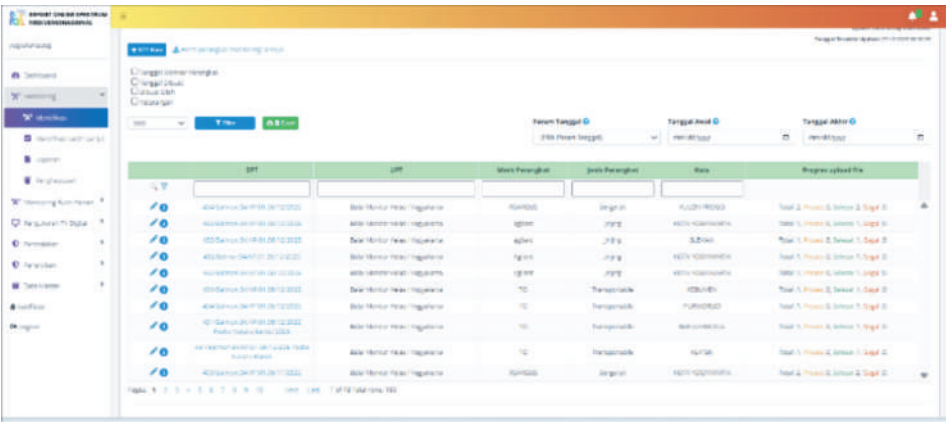
Hasil capaian untuk perhitungan Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kab/Kota sebesar **100%**.



Gambar Tampilan Aplikasi Report Online (ROL) Spektrum Frekuensi Nasional

b. Monitoring Rutin Pita dan Identifikasi Stasiun Tetap/*Transportable*

Monitoring rutin dan Identifikasi Stasiun tetap/*transportable* dilaksanakan pada setiap Kabupaten/kota yang memiliki stasiun tetap/*transportable* dilakukan observasi dan identifikasi minimal 1 (satu) kali setiap bulan per-stasiun tetap/*transportable* dan dilaporkan melalui Aplikasi *Report Online* (ROL). Hasil capaian untuk perhitungan monitoring rutin dan identifikasi stasiun tetap/*transportable* sebesar **100% (sebagaimana terlampir)**.



Gambar Tampilan Aplikasi Report Online (ROL) Monitoring Tetap/Transportable

1.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja yang melebihi target menunjukkan bahwa kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio dapat dilaksanakan secara optimal dan konsisten di seluruh wilayah kerja.

Keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan tingginya cakupan kegiatan monitoring, tetapi juga menunjukkan efektivitas sistem pengawasan spektrum frekuensi radio dalam mendukung kepatuhan pengguna spektrum serta menjaga kualitas layanan telekomunikasi.

Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui beberapa kegiatan utama, antara lain:

- a. Observasi dan identifikasi penggunaan pita frekuensi radio,
- b. Monitoring terhadap izin stasiun radio yang aktif,
- c. Identifikasi sumber pancaran radio,
- d. Serta penanganan dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran penggunaan spektrum.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan monitoring juga mengacu pada parameter operasional, antara lain:

- a. Observasi terhadap 15 pita frekuensi radio,
- b. Monitoring minimal 60% dari izin stasiun radio (ISR) yang aktif,
- c. Identifikasi minimal 80% hasil monitoring spektrum,
- d. Serta 100% tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran spektrum.

Pencapaian parameter tersebut menunjukkan bahwa kegiatan monitoring tidak hanya dilaksanakan secara luas tetapi juga memiliki kualitas identifikasi yang memadai dalam mendukung pengendalian spektrum frekuensi radio.

1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

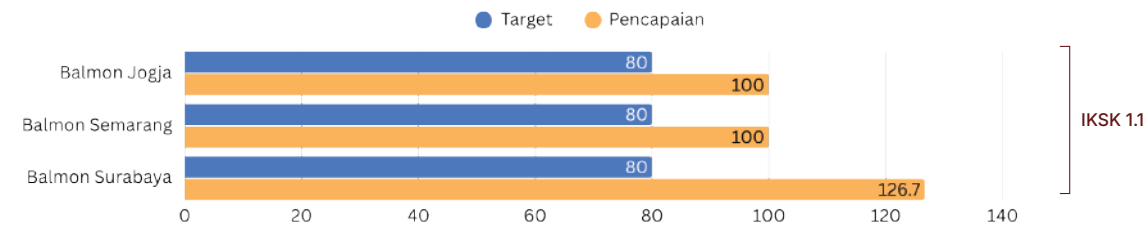
Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2021	1. Persentase okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	80%	100%	125%
	2. Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	50%	71.33%	142.66%
	3. Persentase jumlah ISR yang termonitor	70%	86.90%	124.14%
	4. Persentase hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%	98.10%	109.00%
2022	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	95%	100%	117.65%
2023	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	95%	100%	105.26%
2024	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%
2025	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	125%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja indikator ini pada tahun 2025 menunjukkan konsistensi kinerja pengawasan spektrum frekuensi radio.

Meskipun target tahun 2025 ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi monitoring tetap mampu mencapai 100% wilayah kerja, yang menunjukkan komitmen Balmon Yogyakarta dalam menjaga kualitas pengawasan spektrum secara menyeluruh.

1.5 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Target dalam indikator ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi periode 2025–2029 untuk periode lima tahun ke depan karena target kinerja Balmon Yogyakarta bukan merupakan program prioritas Nasional.



Berdasarkan hasil perbandingan dengan UPT Balai Monitor lainnya, diketahui bahwa seluruh Balmon memiliki target yang sama sebesar 80.00% dengan capaian masing-masing yaitu Balmon Yogyakarta sebesar 125.00% Balmon Semarang sebesar 125.00% dan Balmon Surabaya sebesar 158.38%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh UPT telah melampaui target yang ditetapkan.

Secara komparatif, capaian Balmon Yogyakarta setara dengan Balmon Semarang, yang sama-sama mencapai 125% dari target, serta berada di bawah capaian Balmon Surabaya yang mencapai 158% dari target. Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kerja, tingkat intensitas penggunaan spektrum frekuensi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan perangkat monitoring.

Secara keseluruhan, hasil *benchmark* menunjukkan bahwa kinerja Balmon Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan stabil serta sejalan dengan standar operasional nasional. Ke depan, diperlukan peningkatan kualitas dan efektivitas monitoring melalui optimalisasi teknologi dan pemanfaatan data, sehingga kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengawasan spektrum frekuensi radio.

1.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari capaian indikator ini antara lain:

- A. Dampak Langsung:
 - a. Terjaminnya penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai ketentuan
 - b. Berkurangnya potensi gangguan/interferensi frekuensi
 - c. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi
- B. Dampak Tidak Langsung:
 - a. Mendukung kelancaran komunikasi publik dan layanan darurat
 - b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi
 - c. Mendukung pertumbuhan ekosistem digital di wilayah kerja

1.7 Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor utama yang mendukung tercapainya capaian kinerja indikator ini antara lain:

- a. Optimalisasi pemanfaatan sistem monitoring spektrum berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem pelaporan nasional.
- b. Ketersediaan infrastruktur stasiun monitor tetap dan *transportable* yang mendukung kegiatan observasi spektrum secara berkala.
- c. Kompetensi SDM monitoring spektrum frekuensi radio yang memiliki kemampuan teknis dalam identifikasi dan analisis spektrum.
- d. Koordinasi yang efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio.



1.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi sumber daya dan anggaran melalui:

- a. Pemanfaatan sistem monitoring spektrum berbasis digital,
- b. Integrasi pelaporan melalui Aplikasi *Report Online* (ROL),
- c. Optimalisasi penggunaan stasiun monitor *transportable* dan *mobile* monitoring, serta
- d. Efisiensi penggunaan anggaran operasional melalui pengurangan kegiatan observasi manual dan perjalanan dinas yang tidak diperlukan.

Efisiensi anggaran pada indikator ini mencapai **89%**, dengan realisasi sebesar Rp243.580.000 dari pagu Rp273.660.000. Efisiensi diperoleh melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring menggunakan kombinasi stasiun tetap, *transportable*, dan stasiun bergerak, sehingga mampu menekan biaya operasional tanpa mengurangi cakupan pengawasan. Selain itu, pemanfaatan sistem pelaporan digital turut mendukung efisiensi dalam pengolahan data hasil monitoring.

1.9 Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja dan Rekomendasi

Langkah tindak lanjut dan evaluasi pada tahun sebelumnya dilakukan antara lain:

- a. Pemutakhiran data hasil monitoring secara berkala dalam sistem ROL
- b. Evaluasi wilayah dengan potensi gangguan tinggi
- c. Peningkatan kualitas analisis data monitoring
- d. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam penertiban penggunaan frekuensi

Untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya, direkomendasikan:

- a. Penerapan monitoring berbasis risiko (*risk-based* monitoring)
- b. Integrasi sistem monitoring dengan *dashboard* digital
- c. Peningkatan frekuensi monitoring di wilayah padat frekuensi
- d. Penguatan kapasitas Sumber Data Manusia dalam analisis spektrum

IK - 1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

2.1 Gambaran Indikator Kinerja

Indikator Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan pengawasan terhadap operasional stasiun radio guna memastikan bahwa seluruh penggunaan spektrum frekuensi radio telah sesuai dengan ketentuan perizinan serta standar teknis yang berlaku.

Pemeriksaan stasiun radio dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio serta meminimalkan potensi gangguan frekuensi yang dapat mempengaruhi kualitas layanan telekomunikasi. Kegiatan inspeksi mencakup pemeriksaan stasiun radio *Microwave Link*, pengukuran stasiun siaran radio FM, serta pengukuran stasiun televisi digital terestrial.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital seperti **APSTAR (Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio)** dan **Report Online (ROL)** sehingga proses pelaporan dan validasi hasil pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.

2.2 Capaian Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%

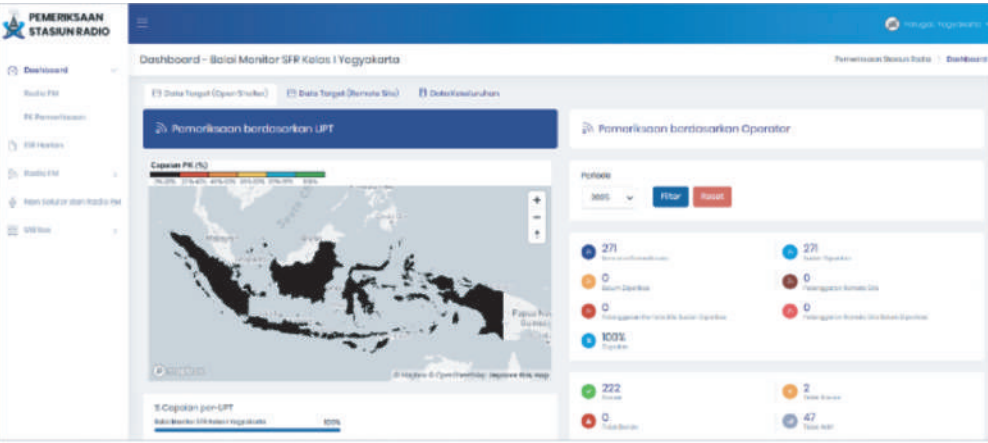
Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025, indikator Persentase Pemeriksaan **Stasiun Radio memiliki target sebesar 100%** dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian indikator ini mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan stasiun radio yang direncanakan dalam perjanjian kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan *Microwave Link* serta pengukuran stasiun siaran radio FM dan stasiun televisi digital terrestrial.

Pada kegiatan pemeriksaan *Microwave Link*, metode pemeriksaan dilakukan melalui *Open Shelter* dan *Remote Site* sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaporkan melalui aplikasi APSTARD, capaian pemeriksaan melalui metode *Open Shelter* mencapai 100% dengan 2 temuan pelanggaran yang seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Sementara itu, pemeriksaan melalui metode *Remote Site* juga mencapai 100% dengan tidak ditemukan pelanggaran.



Selain itu, kegiatan pengukuran stasiun siaran juga dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian parameter teknis penyiaran. Pengukuran terhadap **stasiun televisi digital terrestrial** dilakukan terhadap **10 stasiun dari total target 10 stasiun**, sehingga capaian kegiatan mencapai **100%** dengan **tidak ditemukan pelanggaran teknis**.

Pada kegiatan pengukuran **stasiun siaran radio FM**, dari target **50 stasiun** telah dilakukan pengukuran terhadap **93 stasiun**, sehingga capaian mencapai **186% dari target** atau **dianggap 100% dalam perhitungan indikator kinerja**. Dari kegiatan tersebut ditemukan **18 temuan pelanggaran**, yang seluruhnya telah ditindaklanjuti melalui kegiatan penertiban.

Hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balmon Yogyakarta relatif baik dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio telah berjalan secara efektif.

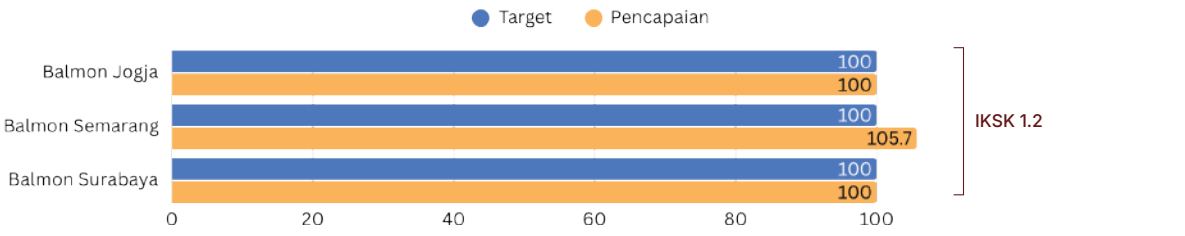
2.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2021	1. Persentase Pelaksanaan Inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	90%	96.74%	107.94%
2022	1. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100%	100%
2023	1. Persentase (%) Pemeriksaaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
2024	1. Persentase (%) Pemeriksaaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
2025	1. Persentase (%) Pemeriksaaan Stasiun Radio	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut, capaian indikator Pemeriksaan Stasiun Radio menunjukkan tren kinerja yang konsisten dalam mencapai target yang telah ditetapkan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan stabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan spektrum frekuensi radio oleh Balmon Yogyakarta.

2.5 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Indikator pemeriksaan stasiun radio tidak secara langsung tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, sehingga perbandingan kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis Balmon lainnya.



Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja Balmon Yogyakarta berada pada tingkat yang setara dengan UPT Balmon lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio.

Berdasarkan hasil perbandingan, seluruh Balmon memiliki target yang sama sebesar 100,00, dengan capaian Balmon Yogyakarta sebesar 100,00, Balmon Semarang sebesar 105,70, dan Balmon Surabaya sebesar 100,00. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh UPT telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan Balmon Semarang melampaui target.

Secara komparatif, capaian Balmon Yogyakarta setara dengan Balmon Surabaya, yang sama-sama mencapai target 100%, serta sedikit berada di bawah capaian Balmon Semarang. Kesetaraan capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio di Balmon Yogyakarta telah berjalan optimal dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

Perbedaan capaian dengan Balmon Semarang menunjukkan adanya ruang peningkatan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor intensitas pelaksanaan pemeriksaan, cakupan objek pengawasan, serta optimalisasi sumber daya dan metode pemeriksaan.

2.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari capaian indikator ini antara lain:

- A. Dampak Langsung:
 - a. Terjaminnya penggunaan spektrum frekuensi radio
 - b. Menurunnya potensi gangguan frekuensi
 - c. Meningkatnya kualitas layanan telekomunikasi
- B. Dampak Tidak Langsung:
 - a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan penyiaran
 - b. Mendukung stabilitas komunikasi nasional
 - c. Mendukung ekosistem digital dan penyiaran yang sehat

2.7 Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target kinerja indikator ini antara lain:

- A. Pemanfaatan sistem pelaporan pemeriksaan berbasis aplikasi digital yang meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan.
- B. Ketersediaan database Izin Stasiun Radio (ISR) yang mendukung proses verifikasi teknis.
- C. Kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan inspeksi spektrum frekuensi radio.
- D. Koordinasi yang baik dengan operator telekomunikasi serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pemeriksaan.

2.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses inspeksi dan pelaporan. Penggunaan aplikasi **APSTARD** serta metode pemeriksaan *Remote Site* memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan secara lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi kualitas pengawasan. Pendekatan tersebut juga mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, penerapan metode tersebut turut memberikan efisiensi anggaran Tingkat efisiensi mencapai **48%**, dengan realisasi Rp60.540.000 dari pagu Rp125.864.000 yang diperoleh dari pengurangan kebutuhan perjalanan dinas, efisiensi penggunaan bahan bakar, serta optimalisasi waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Efisiensi yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara selektif dan berbasis prioritas, termasuk optimalisasi validasi ISR dalam dan luar kota. Pemanfaatan metode pemeriksaan berbasis risiko serta dukungan aplikasi digital berkontribusi dalam menekan kebutuhan anggaran.

2.9 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

- a. Penguatan sistem pelaporan digital berbasis *cloud*
- b. Integrasi data inspeksi dengan database perizinan spektrum
- c. Peningkatan kualitas analisis hasil pemeriksaan
- d. Optimalisasi tindak lanjut terhadap pelanggaran

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

- a. Pengembangan sistem inspeksi berbasis *cloud* dan *real-time*
- b. Integrasi penuh antara sistem APSTARD, ROL, dan *database* ISR
- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknologi monitoring terbaru
- d. Peningkatan intensitas inspeksi pada wilayah dengan tingkat pelanggaran tinggi

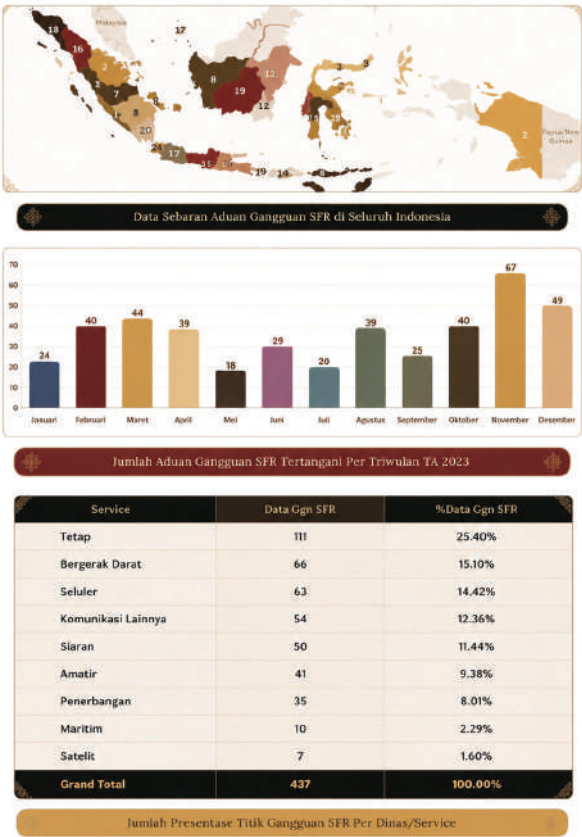
IK - 1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

3.1 Gambaran Indikator Kinerja

Indikator Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Unit Pelaksana Teknis dalam merespon dan menyelesaikan laporan gangguan spektrum frekuensi radio yang disampaikan oleh masyarakat, penyelenggara telekomunikasi, maupun instansi pengguna frekuensi radio.

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari pelayanan publik di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio yang bertujuan untuk menjaga ketertiban penggunaan spektrum serta memastikan layanan telekomunikasi dan penyiaran dapat berjalan secara optimal tanpa gangguan interferensi.

Pelaksanaan penanganan gangguan SFR dilakukan melalui kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio, analisis sumber gangguan, serta tindakan teknis penertiban apabila ditemukan pelanggaran penggunaan frekuensi radio. Berikut merupakan rincian gambaran penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di seluruh Indonesia.



3.2 Capaian Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring dan pengendalian spektrum frekuensi radio	Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%	100%

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta menerima **23 laporan pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio** dari berbagai layanan frekuensi.



Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan hingga **bulan Desember 2025**, sehingga capaian indikator **Persentase Penanganan Gangguan SFR** mencapai **100%** dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilaksanakan melalui proses identifikasi sumber gangguan, analisis teknis menggunakan perangkat monitoring spektrum frekuensi radio, serta koordinasi dengan pengguna frekuensi terkait untuk melakukan penyelesaian gangguan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan gangguan yang masuk selama tahun 2025, sebagian besar gangguan terjadi pada dinas bergerak darat (*private mobile* radio), diikuti oleh dinas siaran, serta dinas tetap. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan perangkat komunikasi radio pada sektor industri, transportasi, serta kegiatan operasional instansi pemerintah maupun swasta.

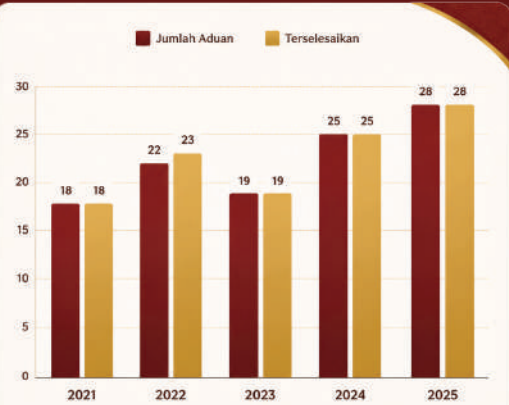
Sementara itu, untuk dinas keselamatan seperti penerbangan (*aeronautical*) dan maritim (*maritime*), tidak ditemukan adanya laporan gangguan spektrum frekuensi radio selama tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan frekuensi pada dinas keselamatan relatif terjaga dengan baik serta memiliki tingkat kepatuhan penggunaan frekuensi yang tinggi.

Secara umum, capaian kinerja ini menunjukkan bahwa mekanisme respon terhadap pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio telah berjalan secara efektif, sehingga gangguan yang berpotensi menghambat layanan telekomunikasi dapat ditangani secara cepat dan tepat.

3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2021	1. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%	100%	103.09%
2022	1. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	98%	100%	102.04%
2023	1. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%	100%	101.01%
2024	1. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%	100%
2025	1. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105.26%

Rekapitulasi Aduan dan Penyelesaian Gangguan Spektrum Frekuensi Radio



Berdasarkan tabel rekapitulasi aduan dan penyelesaian gangguan spektrum frekuensi radio tahun 2022–2025, jumlah aduan menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yaitu sebanyak 18 aduan pada tahun 2022, meningkat menjadi 21 aduan pada tahun 2023, menurun menjadi 19 aduan pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 23 aduan pada tahun 2025. Peningkatan pada tahun 2025 mengindikasikan semakin tingginya aktivitas penggunaan spektrum frekuensi radio serta meningkatnya kesadaran pengguna dalam melaporkan gangguan.

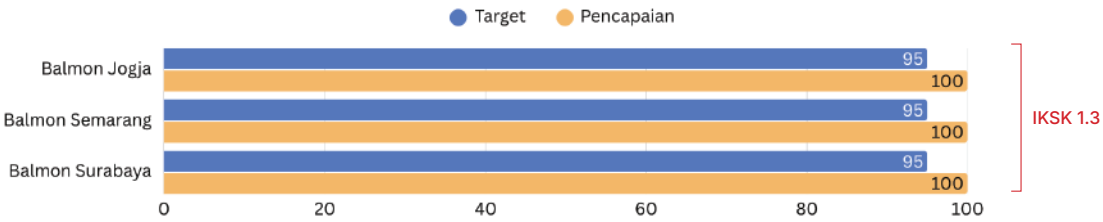
Meskipun jumlah aduan mengalami perubahan setiap tahun, seluruh aduan dapat diselesaikan 100%, sehingga capaian kinerja tetap maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa Balmon Yogyakarta memiliki kapasitas yang baik dan konsisten dalam merespons dan menangani gangguan secara cepat dan efektif.



3.5 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Indikator penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan indikator kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Balai Monitor di Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan hasil pelaporan nasional, sebagian besar UPT Balmon juga mencapai tingkat penyelesaian gangguan sebesar **100%** terhadap laporan yang diterima. Dengan capaian tersebut, kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta berada pada tingkat yang setara dengan UPT Balmon lainnya dalam hal penyelesaian laporan gangguan spektrum frekuensi radio.



Berdasarkan hasil perbandingan, seluruh Balmon memiliki target yang sama sebesar 95,00 dengan capaian masing-masing sebesar 100,00 pada Balmon Yogyakarta, Balmon Semarang, dan Balmon Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh UPT telah melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 105,26%.

Secara komparatif, capaian Balmon Yogyakarta berada pada tingkat yang setara dengan Balmon lainnya, yang mencerminkan bahwa kinerja penanganan gangguan telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten sesuai dengan standar operasional nasional.

Namun demikian, kesamaan capaian 100% pada 3 (tiga) UPT menunjukkan bahwa indikator ini telah berada pada level kinerja yang matang, sehingga tidak lagi menunjukkan diferensiasi kinerja antar unit. Dalam perspektif evaluasi kinerja, kondisi ini mengindikasikan bahwa ukuran keberhasilan tidak lagi cukup dilihat dari tingkat penyelesaian, tetapi perlu diperluas pada aspek kualitas penanganan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penguatan indikator kinerja ke depan melalui pengukuran yang lebih komprehensif, seperti kecepatan waktu respon, ketepatan identifikasi sumber gangguan, serta efektivitas upaya pencegahan gangguan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi monitoring dan analisis data juga perlu ditingkatkan untuk mendukung penanganan gangguan yang lebih proaktif.

3.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian indikator penanganan gangguan spektrum frekuensi radio ini dapat dilihat dari aspek langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

- A. Dampak Langsung:
 - a. Seluruh laporan gangguan spektrum frekuensi radio dapat diselesaikan secara cepat dan tepat, sehingga tidak mengganggu keberlangsungan layanan telekomunikasi.
 - b. Terjaganya kualitas layanan komunikasi radio pada berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan penyiaran.
 - c. Meningkatnya tingkat kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio terhadap ketentuan yang berlaku.
- B. Dampak Tidak Langsung:
 - a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi terhadap layanan pengaduan dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.
 - b. Mendukung kelancaran komunikasi pada sektor strategis nasional, termasuk pelayanan publik dan kegiatan operasional instansi pemerintah maupun swasta.
 - c. Memperkuat stabilitas penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas yang dikelola secara tertib dan berkelanjutan.

3.7 Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio antara lain:

- A. Ketersediaan perangkat monitoring spektrum frekuensi radio yang mendukung proses identifikasi sumber gangguan secara akurat.
- B. Kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan analisis teknis gangguan frekuensi radio.
- C. Koordinasi yang baik antara Balai Monitor dengan pengguna frekuensi radio dan penyelenggara telekomunikasi dalam proses penyelesaian gangguan.
- D. Penerapan mekanisme respon cepat terhadap pengaduan masyarakat yang memungkinkan gangguan segera ditindaklanjuti.

3.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilakukan dengan memanfaatkan perangkat monitoring serta sistem pelaporan digital yang memungkinkan proses identifikasi gangguan dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

Optimalisasi penggunaan perangkat monitoring spektrum serta pemanfaatan data monitoring yang telah tersedia memungkinkan proses analisis gangguan dilakukan secara lebih efektif tanpa memerlukan peningkatan sumber daya secara signifikan.

Selain itu, efisiensi anggaran juga tercapai melalui pengurangan kebutuhan kegiatan lapangan secara langsung (*on-site*) dengan mengedepankan metode pemantauan jarak jauh (*remote monitoring*), sehingga mampu menekan biaya perjalanan dinas, operasional, serta pemeliharaan peralatan. Efisiensi anggaran sebesar **75%**, dengan realisasi Rp39.000.000 dari pagu Rp51.840.000.

Efisiensi dicapai melalui pemanfaatan perangkat monitoring yang tersedia dan penggunaan data hasil monitoring sebelumnya, sehingga proses identifikasi dan penanganan gangguan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran tanpa memerlukan biaya tambahan yang besar. Pendekatan ini tidak hanya mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga meningkatkan kecepatan respon terhadap laporan gangguan yang masuk serta memastikan penggunaan anggaran yang lebih optimal dan tepat sasaran.

3.9 Tindaklanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

- a. Penguatan sistem pelaporan digital berbasis *cloud*
- b. Integrasi data inspeksi dengan *database* perizinan spektrum
- c. Peningkatan kualitas analisis hasil pemeriksaan
- d. Optimalisasi tindak lanjut terhadap pelanggaran

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

- a. Pengembangan sistem inspeksi berbasis *cloud* dan *real-time* (penyempurnaan dari sistem yang sudah berjalan)
- b. Integrasi penuh antara sistem APSTARD, ROL, dan *database* ISR (menuju interoperabilitas menyeluruh)
- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknologi monitoring terbaru
- d. Peningkatan intensitas inspeksi pada wilayah dengan tingkat pelanggaran tinggi berbasis data hasil analisis.

IK - 1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

4.1 Gambaran Indikator Kinerja

Indikator Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan penggunaan serta peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi terhadap standar teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang pemanfaatannya harus diatur oleh negara agar dapat digunakan secara efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran alat/perangkat telekomunikasi menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

Kegiatan pengawasan dilakukan melalui monitoring terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh masyarakat maupun yang diperdagangkan di pasar. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat yang beredar telah memiliki sertifikasi standar teknis serta memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio.

4.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan penggunaan alat / perangkat telekomunikasi terhadap standar teknis	Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi	100%	100%	100%

Pada tahun **2025**, Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta melaksanakan kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi dengan metode observasi dan evaluasi terhadap label sertifikasi atau QR Code yang tertera pada perangkat serta verifikasi terhadap database perangkat yang telah tersertifikasi pada sistem **sertifikasi.postel.go.id** dan aplikasi **SIRANI**.

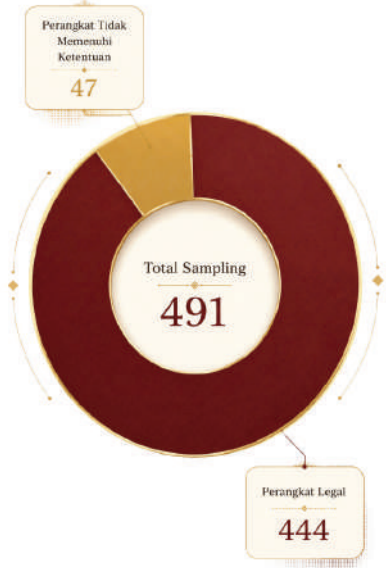
Berdasarkan kegiatan monitoring yang dilaporkan melalui aplikasi SMART (Sistem Monitoring Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi), capaian indikator Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

4.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pemeriksaan monitoring Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang disampaikan UPT terhadap 16 Jenis Perangkat :

RADIO KOMUNIKASI	JARINGAN & DATA	BROADCAST & UMUM	KHUSUS & MODIFIKASI
HF All Band Transceiver Handy Talkie (HT) Radio RIG Radio POC	Optical Line Terminal (OLT) Microwave Link (IDU/ODU) Wireless Access Point Repeater GSM	Perangkat Low Power Pemancar FM Set Top Box (STB) GPS Tracker	Simbox Jammer Fake BTS APT Rakitan

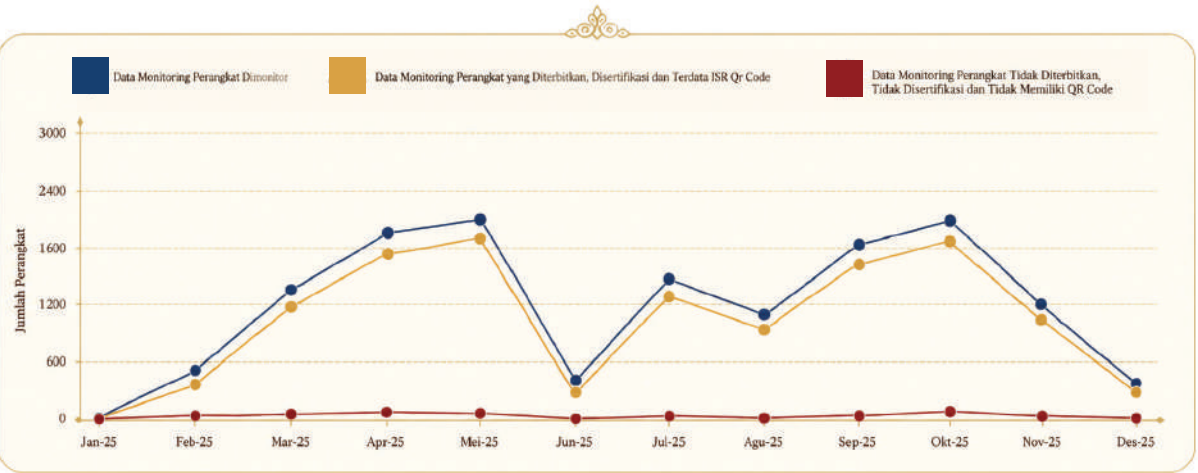
Berdasarkan hasil kegiatan monitoring yang dilakukan pada tahun 2025, jumlah sampling perangkat telekomunikasi yang diperiksa sebanyak 491 perangkat, yang terdiri dari:



Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sekitar 90% perangkat yang dimonitor telah memenuhi ketentuan sertifikasi standar teknis, sedangkan sekitar 10% perangkat masih ditemukan tidak memenuhi ketentuan.

Perangkat yang tidak memenuhi standar teknis umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak memiliki sertifikasi perangkat telekomunikasi, penggunaan perangkat rakitan, atau ketidaksesuaian antara spesifikasi perangkat dengan sertifikat yang dimiliki.

Temuan terhadap perangkat yang tidak memenuhi ketentuan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui kegiatan penertiban perangkat telekomunikasi, baik dalam kegiatan Penertiban Nasional (Tibnas) maupun penertiban yang dilaksanakan oleh UPT.



Perhitungan capaian persentase (%) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dievaluasi berdasarkan data temuan pelanggaran penggunaan dan/atau perdagangan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak bersertifikat atau tidak sesuai dengan standar teknis terhadap sertifikat yang dimiliki yang dilaksanakan pada kegiatan Penertiban Nasional (Tibnas) maupun penertiban skala regional UPT yang ditindaklanjuti dengan adanya sanksi administrasi berupa Surat Teguran, Denda Administrasi dan Daya Paksa Polisional berupa Penyegehan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada setiap kegiatan penertiban dan dilaporkan melalui Aplikasi Sistem Monitoring Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (SMART) dan/atau Nota Dinas kepada Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital.

4.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2021	1. Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	70%	86,94%	124.20%
	2. Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	1 Keg	2 Keg	200%
2022	1. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	90%	98,93%	109.92%
2023	1. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	93%	100%	107.53%
2024	1. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%	107.53%
2025	1. Presentase (%) Tingkat Kepatihan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133.33%



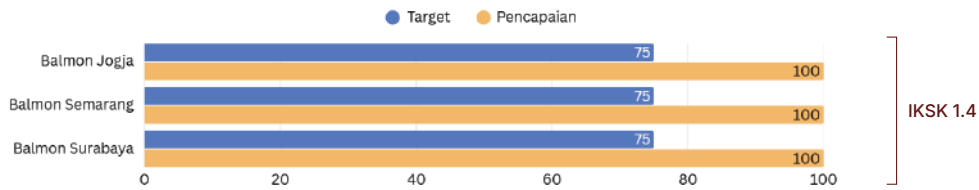
Berdasarkan data tersebut, jumlah perangkat yang dimonitor menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas pengawasan terhadap peredaran alat/perangkat telekomunikasi di masyarakat.

Meskipun ditemukan perangkat yang tidak memenuhi standar teknis, seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti sehingga capaian indikator tetap mencapai 100% sesuai target kinerja.

4.5 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Indikator pemeriksaan stasiun radio tidak secara langsung tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam **RPJMN 2025–2029**, sehingga perbandingan kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis Balmon lainnya.

Berikut perbandingan Realitas Kinerja dengan UPT Balmon



IKSK 1.4

Kegiatan monitoring dan penertiban alat/perangkat telekomunikasi dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia sebagai bagian dari pengawasan terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi.

Berdasarkan hasil pelaporan nasional, sebagian besar UPT Balmon juga mencapai tingkat penyelesaian kegiatan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi sebesar **100%** terhadap target yang telah ditetapkan.

Dengan capaian tersebut, kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta berada pada tingkat yang setara dengan UPT Balmon lainnya dalam hal pengawasan terhadap kepatuhan standar teknis alat/perangkat telekomunikasi.

4.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian indikator tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dapat dilihat dari aspek langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

- A. Dampak Langsung:
 - a. Meningkatnya jumlah perangkat telekomunikasi yang memenuhi standar teknis dan telah tersertifikasi secara resmi.
 - b. Berkurangnya potensi gangguan spektrum frekuensi radio yang disebabkan oleh penggunaan perangkat ilegal atau tidak sesuai spesifikasi teknis.
 - c. Terwujudnya tertib penggunaan dan peredaran alat/perangkat telekomunikasi di masyarakat.
- B. Dampak Tidak Langsung:
 - a. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya penggunaan perangkat telekomunikasi yang bersertifikat.
 - b. Mendukung terciptanya ekosistem telekomunikasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
 - c. Memperkuat efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas yang dikelola negara.



4.7 Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain:

- A. Pemanfaatan database sertifikasi perangkat telekomunikasi melalui sistem sertifikasi Postel dan aplikasi SIRANI.
- B. Dukungan aplikasi SMART sebagai sistem pelaporan monitoring perangkat telekomunikasi secara nasional.
- C. Kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan identifikasi perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis.
- D. Koordinasi yang baik dengan pelaku usaha dan pedagang perangkat telekomunikasi dalam proses pengawasan peredaran perangkat.

4.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi dilakukan dengan pendekatan *sampling* terhadap berbagai jenis perangkat yang beredar di masyarakat. Metode ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih efektif tanpa memerlukan pemeriksaan terhadap seluruh perangkat yang beredar.

Pemanfaatan sistem digital seperti **SMART** serta akses terhadap database sertifikasi perangkat telekomunikasi juga mendukung efisiensi proses verifikasi terhadap status sertifikasi perangkat.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp168.510.800, yang diperoleh dari pengurangan kebutuhan pemeriksaan menyeluruh, optimalisasi penggunaan teknologi digital, serta efisiensi biaya operasional di lapangan.

4.9 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

- a. Penguatan pelaksanaan monitoring alat/perangkat telekomunikasi melalui pemanfaatan aplikasi SMART secara optimal
- b. Peningkatan pemanfaatan *database* sertifikasi perangkat telekomunikasi melalui sistem sertifikasi Postel dan aplikasi SIRANI dalam proses verifikasi perangkat
- c. Pelaksanaan penertiban terhadap perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan melalui kegiatan Penertiban Nasional (Tibnas) dan penertiban regional UPT
- d. Peningkatan koordinasi dengan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital dalam penanganan temuan perangkat ilegal

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

- a. Pengembangan sistem monitoring perangkat telekomunikasi berbasis digital yang lebih terintegrasi dan real-time
- b. Peningkatan kegiatan pengawasan pada jalur distribusi dan perdagangan perangkat telekomunikasi untuk menekan peredaran perangkat ilegal
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam identifikasi perangkat dan analisis kepatuhan standar teknis
- d. Penguatan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait penggunaan perangkat telekomunikasi bersertifikat

IK - 1.5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

5.1 Gambaran Indikator Kinerja

Indikator Persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio UPT digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan keandalan stasiun monitor dalam melaksanakan fungsi pengawasan spektrum frekuensi radio.

Keberadaan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas. Kinerja sistem monitoring yang optimal akan mendukung efektivitas kegiatan pengawasan, deteksi gangguan, serta pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pengukuran indikator ini dilakukan melalui pendekatan *Service Level Agreement* (SLA) terhadap kondisi perangkat monitoring, baik pada stasiun tetap/*transportable* maupun stasiun bergerak.

5.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada bulan Desember 2025, capaian indikator Persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio UPT Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta sebesar **100 %**.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	117.65%

Capaian tersebut telah melampaui target kinerja bulanan yang ditetapkan sebesar 85%, sehingga menunjukkan bahwa operasional stasiun monitoring secara umum berada dalam kondisi sangat baik. Perhitungan capaian berdasarkan tabel diatas dijelaskan dengan rumus berikut:

% Capaian

=

Jumlah Stasiun Monitor Siap Operasional untuk melakukan monitoring

Total Stasiun Monitor

x 100%

=

8

8

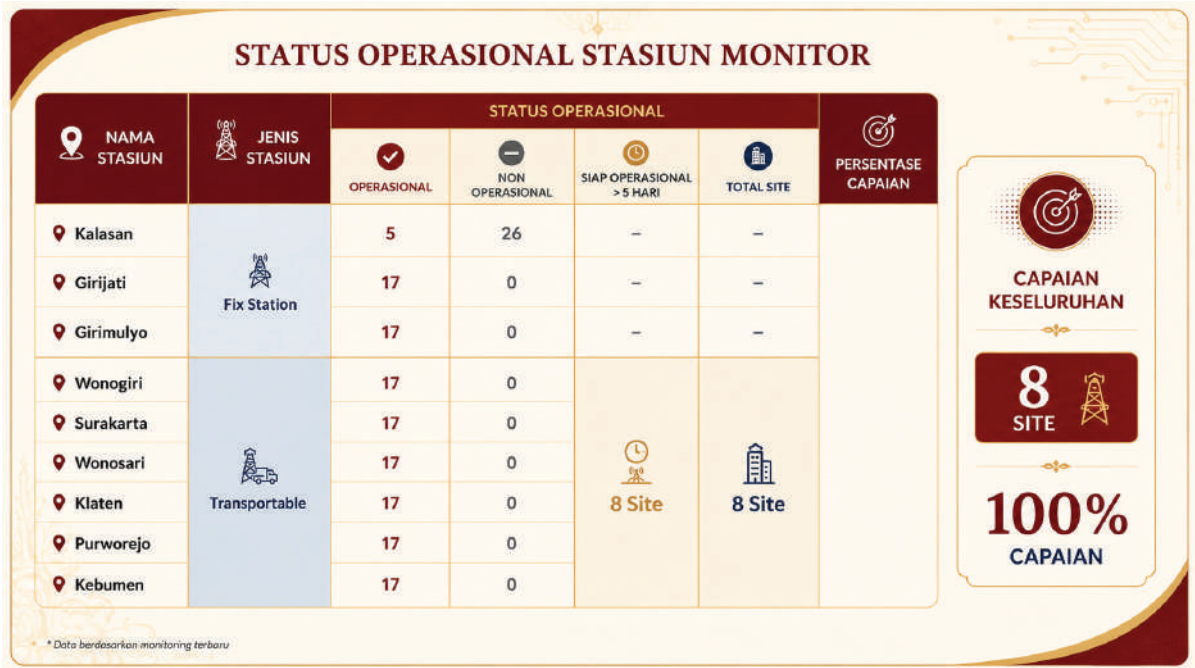
x 100%

Stasiun monitor yang dimaksud adalah stasiun monitor tetap/t ransportabel yang tercatat di dalam di aplikasi Sistem Monitoring Spektrum Nasional (SMSN) dan *Report Online* (ROL)



5.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Perangkat Pendukung SMFR (Spektrum Frekuensi Radio) dan alat monitoring/ukur di UPT (Unit Pelaksana Teknis) berfungsi untuk memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio yang efisien dan efektif. Alat-alat ini digunakan untuk monitoring, pengukuran, inspeksi, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio. Dengan berfungsinya perangkat pendukung ini, UPT dapat memastikan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengidentifikasi dan menangani gangguan frekuensi, serta memberikan layanan telekomunikasi yang berkualitas kepada masyarakat. Terdapat 3 stasiun tetap dan 6 stasiun transportabel yang berada di wilayah kerja Balmon Yogyakarta.



Berdasarkan penjelasan/temuan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur adalah sebesar 100%.

Capaian kinerja diperoleh dari pengukuran terhadap 9 stasiun tetap/transportable dan 2 stasiun bergerak (mobil monitoring).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar stasiun monitoring berada dalam kondisi optimal dengan capaian SLA sebesar 100%. Namun demikian, terdapat beberapa stasiun yang mengalami penurunan kinerja akibat kerusakan perangkat utama.

Stasiun yang mengalami kendala antara lain:

- a. Girimulyo
- b. Surakarta (Solo)
- c. Wonosari

Ketiga stasiun tersebut mengalami kerusakan pada perangkat utama (*All Band Receiver*) yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kegiatan monitoring okupansi secara optimal.

Secara keseluruhan:

- a. Rata-rata SLA stasiun tetap/*transportable*: 93,3%
- b. Rata-rata SLA stasiun bergerak: 100%

Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, capaian total tetap tinggi karena mayoritas stasiun beroperasi secara optimal serta stasiun bergerak dalam kondisi baik dan berfungsi maksimal.



5.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Secara umum, capaian indikator operasional stasiun monitoring menunjukkan tren yang stabil dan berada di atas target kinerja dalam beberapa periode terakhir.

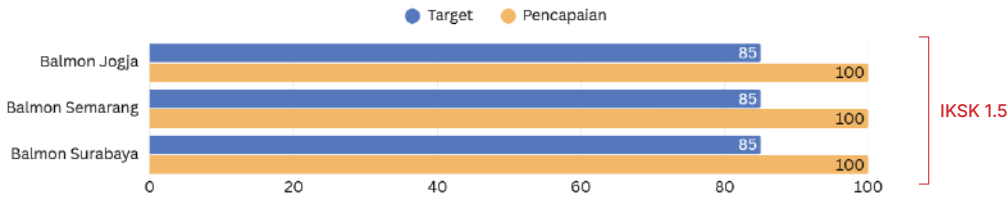
Capaian bulan Desember 2025 sebesar 96,67% menunjukkan bahwa tingkat keandalan sistem monitoring tetap terjaga meskipun terdapat beberapa kendala teknis pada sebagian perangkat.

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2021	1. Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/ Ukur di UPT	85%	98.25%	115.29%
2022	1. Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/ Ukur di UPT	95%	100%	105.26%
2023	1. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/ Ukur di UPT	95%	100%	105.26%
2024	1. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100%	105.26%
2025	1. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	117.65%

5.5 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Secara nasional, target indikator operasional stasiun monitoring ditetapkan sebesar 85%. Dengan capaian sebesar 117.65%, kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta berada di atas target nasional.

Jika dibandingkan dengan UPT Balmon lainnya, capaian ini termasuk dalam kategori tinggi, mengingat sebagian besar stasiun monitoring berada dalam kondisi operasional yang optimal.



5.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian indikator terjaganya operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio dapat dilihat dari aspek langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

- A. Dampak Langsung:
 - a. Terjaminnya kontinuitas kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio di wilayah kerja secara optimal.
 - b. Meningkatnya kemampuan deteksi dini terhadap gangguan spektrum frekuensi radio.
 - c. Terjaganya kualitas data hasil monitoring yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian spektrum.
- B. Dampak Tidak Langsung:
 - a. Mendukung efektivitas pengawasan dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja.
 - b. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap keandalan sistem monitoring spektrum frekuensi radio.
 - c. Memperkuat pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan berkelanjutan sebagai sumber daya strategis nasional.

5.7 Faktor Keberhasilan

- Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:
- a. Tingginya tingkat kesiapan sebagian besar perangkat monitoring.
 - b. Optimalnya operasional stasiun bergerak berupa mobil monitoring yang mencapai capaian 100%.
 - c. Konsistensi dalam pengiriman data monitoring melalui sistem ROL dan SMSN.
 - d. Kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem monitoring.

5.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan kombinasi antara stasiun tetap, *transportable*, dan stasiun bergerak, sehingga mampu menjaga kontinuitas pengawasan meskipun terdapat gangguan pada sebagian perangkat.

Pemanfaatan sistem pelaporan digital seperti ROL (*Report Online*) dan SMSN juga mendukung efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data monitoring secara berkala.

Efisiensi sebesar **36%**, dengan realisasi Rp49.440.000 dari pagu Rp138.180.000. Efisiensi diperoleh melalui optimalisasi penggunaan infrastruktur stasiun monitor yang sudah tersedia, serta pelaksanaan inspeksi secara terjadwal dan terintegrasi, sehingga mengurangi kebutuhan biaya operasional tambahan.

5.9 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

- a. Optimalisasi operasional stasiun monitoring melalui pemanfaatan stasiun tetap, *transportable*, dan stasiun bergerak secara terpadu.
- b. Pemanfaatan sistem pelaporan digital melalui ROL dan SMSN untuk menjaga kontinuitas data monitoring.
- c. Pelaksanaan pemeliharaan rutin terhadap perangkat monitoring guna menjaga tingkat kesiapan operasional.
- d. Optimalisasi penggunaan stasiun bergerak sebagai dukungan monitoring pada lokasi yang mengalami kendala perangkat

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

- a. Percepatan perbaikan dan penggantian perangkat utama (*All Band Receiver*) pada stasiun yang mengalami kerusakan.
- b. Penguatan sistem pemeliharaan preventif berbasis risiko untuk meminimalisir potensi *downtime* perangkat.
- c. Pengembangan sistem monitoring terintegrasi berbasis digital dan *real-time* untuk meningkatkan keandalan data.
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian dan *troubleshooting* perangkat monitoring.

IK - 1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

6.1 Gambaran Indikator Kinerja

Indikator Persentase Pengenaan Sanksi Denda Administratif digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio melalui penerapan sanksi administratif berupa denda.

Pengenaan sanksi ini merupakan bagian dari upaya pengendalian spektrum frekuensi radio agar digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengguna frekuensi radio serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pengukuran indikator ini didasarkan pada proses penertiban terhadap penggunaan frekuensi ilegal yang ditindaklanjuti dengan penerbitan invoice denda administratif serta monitoring tindak lanjut pembayaran.

6.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, capaian indikator Persentase Pengenaan Sanksi Denda Administratif Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta adalah sebesar 99,09%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Pengenaan Sanksi Denda Administratif	85%	99.09%	123.86%

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengenaan sanksi administratif telah berjalan sangat optimal dan hampir seluruh proses penegakan sanksi dapat ditindaklanjuti dengan baik.

6.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Capaian indikator diperoleh dari hasil kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio, baik melalui Penertiban Nasional (Tibnas) maupun penertiban skala regional UPT, terhadap penggunaan frekuensi dengan status ilegal.

Setiap temuan pelanggaran ditindaklanjuti dengan:

- 1. Penghentian pancaran (*off air*),
- 2. Penerbitan invoice denda administratif,
- 3. Serta monitoring pembayaran melalui sistem pelaporan.

Bobot tindak lanjut diberikan sebagai berikut:

- 1. Reminder 1: 0,9
- 2. Reminder 2: 0,8
- 3. Reminder 3: 0,7
- 4. Pelimpahan ke KPKNL: 0,6

Perhitungan capaian dilakukan dengan memperhitungkan:

- 1. Jumlah invoice aktif (tidak termasuk *expired* dan *canceled*),
- 2. Serta tindak lanjut terhadap invoice yang belum dibayar, seperti pengiriman surat reminder dan proses klarifikasi.

Berdasarkan data tahun 2025:

- 1. Total invoice: 55
- 2. Invoice yang telah tertangani optimal: 50
- 3. Tindak lanjut invoice belum terbayar:
 - A. *Reminder* 2: 1 kasus
 - B. *Reminder* 3: 1 kasus

Manajemen Invoice													
Manajemen Invoice													
No Invoice	No Pelanggaran	Kode Denda	Id Pelanggaran	Nama Pelanggaran	Id Pelanggaran	Risk Tagihan	Risk Penyelesaian	Status Invoice	Tanggal Terbit	Jenis Invoice	Tgl Invoice	Jenis Invoice	Jenis Invoice
2000041	0000014	00000140000000000000	000001400	RAKOR SIMULASI RAKOR	000001400	1000	Rp 6.720.000	Rp 0	Not Paid	20 Desember 2024	20 Desember 2024	Not Paid	Not Paid
2000000	0000000	00000000000000000000	000000000	PT Jaga Media	000000000	2000	Rp 4.800.000	Rp 0	Not Paid	20 Desember 2025	27 Januari 2026	Not Paid	Not Paid
2000001	0000001	00000010000000000000	000000100	MAJU JAYA ADAR	000000100	3074.0070	Rp 5.775.000	Rp 5.775.000	Paid	10 Desember 2025	14 Januari 2026	PAID (ETB)	PAID (ETB)
2000002	0000002	00000020000000000000	000000200	SARITUNAI	000000200	2000	Rp 500.000	Rp 0	Not Paid	10 Desember 2026	11 Januari 2026	Not Paid	Not Paid
2000003	0000003	00000030000000000000	000000300	PT CRO PUSK USRO	000000300	2000	Rp 800.000	Rp 800.000	Paid	10 Desember 2026	11 Januari 2026	Not Paid	Not Paid
2000004	0000004	00000040000000000000	000000400	PT CRO PUSK USRO	000000400	2000	Rp 800.000	Rp 800.000	Paid	10 Desember 2026	11 Januari 2026	Not Paid	Not Paid

Gambar Aplikasi Penanganan Denda

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses penegakan sanksi telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sebagian kecil invoice yang dalam proses tindak lanjut.

6.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

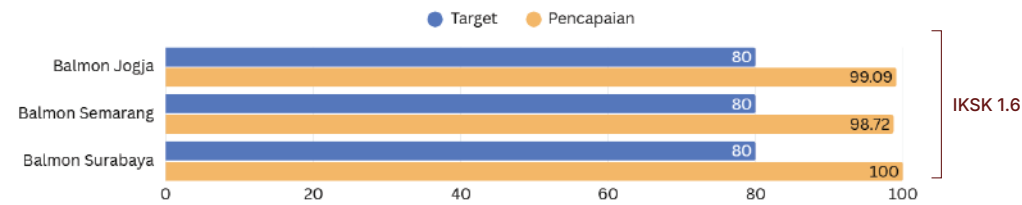
Indikator pengenaan sanksi denda administratif mulai ditetapkan dan diukur dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 oleh Direktorat Infrastruktur Digital. Pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2021 hingga 2024, indikator ini belum termasuk dalam indikator kinerja yang ditetapkan, sehingga tidak tersedia data capaian yang dapat digunakan sebagai pembandingan secara langsung.

Capaian tahun 2025 sebesar 99,09% menunjukkan bahwa pelaksanaan pengenaan sanksi denda administratif telah berjalan dengan baik. Nilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa proses penegakan hukum di bidang spektrum frekuensi radio, termasuk mekanisme pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran, telah dilaksanakan secara cukup efektif sejak indikator ini mulai diterapkan.

6.5 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Secara nasional, indikator pengenaan sanksi denda administratif juga menjadi bagian dari pengukuran kinerja seluruh UPT Balmon.

Dengan capaian sebesar **99,09%**, kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta berada pada kategori sangat tinggi dan sejalan dengan capaian UPT lainnya yang umumnya berada pada kisaran optimal.



Berdasarkan data capaian indikator Penanganan Sanksi Denda Administratif dengan nilai sebesar 99,09% dari target 80,00%. Capaian ini berada pada kategori tinggi dan menunjukkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan penegakan sanksi administratif. Jika dibandingkan dengan UPT lain, capaian Balmon Yogyakarta relatif sebanding, di mana Balmon Semarang mencapai 98,72% dan Balmon Surabaya mencapai 100,00% dengan target yang sama.

Secara komparatif, perbedaan capaian antar UPT tidak signifikan dan seluruhnya berada dalam rentang kinerja optima. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengenaan sanksi administratif telah berjalan efektif dan konsisten di berbagai wilayah. Meskipun demikian, capaian Balmon Surabaya yang mencapai 100% dapat dijadikan sebagai benchmark optimal, sementara capaian Balmon Yogyakarta tetap menunjukkan performa yang baik dan kompetitif.

pada: **Sarasehan Peringatan Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi ke- 80**
r 2025



6.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian indikator penanganan sanksi denda administratif dapat dilihat dari aspek langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

A. Dampak Langsung:

- a. Meningkatnya tingkat kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio terhadap ketentuan perizinan dan penggunaan frekuensi.
- b. Berkurangnya jumlah pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio akibat adanya efek jera dari penerapan sanksi administratif.
- c. Meningkatnya efektivitas proses penegakan hukum di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio.

B. Dampak Tidak Langsung:

- a. Meningkatkan kesadaran pengguna frekuensi radio terhadap kewajiban hukum dan konsekuensi pelanggaran.
- b. Mendukung terciptanya tata kelola spektrum frekuensi radio yang tertib dan berkeadilan.
- c. Memperkuat kredibilitas institusi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang spektrum frekuensi radio.

6.7 Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1. Efektivitas pelaksanaan kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio.
- 2. Sistem monitoring pembayaran denda administratif yang terintegrasi.
- 3. Penerapan mekanisme tindak lanjut (*reminder*) yang sistematis.
- 4. Koordinasi yang baik antara UPT dan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital.

6.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengenaan sanksi dilakukan dengan memanfaatkan sistem pelaporan digital seperti **Report Online (ROL)** dan sistem pengelolaan denda administratif. Penggunaan sistem tersebut memungkinkan proses monitoring invoice dan tindak lanjut dilakukan secara lebih efisien dan transparan tanpa memerlukan proses manual yang kompleks.

Dengan pemanfaatan sistem digital, kegiatan ini mampu menghemat anggaran operasional secara signifikan sehingga tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran. Efisiensi sumber daya pada kegiatan ini tercapai melalui pengurangan kebutuhan penggunaan kertas, biaya pengiriman dokumen, serta optimalisasi sumber daya manusia dalam proses administrasi.

6.9

Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

- a. Pelaksanaan penertiban spektrum frekuensi radio secara konsisten melalui kegiatan penertiban secara nasional dan penertiban regional UPT
- b. Penerapan mekanisme penerbitan invoice denda administratif dan monitoring pembayaran secara sistematis
- c. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap invoice melalui pengiriman reminder secara bertahap
- d. Pemanfaatan sistem pelaporan digital untuk mendukung proses monitoring dan pengendalian denda administratif

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

- a. Peningkatan efektivitas penagihan terhadap invoice yang belum terbayar melalui penguatan mekanisme koordinasi dengan pihak terkait.
- b. Pengembangan sistem monitoring denda administratif berbasis digital yang lebih terintegrasi secara real-time.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan penagihan denda administratif.
- d. Penguatan strategi penertiban yang lebih preventif untuk menekan potensi pelanggaran sejak awal

IK - 1.7

Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

7.1

Gambaran Indikator Kinerja

Indikator ini mengukur ketersediaan data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital, khususnya jaringan bergerak seluler, di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta. Pengukuran dilakukan untuk memastikan infrastruktur digital yang handal dan efisien guna meningkatkan akseptabilitas, kecepatan, dan keamanan layanan digital bagi masyarakat. Lingkup kegiatannya meliputi pelaksanaan pengukuran, analisis data hasil pengukuran, serta pemutakhiran data kualitas layanan. Serta untuk memastikan kualitas layanan jaringan seluler pada wilayah layanan masyarakat dengan cakupan minimal 80% kabupaten/kota di wilayah kerja. Pengukuran dilakukan menggunakan standar internasional ITU melalui *metode static test* dan *drive test*.

7.2

Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator telah tercapai secara optimal:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	125%	125%

Realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Persentase Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan menunjukkan capaian yang sangat optimal. Dengan target sebesar 100%, realisasi yang diperoleh mencapai 125%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 125%.

Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan pengukuran kualitas layanan yang telah memenuhi target utama sebesar 100%, serta adanya kinerja tambahan berupa perluasan cakupan wilayah pengukuran. Kegiatan pengukuran berhasil dilaksanakan di 10 kabupaten/kota, melampaui target minimal yang ditetapkan sebanyak 8 wilayah, atau setara dengan 125% cakupan.

7.3

Analisis Pencapaian Kinerja

Target 100% ditetapkan berdasarkan pengukuran di 80% kabupaten/kota di wilayah kerja, yaitu sebanyak 8 kabupaten/kota. Namun, pada realisasinya, tim berhasil melakukan pengukuran di 10 kabupaten/kota (5 di DIY dan 5 di Jawa Tengah), sehingga perhitungan capaiannya adalah $(10/8) \times 100\% = 125\%$.

- A. Distribusi Kegiatan: Pengukuran dilakukan secara intensif pada bulan Maret (10 kabupaten/kota sekaligus dalam rangka Posko Idul Fitri) dan dilanjutkan secara berkala di kabupaten/kota tertentu dari bulan Juli hingga November 2025.
- B. Metodologi: Validitas data dijaga dengan menggunakan perangkat berstandar ITU dan menggunakan dua metode pengukuran, yaitu *static test* dan *drive test*.

7.4

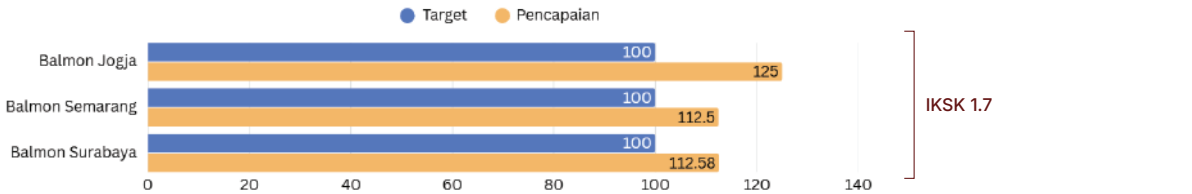
Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Data pembanding tahun 2022- 2024 tidak tersedia, dikarenakan indikator tersebut belum ditetapkan sebagai bagian dari pengukuran kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dan merupakan program kerja baru yang dilimpahkan ke Unit Pelaksana Teknsi. Namun demikian, capaian tahun 2025 yang mencapai 100% pada seluruh indikator menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target kinerja serta peningkatan efektivitas dalam penyelesaian pekerjaan yang bersifat teknis dan administratif. Dengan demikian, capaian pada tahun 2025 menjadi baseline awal dalam pengukuran kinerja untuk indikator dimaksud.

7.5

Perbandingan dengan Nasional / UPT Lain

Indikator Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan tidak secara langsung tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, sehingga perbandingan kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis Balmon lainnya.



Meskipun tidak tersedia data kuantitatif pembanding nasional, pelaksanaan kegiatan telah menggunakan:

- 1. Standar pengukuran berbasis,
- 2. Sistem pelaporan terintegrasi nasional,
- 3. Serta metodologi yang seragam antar UPT.

Perbandingan realisasi kinerja menunjukkan bahwa seluruh UPT pembanding telah mencapai kinerja di atas target, dengan capaian masing-masing Balmon Yogyakarta sebesar 125,00%, Balmon Surabaya sebesar 122,58%, dan Balmon Semarang sebesar 112,50%. Balmon Yogyakarta menempati posisi tertinggi dalam pencapaian indikator ini, yang mencerminkan optimalisasi proses pengumpulan dan pengolahan data kualitas layanan. Secara keseluruhan, ketiga UPT menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target kinerja dengan kategori sangat baik.

7.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian indikator tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan dapat dilihat dari aspek langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

- A. Dampak Langsung:
- a. Tersedianya data kualitas layanan jaringan seluler yang akurat dan terukur sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggara telekomunikasi.

b. Meningkatnya kemampuan dalam mengidentifikasi wilayah dengan kualitas layanan yang belum optimal.

c. Mendukung proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pengendalian dan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi.
- B. Dampak Tidak Langsung:
- a. Mendorong peningkatan kualitas layanan jaringan seluler oleh operator telekomunikasi di wilayah kerja.

b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi yang lebih stabil, cepat, dan andal.

c. Mendukung percepatan transformasi digital melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang berkualitas dan merata.

7.7 Faktor Keberhasilan

- Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target di atas 100% antara lain:
- A. Pemanfaatan Momen Strategis: Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan pada 10 kabupaten/kota sekaligus saat kegiatan Posko Idul Fitri 2025 memastikan data terkumpul secara masif dan menyeluruh di awal tahun.
- B. Standarisasi Alat dan Metode: Penggunaan perangkat yang diakui validitasnya oleh seluruh operator seluler di Indonesia serta penerapan metode *static* dan *drive test* memastikan proses pengambilan data berjalan optimal

7.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

- Efisiensi tercermin dari:
- A. Integrasi sistem pelaporan (PMT) → mempercepat alur data tanpa proses manual
- B. Optimalisasi cakupan wilayah → realisasi 125% dari target minimal
- C. Efektivitas sumber daya → mampu menyelesaikan pekerjaan dengan target besar dalam waktu singkat (TW-4)

Selain itu, penerapan metode pengukuran berbasis sampling dan pemanfaatan data historis turut mengurangi kebutuhan pelaksanaan pengukuran lapangan secara menyeluruh, sehingga menekan biaya operasional seperti perjalanan dinas dan logistik. realisasi anggaran tercatat sebesar Rp28.080.000. Pelaksanaan kegiatan pada indikator ini tidak didukung oleh alokasi pagu anggaran yang secara khusus ditetapkan dalam perencanaan awal. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan anggaran dilakukan melalui penggunaan anggaran perjalanan dinas umum.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan riil dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Meskipun demikian, kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan fleksibilitas penggunaan anggaran yang tersedia, sehingga target kinerja tetap tercapai.

7.9 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

- A. Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan jaringan seluler secara masif pada momen strategis (Posko Idul Fitri) untuk memperoleh data yang komprehensif
- B. Pemanfaatan metode pengukuran berbasis standar ITU melalui *static test* dan *drive test* untuk menjaga validitas data
- C. Integrasi sistem pelaporan hasil pengukuran melalui platform digital guna mempercepat proses pengolahan dan penyajian data
- D. Optimalisasi cakupan wilayah pengukuran hingga melampaui target minimal kabupaten/kota

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

- A. Penguatan perencanaan awal tahun melalui sinkronisasi lebih awal dengan unit pusat terkait target dan tools pengukuran
- B. Pemerataan distribusi kegiatan pengukuran sepanjang tahun untuk menghindari penumpukan pekerjaan di periode tertentu
- C. Pengembangan sistem monitoring berbasis dashboard real-time untuk meningkatkan kontrol dan evaluasi progres kegiatan
- D. Penerapan early warning system untuk mendeteksi secara dini wilayah dengan kualitas layanan yang belum optimal

IK - 1.8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS, IKRAN)

8.1 Gambaran Indikator Kinerja

Indikator **Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)** digunakan untuk mengukur tingkat kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan layanan sertifikasi kompetensi operator radio kepada masyarakat.

Layanan ini mencakup:

- A. Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)
- B. Sertifikasi Maritime Operator (SRC/LRC)
- C. Sertifikasi Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAN)

Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan target layanan, kapasitas penyelenggaraan kegiatan, serta kemampuan UPT dalam merespons kebutuhan masyarakat di bidang sertifikasi operator radio.

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) merupakan salah satu tahapan penting dalam memperoleh Izin Amatir Radio di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi penilaian, pelaksanaan UNAR kini telah menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT). Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan UNAR berbasis CAT sepanjang tahun Tahun 2025.

Tujuan Pelaksanaan Ujian Amatir Radio CAT Pelaksanaan UNAR berbasis CAT bertujuan untuk:

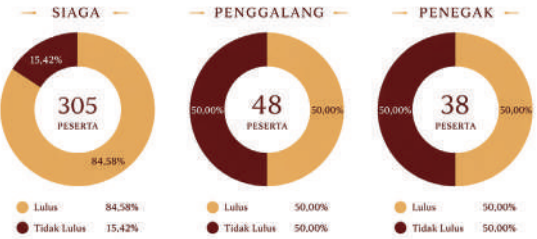
1. Meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam proses ujian.
2. Meminimalisir potensi kesalahan dalam koreksi hasil ujian.
3. Mempercepat pengolahan data dan pengumuman hasil ujian.
4. Memudahkan peserta dalam mengikuti ujian dengan sistem yang lebih modern.
5. Meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan UNAR di berbagai daerah.

1 Jadwal Pelaksanaan

Penentuan jadwal dilaksanakan secara periodik dengan mengacu pada jadwal yang telah disusun dan ditetapkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Yogyakarta peserta Ujian.

2 Peserta Ujian

Sepanjang tahun 2025, jumlah peserta yang mengikuti UNAR berbasis CAT tercatat sebanyak 372 orang.



3 Pelaksanaan Kegiatan

JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
Non-Reguler Tahap I	Mei 2025	Kantor Kelurahan Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta	Menggunakan Bus Pelayanan UNAR
Non-Reguler Tahap II	Desember 2025	Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Kebumen	Menggunakan Bus Pelayanan UNAR
Reguler	Januari – Desember 2025	Kantor Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta (Kalasan)	Dilaksanakan di Kantor Kalasan dengan mekanisme pelayanan langsung sesuai jadwal

4 Proses Ujian

- Peserta melakukan registrasi melalui sistem pendaftaran online.
- Peserta hadir di lokasi ujian dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan.
- Ujian dilaksanakan dengan menggunakan perangkat komputer dan sistem CAT yang telah disediakan.
- Hasil ujian langsung dapat diketahui setelah peserta menyelesaikan semua soal.
- Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat dan diproses lebih lanjut untuk penerbitan izin Amatir Radio.

PELAKSANAAN UNAR 2025 Rekapitulasi Waktu & Ketetapan Kelulusan				
TOTAL PELAKSANAAN		14	URUN REGULER	13
			URUN NON-REG	1
				NR
NO	WAKTU PELAKSANAAN	SURAT KEPUTUSAN (SK)	TGL PENETAPAN	TIPE
01	14 Januari 2025	SK No. 15 Tahun 2025	15 Jan 2025	REGULER
02	11 Februari 2025	SK No. 22 Tahun 2025	12 Feb 2025	REGULER
03	11 Maret 2025	SK No. 23 Tahun 2025	12 Mar 2025	REGULER
04	22 April 2025	SK No. 26 Tahun 2025	23 Apr 2025	REGULER
05	20 Mei 2025	SK No. 29 Tahun 2025	21 Mei 2025	REGULER
06	27 Mei 2025	SK No. 30 Tahun 2025	28 Mei 2025	NON-REGULER
07	17 Juni 2025	SK No. 31 Tahun 2025	18 Jun 2025	REGULER
08	15 Juli 2025	SK No. 38 Tahun 2025	16 Jul 2025	REGULER
09	19 Agustus 2025	SK No. 41 Tahun 2025	20 Aga 2025	REGULER
10	16 September 2025	SK No. 45 Tahun 2025	17 Sep 2025	REGULER
12	14 Oktober 2025	SK No. 52 Tahun 2025	15 Okt 2025	REGULER
15	11 November 2025	SK No. 56 Tahun 2025	12 Nov 2025	REGULER
16	Awal Desember 2025	SK No. 60 Tahun 2025	10 Des 2025	REGULER
17	Pertengahan Des 2025	SK No. 61 Tahun 2025	15 Des 2025	REGULER

Sertifikasi Maritime Operator (SRC/LRC)

Program MOTS – IKRAN dalam konteks peningkatan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban, serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi bertujuan untuk memastikan bahwa nelayan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi maritim dengan optimal, aman, dan sesuai dengan regulasi.

Berikut adalah indikator kinerja maritim nelayan dalam program ini:

1 Monitoring dan Pengukuran Spektrum Frekuensi

- Ketersediaan dan stabilitas sinyal komunikasi maritim (VHF, AIS, dan satelit)
- Akurasi dan keandalan sistem pemantauan frekuensi radio di kapal nelayan
- Kepatuhan terhadap batasan frekuensi yang ditetapkan oleh regulator

2 Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi

- Jumlah kapal nelayan yang telah terverifikasi memiliki izin penggunaan perangkat komunikasi
- Kepatuhan terhadap standar penggunaan perangkat komunikasi maritim (seperti radio VHF dan AIS)
- Penertiban terhadap penggunaan perangkat ilegal yang berpotensi mengganggu komunikasi laut

3 Keamanan dan Keselamatan Komunikasi Maritim

- Efektivitas penggunaan perangkat komunikasi dalam keadaan darurat
- Respons waktu layanan komunikasi dalam situasi kecelakaan atau cuaca ekstrem
- Persentase nelayan yang terlatih dalam penggunaan perangkat komunikasi maritim

4 Pelayanan Publik dalam Spektrum Frekuensi dan Telekomunikasi

- Ketersediaan layanan perizinan dan registrasi perangkat komunikasi maritim
- Kecepatan dan efisiensi pelayanan terkait frekuensi radio untuk nelayan
- Sosialisasi dan edukasi nelayan tentang penggunaan perangkat komunikasi secara legal dan efektif

5 Integrasi Teknologi Telekomunikasi dalam Sektor Maritim

- Pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital dalam operasional perikanan
- Integrasi teknologi telekomunikasi dengan sistem pelaporan hasil tangkapan dan kondisi laut
- Penggunaan aplikasi atau platform digital untuk komunikasi antara nelayan, pelabuhan, dan regulator

Dengan adanya program MOTS – IKRAN, diharapkan bahwa penggunaan spektrum frekuensi dan perangkat telekomunikasi oleh nelayan dapat lebih tertib, aman, dan efektif, sehingga meningkatkan keselamatan pelayaran serta mendukung keberlanjutan sektor maritim.



8.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kegiatan sampai dengan Desember 2025, capaian indikator adalah sebesar **216,6%**.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	216.66%	216.66%

Berdasarkan realisasi kegiatan sampai dengan Desember 2025, capaian indikator Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) mencapai sebesar 216,66% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat optimal dalam mendukung peningkatan kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan layanan telekomunikasi.

Realisasi capaian ini didukung oleh pelaksanaan 14 kegiatan UNAR dari target 6 kegiatan, serta 2 kegiatan Sertifikasi SRC/LRC/IKRAN dari target 1 kegiatan. Dengan demikian, jumlah layanan sertifikasi yang diselenggarakan secara signifikan melampaui target yang telah direncanakan.

8.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Perhitungan capaian menggunakan formula:

% Capaian

=

$$\frac{\left(\left(\frac{14}{6}\right) + \left(\frac{2}{1}\right)\right)}{2} \times 100\%$$

=

216,6%

Capaian sebesar 216,6% menunjukkan bahwa kinerja UPT dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio berada jauh di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa:

- Volume layanan meningkat signifikan, yang mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sertifikasi operator radio.
- Kemampuan adaptif dan responsif UPT, dalam mengakomodasi permintaan layanan secara fleksibel di luar perencanaan awal.
- Efektivitas pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, koordinasi, maupun pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan sertifikasi operator radio pada tahun 2025 tidak hanya memenuhi target, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio serta peningkatan kualitas layanan telekomunikasi.

8.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Secara umum, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dari sisi jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

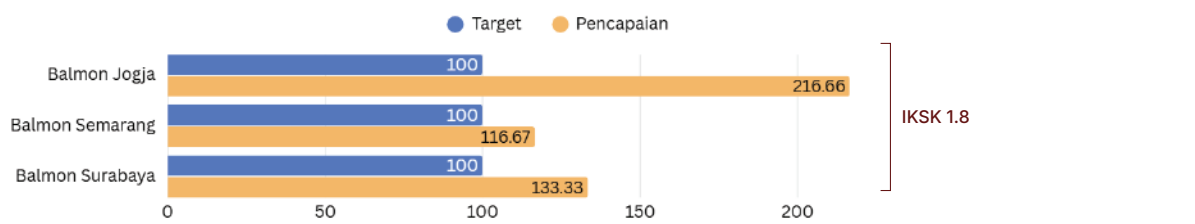
Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2021	1. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	100%	100%
2022	1. Pelayanan Publik Terkait Konsultasi Penggunaan SFR, UNAR, Pendampingan Penyelesaian Piutang dan Maritim Nelayan	100%	100%	100%
2023	1. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	203.33%	203.33%
2024	1. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	222.73%	222.73%
2025	1. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOPTS-IKRAN)	100%	216.66%	216.66%

Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren yang tetap tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada periode 2021–2022, capaian kinerja berada pada angka 100% yang mencerminkan kesesuaian antara target dan realisasi. Memasuki tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan signifikan dengan capaian masing-masing sebesar 203,33% dan 222,73%, yang menunjukkan adanya peningkatan volume layanan serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan UNAR berbasis CAT.

Pada tahun 2025, capaian kinerja tercatat sebesar 216,66%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 namun tetap jauh melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan Sertifikasi Radio Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) tetap berada pada tingkat optimal. Meskipun terdapat perubahan indikator kinerja, realisasi tersebut tetap mencerminkan kemampuan unit kerja dalam mempertahankan kualitas layanan serta mengakomodasi kebutuhan layanan secara konsisten.

8.5 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Indikator pemeriksaan stasiun radio tidak secara langsung tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam **RPJMN 2025–2029**, sehingga perbandingan kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis Balmon lainnya.



Berdasarkan data yang tersedia, seluruh UPT memiliki target yang sama sebesar 100%, namun realisasi capaian menunjukkan variasi yang cukup signifikan, yaitu Balmon Yogyakarta sebesar 216,66%, Balmon Surabaya sebesar 133,33%, dan Balmon Semarang sebesar 116,67%.

Capaian Balmon Yogyakarta yang mencapai 216,66% menunjukkan kinerja yang paling tinggi dibandingkan UPT lainnya. Selisih capaian ini mengindikasikan bahwa volume penyelenggaraan penyelenggaraan layanan Sertifikasi Radio Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah lebih besar, serta didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang lebih intensif, baik melalui skema reguler maupun non-reguler. Sementara itu, capaian Balmon Surabaya dan Semarang yang juga melampaui target menunjukkan bahwa secara umum terdapat tren peningkatan kinerja di tingkat UPT, meskipun dengan tingkat optimalisasi yang berbeda.

Secara keseluruhan, hasil benchmarking ini menunjukkan bahwa Balmon Yogyakarta memiliki tingkat produktivitas layanan yang relatif lebih tinggi, didukung oleh kemampuan dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih luas serta pengelolaan operasional kegiatan yang efektif. Namun demikian, perbedaan capaian antar UPT juga dapat dipengaruhi oleh faktor cakupan wilayah layanan, jumlah permintaan layanan, serta strategi pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah kerja.

8.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian indikator Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) dapat dilihat sebagai berikut:

A. Dampak Langsung:

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki sertifikasi kompetensi operator radio secara resmi dan legal.
2. Terpenuhinya kebutuhan layanan sertifikasi operator radio secara lebih luas dan cepat.
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan ujian melalui penerapan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang lebih transparan dan objektif.

B. Dampak Tidak Langsung:

1. Meningkatnya kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio di masyarakat.
2. Mendukung keselamatan komunikasi, khususnya pada sektor maritim melalui program MOTS-IKRAN.
3. Mendorong pemanfaatan teknologi komunikasi secara legal, efektif, dan efisien oleh masyarakat.

8.7 Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh:

1. Tingginya minat masyarakat terhadap sertifikasi operator radio
2. Perencanaan kegiatan yang adaptif dan fleksibel
3. Kesiapan SDM dan sarana prasarana
4. Dukungan sistem layanan berbasis digital
5. Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait

8.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, ditandai dengan:

1. Peningkatan jumlah kegiatan tanpa peningkatan sumber daya yang signifikan;
2. Optimalisasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan;
3. Pemanfaatan sistem digital untuk pendaftaran dan pelaporan.

Efisiensi ini memungkinkan peningkatan output layanan tanpa meningkatkan beban biaya secara proporsional. Selain itu, efisiensi anggaran juga dicapai melalui pengurangan biaya administrasi, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia, serta pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi pada lokasi dan waktu yang sama.

Efisiensi anggaran pada kegiatan ini tercapai sebesar 52%, dengan realisasi sebesar Rp70.274.200 dari total pagu anggaran Rp133.978.000. Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan mampu dilakukan secara efisien tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Efisiensi ini dicapai melalui strategi integrasi pelaksanaan beberapa kegiatan sertifikasi, yaitu UNAR, MOTS - IKRAN, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan dapat dilakukan secara terpadu. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya juga menjadi faktor pendukung, baik dari sisi penggunaan perangkat, sumber daya manusia, maupun dukungan operasional lainnya, sehingga kebutuhan anggaran dapat ditekan secara signifikan tanpa menghambat pencapaian target kinerja.

8.9 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

1. Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi secara lebih intensif untuk menjawab tingginya permintaan masyarakat
2. Penerapan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dalam pelaksanaan UNAR guna meningkatkan transparansi dan efisiensi
3. Optimalisasi pemanfaatan sistem digital dalam proses pendaftaran, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
4. Penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti ORARI dan instansi maritim dalam pelaksanaan kegiatan

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

1. Penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan berbasis kebutuhan aktual masyarakat
2. Peningkatan kualitas layanan sertifikasi dengan memperkuat aspek pembinaan peserta sebelum ujian
3. Penguatan digitalisasi layanan secara *end-to-end* untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data.

IK - 1.9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

9.1 Gambaran Indikator Kinerja

Indikator Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta dalam melaksanakan penanganan piutang negara yang bersumber dari kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio oleh pemegang izin.

Secara teknis, indikator ini mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola seluruh proses penanganan piutang, mulai dari identifikasi dan verifikasi data, pemantauan jatuh tempo, hingga pelaksanaan penagihan dan koordinasi penyelesaian dengan pihak terkait. Kegiatan tersebut mencakup langkah administratif seperti penyampaian surat penagihan, klarifikasi kepada wajib bayar, serta tindak lanjut lainnya untuk mendorong penyelesaian kewajiban.

Pengukuran indikator ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Kuantitatif

Menggunakan formula:

=
$$\frac{\text{Jumlah Piutang yang Dihubungi}}{\text{Jumlah Target Piutang}} \times 100\%$$

Pendekatan ini menilai sejauh mana upaya aktif dilakukan dalam menghubungi wajib bayar sebagai bagian dari proses penagihan.

2. Pendekatan Kualitatif

Penilaian capaian sebesar 100% diberikan apabila terdapat kegiatan koordinasi penanganan piutang minimal **1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan**, yang meliputi:

1. Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
2. Pengumpulan dan verifikasi dokumen penghapusan mutlak
3. Pengusulan Piutang Negara Tidak Tertagih (PPNTO)

Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mengukur capaian administratif, tetapi juga mencerminkan upaya strategis dan koordinatif dalam pengelolaan piutang negara secara komprehensif.

9.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kegiatan sampai dengan Desember 2025, capaian indikator adalah sebesar 216,6%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%

Indikator Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio pada tahun 2025 menunjukkan hasil optimal, dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan realisasi tersebut, target sebesar 100% dapat terpenuhi dengan realisasi 100% dan persentase kinerja sebesar 100%. Pada bulan Desember 2025, target penanganan piutang ditetapkan sebanyak 60 wajib bayar dan seluruhnya berhasil dihubungi, sehingga perhitungannya adalah $(60/60) \times 100\% = 100\%$.

Secara teknis, hasil ini mencerminkan kelancaran proses penanganan mulai dari identifikasi, verifikasi, hingga penagihan dan penyelesaian kewajiban. Selain itu, kegiatan koordinasi penanganan piutang juga telah dilaksanakan secara triwulanan sesuai ketentuan, sehingga indikator terpenuhi tidak hanya dari sisi kuantitatif, tetapi juga aspek kualitatif, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kepatuhan pengguna frekuensi radio serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

9.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Capaian sebesar **100%** menunjukkan bahwa seluruh target penanganan piutang BHP Frekuensi Radio pada tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Secara lebih mendalam, capaian ini mencerminkan bahwa:

- Seluruh wajib bayar yang menjadi target telah berhasil dihubungi tanpa adanya sisa atau backlog penanganan
- Mekanisme penagihan berjalan secara aktif, sistematis, dan terjadwal
- Kegiatan koordinasi lintas instansi berjalan efektif dan mendukung percepatan penyelesaian piutang
- Tidak terdapat deviasi antara target dan realisasi, yang menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan kinerja

Selain itu, keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan piutang telah dilakukan dengan prinsip:

- Akuntabilitas
- Transparansi
- Kepatuhan terhadap regulasi

9.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Secara umum, capaian tahun 2025 menunjukkan capaian target yang sama dengan tahun sebelumnya :

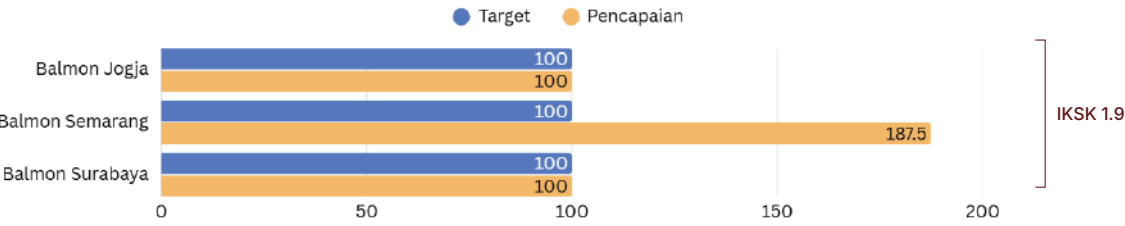
Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2021	1. Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
2022	1. Pelayanan publik terkait Konsultasi penggunaan SFR, UNAR, Pendampingan Penyelesaian Piutang dan Maritim Nelayan	100%	100%	100%
2023	1. Persentase Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%
2024	1. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%
2025	1. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%

Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan tingkat konsistensi yang baik apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data periode 2021 hingga 2025, seluruh indikator kinerja selalu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan realisasi yang juga mencapai 100%.

Terdapat penyesuaian dan perubahan redaksi indikator dari tahun ke tahun mulai dari fokus pada pencegahan dan penanganan piutang, pelayanan publik, hingga penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL hal itu merupakan substansi kinerja yang diukur tetap berada dalam lingkup pengelolaan dan penyelesaian kewajiban BHP Frekuensi Radio. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan fungsi serta stabilitas dalam pelaksanaan tugas.

9.5 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Indikator pemeriksaan stasiun radio tidak secara langsung tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam **RPJMN 2025–2029**, sehingga perbandingan kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis Balmon lainnya.



Berdasarkan data perbandingan, capaian kinerja menunjukkan bahwa:

- Balmon Yogyakarta mencapai target sebesar 100% dengan realisasi 100%,
- Balmon Surabaya juga mencapai target 100% dengan realisasi 100%,
- Sementara Balmon Semarang mencatat capaian sebesar 187,50% dari target yang ditetapkan.

Capaian Balmon Yogyakarta yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh target penanganan piutang telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam proses penagihan, koordinasi pelimpahan, serta pengendalian piutang yang dilakukan secara konsisten dan teratur.

Jika dibandingkan dengan Balmon Semarang yang melampaui target, perbedaan tersebut mengindikasikan adanya percepatan atau intensifikasi dalam penyelesaian piutang, baik melalui peningkatan jumlah wajib bayar yang berhasil ditangani maupun optimalisasi langkah-langkah penagihan. Capaian di atas 100% pada indikator ini umumnya menunjukkan adanya kinerja tambahan di luar target yang telah ditetapkan.

9.6 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dampak dari pencapaian indikator Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio dapat dilihat dari aspek langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

- a. Dampak Langsung:
 - 1. Tercapainya penanganan seluruh piutang sesuai target, sehingga tidak terdapat backlog dalam proses penagihan.
 - 2. Meningkatnya efektivitas proses penagihan melalui komunikasi aktif kepada seluruh wajib bayar.
 - 3. Terlaksananya koordinasi yang optimal dengan instansi terkait dalam penyelesaian piutang negara.
- b. Dampak Tidak Langsung:
 - 1. Meningkatnya kepatuhan pengguna frekuensi radio terhadap kewajiban pembayaran BHP.
 - 2. Mendukung optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor spektrum frekuensi radio.
 - 3. Meningkatkan kepercayaan terhadap tata kelola pengelolaan piutang yang transparan dan akuntabel.

9.7 Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- 1. Pendekatan proaktif dalam penagihan
Petugas secara aktif menghubungi wajib bayar sesuai target yang telah ditetapkan
- 2. Koordinasi yang efektif dengan instansi terkait
Termasuk KPKNL dalam proses penyelesaian piutang dan penghapusan
- 3. Kelengkapan dan validitas data piutang
Data yang akurat mempermudah proses monitoring dan penanganan
- 4. Kepatuhan pengguna frekuensi radio
Tingkat kesadaran wajib bayar yang cukup tinggi terhadap kewajiban pembayaran

9.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan penanganan piutang menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi, ditandai dengan tercapainya target 100% tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan, adanya optimalisasi penggunaan data dan sistem administrasi yang tersedia serta pelaksanaan koordinasi yang terintegrasi dalam siklus kerja rutin. Efisiensi anggaran sebesar **43%** dengan realisasi Rp33.080.000 dari pagu Rp76.470.000. Efisiensi ini diperoleh melalui pemanfaatan sistem digital dalam proses penagihan dan koordinasi, yang mengurangi kebutuhan perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya.



9.9 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

- 1. Pelaksanaan penagihan secara proaktif melalui komunikasi langsung kepada wajib bayar sesuai target yang ditetapkan
- 2. Penguatan koordinasi dengan KPKNL dalam rangka percepatan penyelesaian piutang dan proses penghapusan
- 3. Pemanfaatan data piutang yang lebih akurat dan terintegrasi untuk mendukung proses monitoring dan penanganan
- 4. Pelaksanaan kegiatan penanganan piutang secara rutin dan terjadwal dalam siklus kerja triwulanan

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

- 1. Pengembangan sistem monitoring berbasis *early warning system* untuk mendeteksi potensi keterlambatan pembayaran.
- 2. Peningkatan kualitas dan pemutakhiran basis data piutang secara berkala
- 3. Optimalisasi edukasi dan sosialisasi kepada pengguna frekuensi radio terkait kewajiban pembayaran BHP.
- 4. Penguatan koordinasi lintas instansi dalam percepatan penyelesaian piutang macet dan pengusulan PPNT0.

IK - 10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

10.1 Gambaran Indikator Kinerja

Indikator ini bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh kepada masyarakat mengenai jenis layanan yang tersedia di Balmon Yogyakarta, prosedur yang harus diikuti, serta hak dan kewajiban sebagai pengguna layanan. Sosialisasi ini penting untuk memastikan kualitas layanan publik terus meningkat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Target kinerja untuk indikator ini ditetapkan sebesar **100%**.

10.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%

Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2025, indikator *Persentase* Sosialisasi Pelayanan Publik menunjukkan hasil yang optimal, dengan rincian target sebesar 100%, realisasi 100%, dan capaian kinerja 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh kegiatan sosialisasi yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara penuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta telah berjalan secara konsisten dan terencana, baik dari sisi jumlah kegiatan maupun cakupan materi yang disampaikan kepada masyarakat. Seluruh program sosialisasi yang dirancang untuk memberikan pemahaman terkait jenis layanan, prosedur, serta hak dan kewajiban pengguna layanan telah terealisasi tanpa kendala yang signifikan.

Dari sisi kinerja, pencapaian 100% ini menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, yang mengindikasikan bahwa proses pengelolaan kegiatan telah dilakukan secara efektif. Selain itu, keberhasilan ini juga menggambarkan adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan serta dukungan sumber daya yang memadai.

10.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 di Kantor Kalasan Taman Martani Kalasan Tegalrejo, Tegal Rejo, Tamanmartani, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571. Peserta sosialisasi adalah pengguna sepektrum frekuensi radio atau stakeholder, mitra kerja dan seluruh pegawai Balmon Yogyakarta dengan jumlah peserta sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) peserta. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Tim Pengembangan Jogja *Smart Province* dan Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini mengusung tema *“Roadmap Infrastruktur Digital Menuju Indonesia 2045”* dan telah memenuhi kriteria pelaksanaan kegiatan, yaitu dilaksanakan secara luring (offline) dengan jumlah peserta yang melampaui batas minimal 30 peserta. Berdasarkan ketentuan penilaian, pemenuhan Poin 1 (Rencana dan Persiapan) memberikan nilai sebesar 50%, dan apabila dilanjutkan dengan pemenuhan Poin 2 (Pelaksanaan), maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada bulan September 2025, kegiatan sosialisasi telah terlaksana sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah peserta yang signifikan, sehingga seluruh kriteria pelaksanaan dinyatakan terpenuhi.

Secara kronologis, tahapan kegiatan dimulai pada periode Maret hingga Agustus 2025 yang mencakup proses perencanaan dan persiapan (Poin 1). Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan sosialisasi (Poin 2) dilaksanakan pada bulan September 2025. Adapun pada periode Oktober hingga Desember 2025 dilakukan tindak lanjut atas hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan. Dengan terpenuhinya Poin 1 dan Poin 2 pada bulan September 2025, maka capaian kinerja indikator hingga akhir tahun 2025 dinyatakan mencapai 100%.

10.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tren kinerja sosialisasi pelayanan publik menunjukkan stabilitas yang sangat baik dari tahun ke tahun:

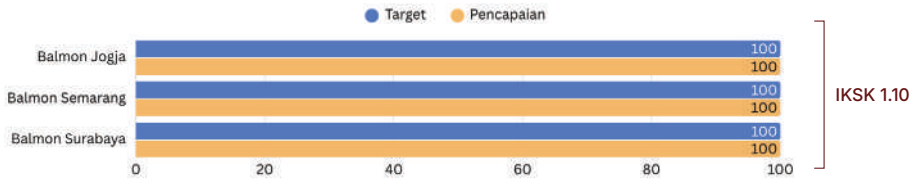
Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2021	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	80%	100%	125%
2022	-	-	-	-
2023	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
2024	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
2025	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%

Berdasarkan data yang tersedia, capaian indikator pada Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar **100%**, yang berarti seluruh target kinerja telah tercapai secara optimal. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perlu diperhatikan ketersediaan data pembanding. Dalam hal data tahun sebelumnya belum tersedia atau indikator ini merupakan indikator yang relatif baru, maka perbandingan secara kuantitatif belum dapat dilakukan secara langsung.

Meskipun demikian, capaian Tahun 2025 yang mencapai 100% dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya kesiapan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta dukungan sumber daya yang memadai sehingga target dapat terpenuhi secara penuh.

10.5 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Indikator pemeriksaan stasiun radio tidak secara langsung tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, sehingga perbandingan kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis Balmon lainnya.



Dalam hal ini, Balmon Yogyakarta dibandingkan dengan Balmon Semarang dan Balmon Surabaya sebagai unit yang memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang sejenis.

Berdasarkan data yang tersedia, seluruh UPT menunjukkan capaian yang sama, yaitu target sebesar 100% dengan realisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik di ketiga UPT telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Tidak terdapat kesenjangan kinerja (*performance gap*) antar unit, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja berada pada level yang setara (*equal performance*).

10.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian indikator Sosialisasi Pelayanan Publik dapat dilihat dari aspek langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

a. Dampak Langsung:

- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap jenis layanan, prosedur, serta persyaratan yang berlaku di Balmon Yogyakarta.
- Meningkatnya akses informasi layanan publik yang lebih transparan dan mudah dipahami.
- Terpenuhinya target penyelenggaraan sosialisasi dengan jumlah peserta yang melampaui standar minimal.

b. Dampak Tidak Langsung:

- Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- Berkurangnya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses pengajuan layanan akibat kurangnya informasi.
- Mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Balmon Yogyakarta sebagai penyedia layanan.

10.7 Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target didorong oleh beberapa faktor inovatif dan internal:

- Inovasi Digital:** Penggunaan platform digital interaktif, kampanye media sosial, serta pelaksanaan *live streaming* dan webinar untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
- Partisipasi Masyarakat:** Tingginya minat masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, terbukti dari jumlah peserta yang mencapai 174 orang dari target minimal 30 orang.

10.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Secara umum, pelaksanaan sosialisasi menunjukkan peningkatan efisiensi baik dari segi biaya, waktu, maupun sumber daya manusia. Penggunaan metode digital dan strategi inovatif memungkinkan dampak yang lebih luas dengan sumber daya yang lebih optimal dibandingkan metode konvensional.

Efisiensi anggaran mencapai **26%**, dengan realisasi Rp82.291.400 dari pagu Rp322.656.000. Tingkat efisiensi yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi telah beralih ke pendekatan yang lebih hemat biaya, seperti pemanfaatan media digital dan kolaborasi kegiatan.

10.9 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

- 1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara terencana mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan dan tindak lanjut
- 2. Pemanfaatan platform digital dan media sosial dalam mendukung penyebaran informasi layanan publik
- 3. Peningkatan kualitas materi sosialisasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat
- 4. Pelaksanaan kegiatan dengan jumlah peserta yang melampaui target minimal sebagai upaya perluasan jangkauan layanan

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

- 1. Pengembangan sistem layanan informasi berbasis digital seperti chatbot untuk meningkatkan kecepatan respons kepada masyarakat
- 2. Pelaksanaan evaluasi berkala berbasis umpan balik masyarakat dan hasil survei kepuasan layanan
- 3. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyampaian informasi publik melalui pelatihan komunikasi dan pelayanan prima
- 4. Perluasan metode sosialisasi melalui kombinasi kegiatan offline dan online untuk menjangkau lebih banyak segmen masyarakat

IK - 11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/PPK)

11.1 Gambaran Indikator Kinerja

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur minimal yang harus ada dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Berikut adalah rincian mendalam mengenai masing-masing unsur:

1. Persyaratan

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

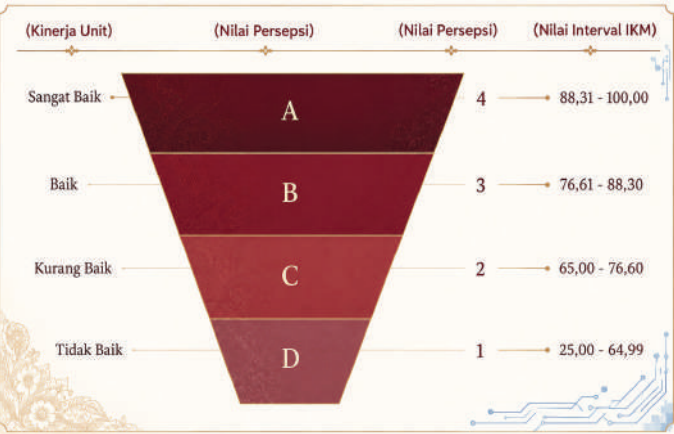
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan

6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana

8. Sarana dan prasarana

9. Penanganan pengaduan



Survei dilaksanakan secara berkala setiap triwulan menggunakan kuesioner elektronik. Dalam pelaksanaan survey, setiap unsur di atas diberi nilai (bobot) dari angka **1 (Sangat Tidak Puas)** hingga **4 (Sangat Puas)**. Hasil akhir akan dikonversi menjadi **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dengan skala 0-100.

Laporan ini disusun sebagai referensi standar operasional prosedur pelayanan publik.

11.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja tahun 2025 sebesar 122,80% dari target 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) / Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) selama Tahun 2025, diperoleh nilai per triwulan sebagai berikut:

- 1. Triwulan I: **3,89**
- 2. Triwulan II: **3,97**
- 3. Triwulan III: **3,96**
- 4. Triwulan IV: **3,93**

Secara umum, nilai IKM/IPKP pada seluruh triwulan berada pada rentang **3,89–3,97**, yang termasuk dalam kategori “**sangat baik**”. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pengguna layanan.



Dari sisi tren, terdapat **peningkatan nilai pada Triwulan II**, yang kemudian relatif stabil pada Triwulan III dan sedikit menurun pada Triwulan IV. Meskipun terjadi fluktuasi kecil, nilai yang diperoleh tetap konsisten berada dalam kategori sangat baik, sehingga mencerminkan **kinerja pelayanan yang terjaga secara berkelanjutan**.

Adapun capaian kinerja tahunan menunjukkan realisasi sebesar **122,80% dari target 100%**, yang berarti indikator ini **melampaui target yang telah ditetapkan**. Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan prosedur, maupun sikap petugas, telah berjalan secara optimal.

11.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja Survei IKM/IPKP Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai pada setiap triwulan berada pada kisaran **3,89–3,97**, sehingga seluruh periode berada dalam kategori “**sangat baik**”. Nilai tertinggi terjadi pada Triwulan II, kemudian relatif stabil hingga akhir tahun dengan sedikit penurunan pada Triwulan IV. Fluktuasi tersebut masih dalam batas wajar dan tidak memengaruhi kualitas layanan secara keseluruhan.

Realisasi capaian tahunan sebesar **122,80% dari target 100%** menunjukkan bahwa kinerja pelayanan tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa proses layanan telah berjalan dengan baik dan konsisten, didukung oleh kesiapan SDM, sarana prasarana, serta perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna layanan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan kualitas layanan yang terjaga dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, konsistensi perlu tetap diperhatikan, terutama dalam menjaga stabilitas nilai di tengah potensi peningkatan ekspektasi masyarakat dan beban layanan ke depan.

11.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Data kuantitatif tahun sebelumnya masih menjadi satu dengan kegiatan sosialisasi dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2021	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	80%	100%	125%
2022	-	-	-	-
2023	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
2024	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
2025	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	122,8%	122,8%

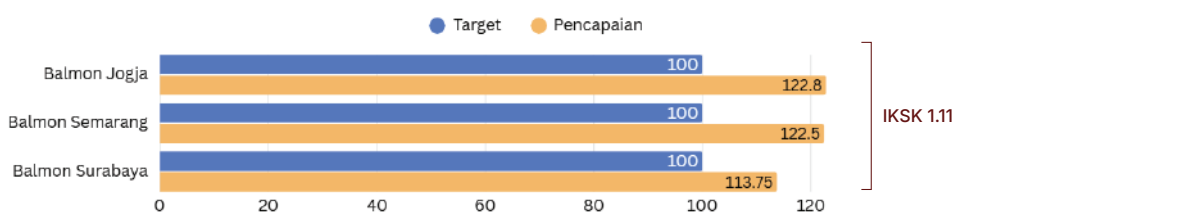
Berdasarkan data tahun 2021 sampai dengan 2025, terlihat bahwa indikator kinerja mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2021, indikator masih berfokus pada pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik dengan capaian 125% dari target.

Pada tahun 2023 dan 2024, indikator mencakup sosialisasi pelayanan publik sekaligus survei kepuasan masyarakat, dengan capaian masing-masing sebesar 100% atau sesuai target yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada tahun 2025 indikator menjadi lebih spesifik, yaitu pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP). Pada tahun ini, capaian mencapai 122,80%, yang berarti melebihi target yang telah ditetapkan.

11.5 Perbandingan dengan Nasional / UPT Lain

Indikator pemeriksaan stasiun radio tidak secara langsung tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam **RPJMN 2025–2029**, sehingga perbandingan kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis Balmon lainnya.



Berdasarkan data yang tersedia, seluruh UPT yang dibandingkan memiliki target yang sama yaitu 100%. Dari sisi capaian, Balmon Yogyakarta memperoleh nilai 122,80%, lebih tinggi dibandingkan Balmon Semarang sebesar 122,50% dan Balmon Surabaya sebesar 113,75%.

Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa secara relatif, kinerja Balmon Yogyakarta berada pada posisi tertinggi di antara UPT yang dibandingkan. Selisih capaian dengan Balmon Semarang relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa kedua UPT memiliki tingkat kinerja yang hampir setara dan sama-sama optimal. Sementara itu, capaian Balmon Surabaya juga telah melampaui target, namun berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dua UPT lainnya.

11.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian indikator Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dapat dilihat sebagai berikut:

A. Dampak Langsung:

- 1. Tersedianya data tingkat kepuasan masyarakat secara terukur dan berkala sebagai dasar evaluasi pelayanan publik.
- 2. Meningkatnya kualitas layanan publik yang ditunjukkan dengan nilai IKM pada kategori Sangat Baik.
- 3. Teridentifikasinya unsur pelayanan yang menjadi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.

B. Dampak Tidak Langsung:

- 1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Balmon Yogyakarta.
- 2. Mendorong terciptanya budaya pelayanan prima di lingkungan organisasi.
- 3. Mendukung perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) berbasis data dan umpan balik masyarakat.

11.7 Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1. Kompetensi SDM yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 2. Penerapan budaya pelayanan prima (5S: Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
- 3. Digitalisasi pelaksanaan survei melalui kuesioner elektronik
- 4. Transparansi dalam biaya, prosedur, dan standar layanan

11.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Efisiensi pelaksanaan kegiatan tercermin dari:

- 1. Penggunaan sistem survei elektronik yang mengurangi biaya operasional dan penggunaan kertas
- 2. Percepatan proses pengumpulan dan pengolahan data hasil survei
- 3. Optimalisasi sumber daya manusia tanpa penambahan beban kerja yang signifikan

Efisiensi ini memungkinkan pelaksanaan survei secara berkala dengan hasil yang cepat, akurat, dan tetap menjaga kualitas data yang dihasilkan. Pada IKS 1.11 Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP), tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran, sehingga tidak dilakukan analisis efisiensi.

11.9 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

- 1. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala setiap triwulan menggunakan sistem elektronik
- 2. Pemanfaatan hasil survei sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas pelayanan
- 3. Peningkatan transparansi layanan melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

- 1. Penambahan dan peningkatan perangkat pendukung pelaksanaan survei untuk menjangkau lebih banyak responden
- 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik guna meningkatkan kenyamanan pengguna layanan
- 3. Optimalisasi kualitas pelayanan berbasis hasil analisis survei dan umpan balik masyarakat
- 4. Pengembangan dashboard monitoring kepuasan masyarakat secara real-time sebagai alat pengambilan keputusan

IK - 12

Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

12.1 Gambaran Indikator Kinerja

Indikator Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) digunakan untuk mengukur tingkat integritas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta berdasarkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan.

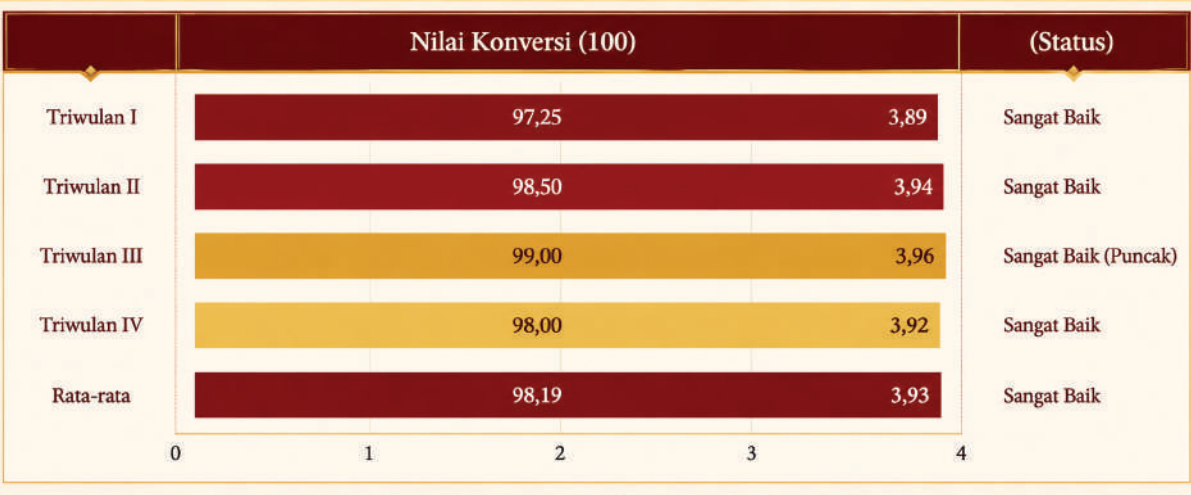
Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei kepada pengguna layanan yang dilaksanakan secara triwulanan dengan memanfaatkan sistem elektronik. Hasil survei mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Penilaian dalam survei ini mencakup lima unsur utama, yaitu:

- 1. Tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan;
- 2. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 3. Tidak adanya praktik gratifikasi dalam proses pelayanan;
- 4. Tidak adanya pungutan liar (pungli); dan
- 5. Tidak adanya praktik percaloan.

12.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Secara umum, nilai IIPP/IPAK sepanjang tahun menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten tinggi. Hal ini tercermin dari rata-rata nilai skala sebesar **3,93** dengan nilai konversi **98,19**, yang seluruhnya berada dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian ini mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas pelayanan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta berada pada tingkat yang sangat positif.



- 1. Trend Naik (TW I ke TW III): Terjadi peningkatan berkelanjutan dari 3,89 ke 3,96. Hal ini menunjukkan efektivitas implementasi pengawasan yang semakin matang seiring berjalannya tahun anggaran.
- 2. Titik Tertinggi: TW III mencapai angka hampir sempurna (99,00), yang biasanya berkorelasi dengan puncak aktivitas program kerja.
- 3. Evaluasi TW IV: Meskipun mengalami penurunan tipis dari TW III (dari 3,96 ke 3,92), nilai 98,00 masih jauh di atas standar rata-rata dan menunjukkan konsistensi dalam penyelesaian program di akhir tahun.

Capaian kinerja sebesar 108,90% selaras dengan nilai IIPP yang rata-ratanya berada di angka 98,19. Hal ini mengindikasikan bahwa:

- 1. Kualitas Pengawasan Mendukung Kinerja: Nilai IIPP yang tinggi menunjukkan fungsi pengawasan berjalan optimal, sehingga membantu meminimalisir hambatan dalam pencapaian target kinerja utama.
- 2. Efisiensi Kerja: Melampaui target (di atas 100%) menunjukkan adanya efisiensi atau inovasi dalam proses kerja yang didukung oleh kepatuhan terhadap standar pengawasan.

Pencapaian tahun 2025 adalah prestasi yang luar biasa. Untuk mempertahankan atau meningkatkan performa ini di tahun depan, disarankan untuk:

- 1. Melakukan audit internal pada TW III guna mengidentifikasi *best practice* yang menyebabkan nilai IIPP mencapai puncaknya di periode tersebut.
- 2. Menganalisis penyebab penurunan tipis di TW IV untuk memastikan tidak ada kelelahan operasional (*burnout*) atau penumpukan administrasi di akhir tahun.
- 3. Mempertahankan sistem monitoring yang sudah ada karena terbukti mampu mendorong capaian kinerja hingga melampaui 100%.

12.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Secara umum, nilai IIPP/IPAK sepanjang tahun menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten tinggi, dengan rata-rata nilai skala sebesar **3,93** dan nilai konversi **98,19** (kategori **Sangat Baik**). Capaian sebesar **108,90%** menunjukkan bahwa pelaksanaan survei berjalan optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai indeks yang mendekati angka 4 juga mencerminkan bahwa tingkat integritas pelayanan berada pada kategori sangat tinggi.

Berdasarkan periode triwulanan, capaian pada **Triwulan I** sebesar 3,89 (97,25) menjadi baseline yang sudah sangat baik, kemudian meningkat pada **Triwulan II** dan mencapai puncaknya pada **Triwulan III** dengan nilai 3,96 (99,00). Pada **Triwulan IV** terjadi sedikit penurunan menjadi 3,92 (98,00), namun tetap berada dalam kategori **Sangat Baik**. Pola ini menunjukkan tren yang relatif stabil dengan peningkatan hingga pertengahan tahun dan sedikit penyesuaian di akhir tahun tanpa mempengaruhi kinerja secara keseluruhan.

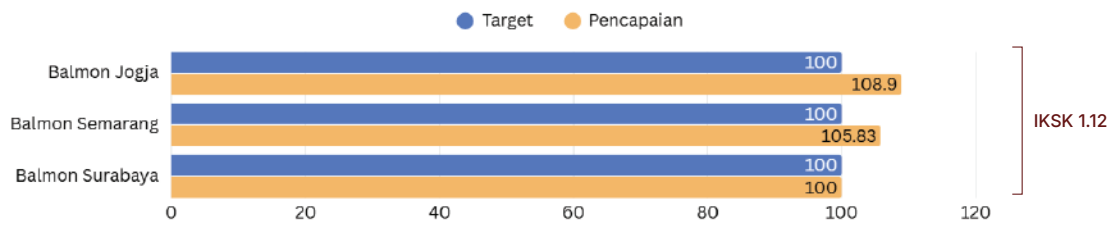
Secara substantif, capaian ini mengindikasikan tidak adanya praktik pungutan liar, diskriminasi, maupun percaloan dalam pelayanan. Stabilitas nilai juga mencerminkan konsistensi budaya kerja berintegritas di lingkungan kerja. Dengan demikian, kinerja indikator ini tidak hanya menunjukkan kualitas pelayanan yang prima, tetapi juga mendukung implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.

12.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan, mengingat indikator Persentase Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Dengan demikian, data capaian tahun berjalan menjadi baseline awal yang akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran dan evaluasi kinerja pada periode selanjutnya.

12.5 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Indikator pemeriksaan stasiun radio tidak secara langsung tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam **RPJMN 2025–2029**, sehingga perbandingan kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis Balmon lainnya.



Balmon Yogyakarta menunjukkan capaian tertinggi dengan realisasi sebesar 108,90%, diikuti oleh Balmon Semarang sebesar 105,83%, dan Balmon Surabaya sebesar 100,00%. Capaian Balmon Yogyakarta yang melampaui UPT lainnya mengindikasikan pelaksanaan survei yang lebih optimal, baik dari sisi jangkauan responden maupun efektivitas pengumpulan data. Balmon Semarang juga menunjukkan kinerja sangat baik karena mampu melampaui target, sedangkan Balmon Surabaya mencapai target secara tepat.

Keunggulan capaian Balmon Yogyakarta dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain optimalisasi pemanfaatan sistem survei elektronik, tingkat partisipasi pengguna layanan yang tinggi, serta efektivitas sosialisasi kepada responden. Selain itu, dukungan internal seperti komitmen pimpinan, konsistensi penerapan standar pelayanan, serta budaya kerja yang berintegritas juga berperan penting. Secara keseluruhan, hasil benchmarking ini menunjukkan bahwa kinerja Balmon Yogyakarta berada pada posisi unggul dan perlu dipertahankan, sekaligus menjadi referensi dalam peningkatan kualitas pelaksanaan survei secara berkelanjutan.

12.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian indikator Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dapat dilihat sebagai berikut:

a. Dampak Langsung:

1. Tersedianya data persepsi masyarakat terkait integritas pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bebas dari praktik diskriminasi, pungutan liar, gratifikasi, dan percaloan.
3. Terjaganya konsistensi nilai integritas layanan pada kategori Sangat Baik.

b. Dampak Tidak Langsung:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan transparan.
2. Mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
3. Mendorong terbentuknya budaya kerja yang berintegritas dan akuntabel di lingkungan organisasi.

12.7 Faktor Keberhasilan

1. Komitmen pimpinan dan pegawai terhadap integritas
2. Sistem pelayanan transparan
3. Sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat
4. Pengawasan internal yang efektif

12.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Efisiensi dilakukan melalui:

1. Integrasi survei dengan IKM dalam satu sistem
2. Penggunaan platform digital
3. Penghematan waktu dan biaya operasional

12.9 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

1. Pelaksanaan survei integritas pelayanan publik secara berkala setiap triwulan menggunakan sistem elektronik
2. Penerapan sistem pelayanan yang transparan dan sesuai prosedur untuk meminimalisir potensi penyimpangan
3. Penguatan pengawasan internal dalam setiap proses pelayanan publik
4. Sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan bebas pungutan liar, gratifikasi, dan percaloan

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

1. Penguatan kampanye anti pungli, gratifikasi, dan percaloan secara lebih masif kepada masyarakat
2. Pengembangan sistem pelayanan berbasis digital yang lebih transparan dan akuntabel
3. Peningkatan kapasitas pengawasan internal melalui pemanfaatan teknologi monitoring
4. Evaluasi berkala terhadap hasil survei untuk menjaga konsistensi nilai integritas pada kategori sangat baik

IK - 13

Persentase (%) Tindak lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

13.1

Gambaran Indikator Kinerja

Indikator Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR *Microwave Link* yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) merupakan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta dalam melakukan pengendalian dan penegakan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, khususnya pada layanan *Microwave Link*.

Indikator ini berfokus pada tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap site Izin Stasiun Radio (ISR) *Microwave Link* yang teridentifikasi tidak sesuai, baik dari aspek:

1. Teknis (parameter frekuensi, daya pancar, konfigurasi perangkat)
2. Administratif (ketidaksesuaian data ISR dengan kondisi eksisting di lapangan)

Perhitungan capaian indikator dilakukan menggunakan formula:

Capaian

=

Jumlah site ISR tidak sesuai yang telah ditindaklanjuti

Jumlah site ISR tidak sesuai

x 100%

Tindak lanjut dalam indikator ini mencakup:

1. Pelaporan hasil verifikasi
2. Penyampaian hasil evaluasi kepada pemegang ISR
3. Koordinasi administratif untuk perbaikan ketidaksesuaian

Indikator ini berperan penting dalam:

1. Menjaga keteraturan penggunaan spektrum
2. Meminimalisir potensi interferensi
3. Memastikan kesesuaian antara legalitas dan operasional di lapangan

13.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja tahun 2025, diperoleh capaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja tahun 2025, capaian indikator *Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)* adalah sebesar **100%**, dengan target yang ditetapkan juga sebesar **100%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh site ISR Microwave Link yang teridentifikasi tidak sesuai telah berhasil ditindaklanjuti secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat temuan yang belum ditangani hingga akhir periode pelaporan.

Keberhasilan pencapaian target ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi, koordinasi, serta tindak lanjut administratif dan teknis telah berjalan secara optimal. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan adanya sinergi yang baik antara petugas Balmon dengan pemegang ISR dalam menyelesaikan ketidaksesuaian yang ditemukan.

Secara keseluruhan, capaian 100% ini memperlihatkan kinerja pengawasan yang efektif dalam mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, sekaligus memperkuat upaya pencegahan gangguan interferensi pada layanan *Microwave Link*.

13.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja sebesar **100%** diperoleh dari hasil verifikasi dan tindak lanjut terhadap seluruh **1.277 site ISR Microwave Link** yang teridentifikasi tidak sesuai. Perhitungan capaian dilakukan dengan membandingkan jumlah site yang telah ditindaklanjuti dengan total temuan ketidaksesuaian, yaitu:

Perhitungan capaian adalah sebagai berikut:

% Capaian

=

Jumlah site ISR tidak sesuai yang telah ditindaklanjuti

Jumlah site ISR tidak sesuai

x 100%

=

1277

1277

x 100%



Analisis Strategis:

- Seluruh site yang teridentifikasi tidak sesuai telah dilakukan tindak lanjut administratif secara menyeluruh (*full coverage*)
- Tidak terdapat backlog atau sisa kasus yang belum ditindaklanjuti dalam periode tahun berjalan
- Mekanisme pelaporan dan evaluasi berjalan secara sistematis dan terstruktur

Perlu ditegaskan bahwa dalam konteks indikator ini, definisi “tindak lanjut” merujuk pada:

- Penyelesaian proses verifikasi dan pelaporan oleh UPT
- Penyampaian hasil evaluasi kepada pemegang ISR

Sehingga, meskipun pada beberapa kasus perbaikan teknis di lapangan oleh pemegang ISR masih dalam proses, indikator kinerja tetap dinyatakan terpenuhi secara penuh, karena kewajiban UPT dalam siklus pengawasan telah dilaksanakan secara lengkap dan akuntabel.

13.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	100%	100%
2024	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100%	100%	100%
2025	Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	100%	122,8%	122,8%

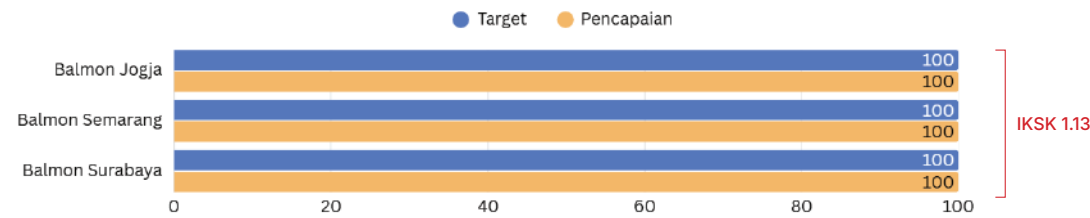
Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2021–2025, dapat diketahui bahwa indikator yang relevan mulai diukur secara konsisten sejak tahun 2023. Pada periode 2023 hingga 2025, capaian kinerja selalu berada pada angka **100%**, dengan target yang juga ditetapkan sebesar **100%** setiap tahunnya.

Meskipun terdapat perbedaan redaksi indikator pada masing-masing tahun—dari verifikasi data koordinat site ISR hingga tindak lanjut verifikasi site ISR yang tidak sesuai—secara substansi indikator tersebut masih berada dalam satu kerangka pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio, khususnya pada layanan *Microwave Link*.

Tren capaian yang stabil di angka 100% selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, adanya konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik pada tahap verifikasi maupun tindak lanjut hasil temuan. Kedua, hal ini mencerminkan bahwa sistem dan mekanisme kerja yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan terstandarisasi, sehingga mampu menjaga kualitas capaian kinerja dari tahun ke tahun.

Selain itu, capaian tahun 2025 tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam aspek verifikasi, tetapi juga pada aspek yang lebih lanjut yaitu penyelesaian tindak lanjut atas ketidaksesuaian. Hal ini menandakan adanya peningkatan kualitas pengawasan dari sekadar identifikasi menjadi penyelesaian masalah secara menyeluruh.

Indikator pemeriksaan stasiun radio tidak secara langsung tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam **RPJMN 2025–2029**, sehingga perbandingan kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis Balmon lainnya.



13.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian indikator Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site *Microwave Link* yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Dampak Langsung:
 - 1. Seluruh site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai telah ditindaklanjuti secara administratif, sehingga tidak terdapat backlog penanganan.
 - 2. Meningkatnya ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan data perizinan (ISR).
 - 3. Tersedianya data hasil verifikasi yang lengkap dan terdokumentasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- b. Dampak Tidak Langsung:
 - 1. Menurunnya potensi gangguan/interferensi akibat ketidaksesuaian parameter teknis penggunaan spektrum.
 - 2. Meningkatnya kepatuhan pemegang ISR terhadap ketentuan teknis dan administratif.
 - 3. Terwujudnya pengawasan spektrum frekuensi radio yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis data.

13.7 Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- 1. Sistem pelaporan yang terstruktur dan konsisten, di mana pelaporan hasil verifikasi dilakukan secara berkala (triwulanan) sehingga seluruh temuan terdokumentasi dengan baik
- 2. Kejelasan indikator berbasis regulasi, melalui penggunaan laporan hasil evaluasi sebagai dasar pemenuhan indikator yang memberikan kepastian dalam pengukuran kinerja
- 3. Koordinasi yang efektif dengan pemegang ISR, sehingga mempercepat proses penyampaian hasil verifikasi dan tindak lanjut administratif

13.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Efisiensi pelaksanaan kegiatan tercapai melalui:

- 1. Integrasi antara kegiatan verifikasi lapangan dan pelaporan administratif
- 2. Optimalisasi penggunaan laporan triwulanan sebagai instrumen monitoring utama
- 3. Pemanfaatan sumber daya secara efektif tanpa peningkatan beban operasional yang signifikan

Pendekatan ini memungkinkan:

- 1. Seluruh data ketidaksesuaian terdokumentasi secara sistematis
- 2. Proses evaluasi berjalan lebih cepat, efisien, dan akuntabel

13.9 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

- 1. Pelaksanaan verifikasi site ISR *Microwave Link* secara berkala dan sistematis
- 2. Penyampaian hasil evaluasi kepada pemegang ISR sebagai dasar perbaikan administratif
- 3. Penguatan dokumentasi dan pelaporan hasil verifikasi sebagai basis pengawasan

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

- 1. Penguatan koordinasi dan pendampingan teknis kepada pemegang ISR agar percepatan perbaikan teknis di lapangan dapat segera dilakukan
- 2. Optimalisasi monitoring berkelanjutan melalui verifikasi ulang terhadap site yang telah ditindaklanjuti
- 3. Peningkatan integrasi data pengawasan dengan sistem database ISR untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pengendalian
- 4. Penguatan aspek outcome (kepatuhan teknis), dengan menggeser fokus tidak hanya pada penyelesaian administratif tetapi juga pada kesesuaian teknis di lapangan



IK - 2.1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025

2.1.1 Gambaran Indikator Kerja

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator yang mengukur tingkat capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tercantum dalam dokumen anggaran. Penilaian ini mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 serta KMK Nomor 466 Tahun 2023 mengenai pedoman teknis pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja anggaran.

Pengukuran NKA dilakukan melalui integrasi dua komponen utama, yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yang masing-masing memiliki bobot 50%. Penilaian tersebut dihasilkan melalui sistem SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) serta indikator IKPA sebagai dasar evaluasi pelaksanaan anggaran pemerintah.

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital dilaksanakan sesuai dengan perencanaan memiliki target nilai 86.95. Berdasarkan hasil kegiatan diketahui bahwa telah dilaksanakan semua kegiatan yang direncanakan di Tahun 2025 sehingga Persentase capaian Indikator Kinerja dengan nilai 98,34%.

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balmon Yogyakarta yaitu sebesar 94.24 dan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar 97,79 data tersebut per 31 Desember 2025 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel. Komponen Nilai Kinerja Anggaran Balmon Yogyakarta Tahun 2025

Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Komponen	Nilai Setelah Pembobotan
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	50%	75,00	37,50
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	50%	96,01	48,01
Total Nilai Kinerja Anggaran	100%		85,51

2.1.2 Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, target Nilai Kinerja Anggaran Balmon Yogyakarta ditetapkan sebesar 86,95, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 85,51 sehingga tingkat capaian indikator mencapai 98,34%.

Capaian tersebut diperoleh dari komponen penilaian sebagai berikut:

- 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : 94,24
- 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : 97,79

Dengan komposisi bobot masing-masing 50%, diperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 85,51. Secara umum seluruh kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan dokumen anggaran.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Tahun 2025	86.95	85.51	98.34%

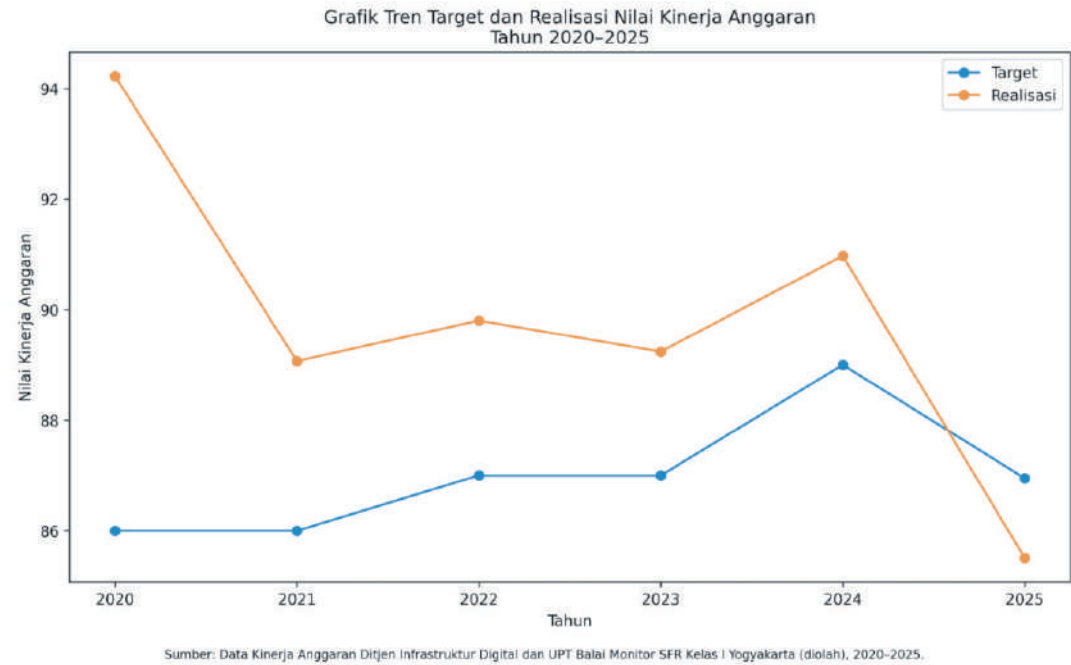
Perhitungan capaian berdasarkan tabel diatas dijelaskan melalui rumus berikut:

% Capaian

= 50% x (Nilai Kinerja Perencanaan DIPA Baru) + 50% x $\frac{(\text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Baru + Lama})}{2}$

Nilai Perencanaan DIPA Baru	50% Nilai Perencanaan DIPA Baru	Nilai Perencanaan DIPA Baru	50% Nilai Perencanaan DIPA Baru	Nilai Perencanaan DIPA Baru	50% Nilai Perencanaan DIPA Baru	50% Nilai Perencanaan DIPA Baru
75	37.5	94.24	97.79	96.015	48.00	85.51

Berikut adalah analisis tren dari data Nilai Kinerja Anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir :



Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Monitor Yogyakarta Tahun 2025 ditargetkan sebesar 86.95. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, seluruh kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik. Namun demikian, pada Tahun 2025 tercatat penyesuaian Nilai Kinerja Anggaran menjadi sebesar 85,51 dengan persentase capaian 98,34%. Meskipun secara umum pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana, terdapat beberapa faktor administratif dan penyesuaian kebijakan yang mempengaruhi hasil penilaian pada tahun tersebut.

Penyesuaian nilai ini dipengaruhi oleh adanya perubahan ketentuan penilaian terbaru dari Kementerian Keuangan yang memerlukan penyelarasan antara dokumen perencanaan anggaran dan mekanisme evaluasi kinerja. Perubahan nomenklatur kegiatan dan output masih dalam proses integrasi penuh ke dalam sistem perencanaan dan pelaporan. Kondisi tersebut berdampak pada aspek penilaian perencanaan dalam komponen kinerja anggaran.

2.1.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Penyesuaian nilai pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor administratif, antara lain adanya perubahan kebijakan penilaian kinerja anggaran oleh Kementerian Keuangan, serta proses penyelarasan nomenklatur organisasi dan kegiatan seiring perubahan struktur organisasi pada Ditjen Infrastruktur Digital.

Selain itu, masih berlangsungnya proses integrasi sistem perencanaan dan mekanisme penandaan efisiensi berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) juga mempengaruhi aspek penilaian dalam komponen perencanaan dan efisiensi anggaran. Walaupun demikian, secara substansi seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2020	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86	94.22	109.56%
2021	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Ditjen Infrastruktur Digital	86	89.07	103.57%
2022	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Ditjen Infrastruktur Digital	87	89.80	103.22%
2023	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2023	87	89.24%	102.57%
2024	Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Tahun 2024	89	90.97	102.21%
2025	Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Tahun 2024	86.95	85.51	98.29%

Berdasarkan tren lima tahun terakhir, capaian Nilai Kinerja Anggaran Balmon Yogyakarta menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan berada di atas target pada periode 2020-2024.

Pada tahun 2024 realisasi NKA mencapai **90,97** dengan capaian **102,21%** terhadap target. Sementara itu pada tahun 2025 nilai NKA tercatat **85,51** dengan capaian **98,34%**.

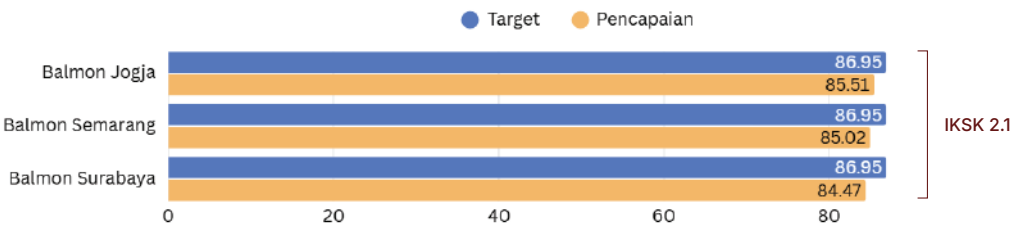
Penurunan nilai pada tahun 2025 tidak disebabkan oleh penurunan kualitas pelaksanaan kegiatan, melainkan lebih dipengaruhi oleh **penyesuaian metode penilaian dan perubahan sistem evaluasi kinerja anggaran** yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan.



2.1.4 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Target dalam indikator ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi periode 2025–2029 untuk periode lima tahun ke depan karena target kinerja Balmon Yogyakarta bukan merupakan program prioritas Nasional.

Perbandingan Realitas Kerja dengan UPT Balmon :



2.1.5 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dampak Langsung:

- Seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan dokumen anggaran yang telah ditetapkan.
- Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran, khususnya pada aspek pelaksanaan yang mencapai nilai tinggi.

b. Dampak Tidak Langsung:

- Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Balmon Yogyakarta.
- Terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).
- Mendukung pencapaian sasaran strategis Ditjen Infrastruktur Digital secara berkelanjutan.

2.1.6 Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja anggaran pada Balmon Yogyakarta antara lain:

- Integrasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui koordinasi yang efektif antara unit perencanaan, keuangan, dan unit teknis
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan
- Komitmen organisasi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan perencanaan dan pelaporan anggaran

2.1.7 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Efisiensi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui optimalisasi penggunaan anggaran berbasis prinsip *value for money*, antara lain:

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi anggaran
- Pengurangan penggunaan dokumen fisik melalui digitalisasi proses administrasi
- Pengendalian biaya operasional kegiatan secara terukur dan terencana

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan disusun berbasis kinerja, sehingga setiap alokasi anggaran diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal terhadap pencapaian sasaran organisasi.

2.1.8 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

- Peningkatan akurasi perencanaan anggaran melalui pemanfaatan data historis dan analisis tren guna meminimalkan deviasi antara target dan realisasi
- Penguatan koordinasi antar-unit dalam penyusunan dan realisasi anggaran untuk meningkatkan keselarasan perencanaan
- Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran guna memastikan efektivitas belanja
- Penguatan sistem pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi serta audit internal secara berkala

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

- Penguatan kualitas perencanaan anggaran agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan dan sistem penilaian dari Kementerian Keuangan
- Optimalisasi integrasi sistem perencanaan dan pelaporan anggaran berbasis digital
- Peningkatan kualitas implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam proses perencanaan dan evaluasi
- Penguatan pendekatan outcome dalam penganggaran, sehingga tidak hanya berfokus pada serapan dan pelaksanaan, tetapi juga pada manfaat yang dihasilkan

IK - 2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

2.2.1 Gambaran Indikator Kerja

Laporan Keuangan Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga, yang mengatur kewajiban rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN pada setiap akhir periode pelaporan.

Sebagai bentuk akuntabilitas, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta secara konsisten menyampaikan laporan keuangan pada periode Semester I, Triwulan III, Semester II, dan Tahunan.

Pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan tahun 2025 didukung oleh target bulanan yang mencakup rekonsiliasi eksternal, penyusunan laporan keuangan, koordinasi pemeriksaan, serta pelaksanaan hasil audit dan tripartit, sebagaimana tercantum dalam tabel realisasi kegiatan bulanan.

Tabel Daftar Realisasi Rekonsiliasi dan pelaporan Balmon Yogyakarta Tahun 2025

BULAN	TARGET BULANAN	SATUAN	PENJELASAN TARGET	KETERANGAN
Januari	5	%	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2024.	BA Rekon SAKTI-SPAN Desember 2024 dari Aplikasi MONSAKTI
			2. Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024	Laporan PIPK Balmon Yogyakarta 2024
			3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan	Surat Permintaan Data Dukung Pemeriksaan BPK dan BA Pemeriksaan BPK Jika ada (tentatif)
Februari	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan	Surat Permintaan Data Dukung Pemeriksaan BPK dan BA Pemeriksaan BPK Jika ada (tentatif)
			2. Penyusunan laporan keuangan TA 2025	Laporan Keuangan Balmon Jogja Tahunan Tahun 2024 (Unaudited)
Maret	5	%	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan	Surat Permintaan Data Dukung Pemeriksaan BPK dan BA Pemeriksaan BPK Jika ada (tentatif)
April	5	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan	Surat Permintaan Data Dukung Pemeriksaan BPK dan BA Pemeriksaan BPK Jika ada (tentatif)
			2. Menerima dan Melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit (Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BPK) sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	BA Tripartit
Mei	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan	Surat Permintaan Data Dukung Pemeriksaan BPK dan BA Pemeriksaan BPK Jika ada (tentatif)
			2. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2024 Audited	Laporan Keuangan Balmon Jogja Tahunan TA 2024 (Audited)
			3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d. April TA 2024	BA Rekon SAKTI-SPAN April 2025 dari Aplikasi MONSAKTI
Juni	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025	BA Rekon SAKTI-SPAN Mei 2025 dari Aplikasi MONSAKTI
Juli	15	%	1. Proses penilaian kualitas pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang dilakukan oleh Biro Keuangan	Hasil Penilaian Kualitas Laporan Keuangan
			2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025	Laporan Keuangan Balmon Jogja Semester I Tahun Anggaran 2025
			3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2025	BA Rekon SAKTI-SPAN Juni 2025 dari Aplikasi MONSAKTI
Agustus	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025	BA Rekon SAKTI-SPAN Juli 2025 dari Aplikasi MONSAKTI
September	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025	BA Rekon SAKTI-SPAN Agustus 2025 dari Aplikasi MONSAKTI
Oktober	15	%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025	Laporan Keuangan Balmon Jogja Triwulan III Tahun Anggaran 2025
			2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2025	BA Rekon SAKTI-SPAN September 2025 dari Aplikasi MONSAKTI
November	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025	BA Rekon SAKTI-SPAN Oktober 2025 dari Aplikasi MONSAKTI
Desember	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode November 2025	BA Rekon SAKTI-SPAN November 2025 dari Aplikasi MONSAKTI

2.2.2 Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA Balmon Yogyakarta ditetapkan sebesar **97**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **100**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **103,09%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses rekonsiliasi, penyusunan laporan keuangan, serta penyampaian laporan kepada unit pembina dan KPPN telah dilaksanakan secara **tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku**.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103.09%

2.2.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Capaian nilai sebesar 100 menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan Balmon Yogyakarta telah memenuhi standar penilaian yang ditetapkan oleh unit pembina keuangan.

Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal secara rutin melalui aplikasi MONSAKTI
2. Konsistensi penyusunan laporan keuangan pada setiap periode pelaporan
3. Koordinasi yang baik dengan KPPN dan unit pembina
4. Penerapan mekanisme pengendalian internal yang kuat

Selain itu, proses penyusunan laporan didukung oleh:

1. Verifikasi dokumen transaksi
2. Konsistensi pencatatan dalam sistem keuangan
3. Kelengkapan dokumen sumber

Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun memiliki tingkat validitas, akurasi, dan akuntabilitas yang tinggi.

2.2.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Analisa ini meliputi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan organisasi.

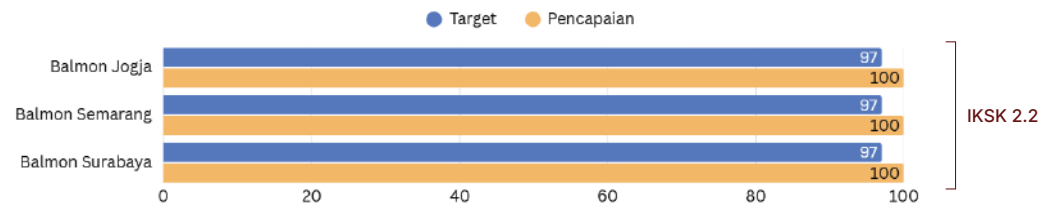
Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	98	122.50%
2024	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	98	100	102.04%
2025	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103.09%

Tren capaian menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan Balmon Yogyakarta mengalami **konsistensi kinerja tinggi**, bahkan melampaui target dalam tiga tahun terakhir.

2.2.5 Perbandingan dengan Nasional dan UPT Balmon Lain

Standar Nasional yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Target dalam indikator ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi periode 2025–2029 untuk periode lima tahun ke depan karena target kinerja Balmon Yogyakarta bukan merupakan program prioritas Nasional.

Perbandingan Realisasi Kerja dengan UPT Balmon :



Berdasarkan tabel diatas, hasil tersebut menunjukkan bahwa Balmon Yogyakarta memiliki capaian yang setara dan kompetitif dengan UPT Balmon lainnya.

2.2.6 Dampak Pencapaian Kinerja

Dampak dari pencapaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dampak Langsung:

1. Tersusunnya laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Terlaksananya proses rekonsiliasi internal dan eksternal secara konsisten dan tanpa selisih material
3. Meningkatnya kualitas data dan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

b. Dampak Tidak Langsung:

1. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
2. Mendukung kelancaran proses audit dan meminimalisir temuan pemeriksaan
3. Memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balmon Yogyakarta

2.2.7 Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Penguatan tata kelola pelaporan keuangan berbasis akurasi, transparansi, dan ketepatan waktu
2. Penerapan rekonsiliasi internal berkala berbasis digital sebelum rekonsiliasi eksternal
3. Pemanfaatan dashboard monitoring untuk deteksi dini selisih data
4. Penerapan checklist verifikasi berlapis dan standarisasi dokumen
5. Pembentukan tim *quality assurance* pelaporan keuangan
6. Penyusunan kalender kerja pelaporan yang terstruktur

2.2.8 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Efisiensi pelaksanaan kegiatan pada indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA dicapai melalui penerapan prinsip *value for money*, dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi keuangan pemerintah (MONSAKTI) dalam proses pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan
2. Penerapan rekonsiliasi internal secara berkala sebelum rekonsiliasi eksternal untuk meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses penyelesaian
3. Digitalisasi dokumen dan proses administrasi pelaporan keuangan untuk mengurangi penggunaan kertas serta mempercepat alur kerja
4. Penguatan koordinasi internal yang efektif sehingga proses verifikasi dan validasi data dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat

Pendekatan ini memungkinkan:

1. Proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara lebih cepat dan efisien
2. Pengurangan potensi kesalahan data sejak tahap awal
3. Optimalisasi penggunaan sumber daya manusia tanpa penambahan beban kerja yang signifikan

2.2.9 Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tahun sebelumnya, telah dilakukan:

1. Penguatan mekanisme rekonsiliasi internal secara berkala sebelum pelaksanaan rekonsiliasi eksternal
2. Peningkatan ketelitian dalam proses verifikasi dan validasi data transaksi keuangan
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi keuangan pemerintah dalam mendukung penyusunan laporan
4. Penguatan koordinasi dengan KPPN dan unit pembina dalam proses pelaporan

Untuk peningkatan kinerja ke depan, direkomendasikan:

1. Pengembangan sistem monitoring pelaporan keuangan berbasis digital dan real-time
2. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisis laporan keuangan
3. Penguatan fungsi *quality assurance* melalui mekanisme reviu berlapis
4. Optimalisasi integrasi data antar sistem keuangan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi Tahun Anggaran 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta melaksanakan pengelolaan anggaran secara akuntabel, transparan, dan efisien sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran disusun dengan mempertimbangkan prioritas program, kebutuhan operasional pengawasan spektrum frekuensi radio, serta efektivitas penggunaan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.



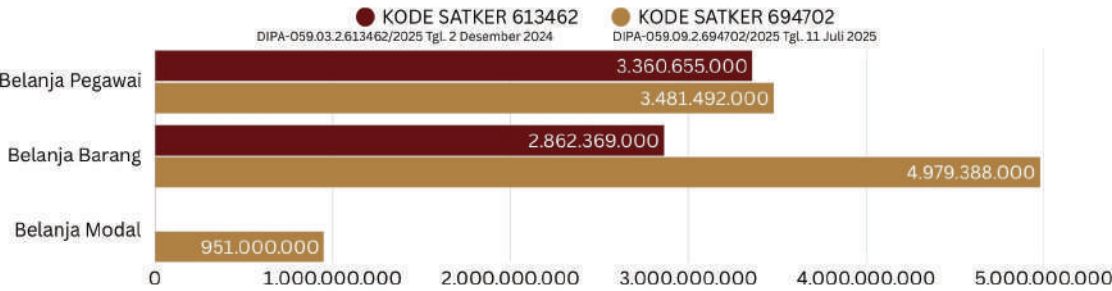


Pagu Anggaran

Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 berdasarkan DIPA Revisi Nomor SP DIPA-059.09.2.694702/2025 tanggal 24 November 2025 sebesar Rp10.724.678.000 yang dialokasikan untuk dua program kegiatan, yaitu Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital sebesar Rp7.770.462.000 serta Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Digital dan Kualitas Layanan Telekomunikasi sebesar Rp2.954.216.000.

Anggaran tersebut terbagi dalam tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang mendukung pelaksanaan operasional pengawasan spektrum frekuensi radio serta pengelolaan administrasi organisasi. Pada Tahun 2025 juga terdapat penyesuaian struktur penganggaran dengan adanya dua satuan kerja, yaitu Satker 613462 dengan pagu Rp6.223.024.000 serta Satker 694702 dengan pagu Rp9.411.880.000.

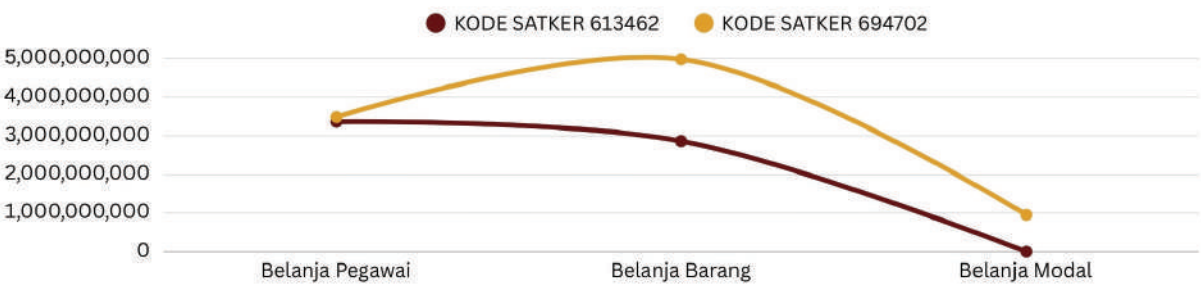
Pagu Anggaran TA 2025



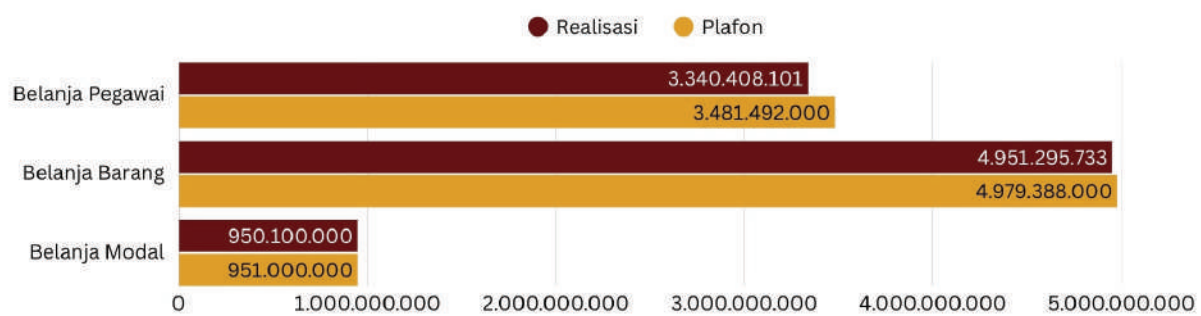
Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan gambaran tingkat penyerapan dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja. Tingkat realisasi ini menunjukkan sejauh mana perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dapat dilaksanakan secara efektif selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, analisis realisasi anggaran perlu dilakukan untuk melihat perbandingan antara pagu dan realisasi pada masing-masing jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, sehingga dapat diketahui tingkat capaian penyerapan anggaran pada Satker 694702 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta.

Realisasi Anggaran Berdasarkan PerBelanja



Realisasi PerBelanja Kode SATKER 694702



Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, secara umum menunjukkan pengelolaan anggaran yang tetap terarah dan proporsional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Keterangan	2022	2023	2024	2025	
				Satker 613462	Satker 694702
	Rp. 19.851.894.000	Rp. 16.929.207.000	Rp. 17.465.679.000	Rp. 6.223.024.000	Rp. 9.411.880.000
Belanja Pegawai	Rp. 5.058.907.000	Rp. 5.010.796.000	Rp. 5.685.783.000	Rp. 3.360.655.000	Rp. 3.481.492.000
Belanja Barang	Rp. 9.790.634.000	Rp. 9.895.946.000	Rp. 10.502.674.000	Rp. 2.862.369.000	Rp. 4.979.388.000
Belanja Modal	Rp. 5.002.353.000	Rp. 2.022.465.000	Rp. 1.277.222.000	-	Rp. 951.000.000

Berdasarkan data pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, secara umum menunjukkan pengelolaan anggaran yang tetap terarah dan proporsional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pada tahun 2022, pagu anggaran tercatat sebesar Rp19.851.894.000 yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp5.058.907.000, belanja barang sebesar Rp9.790.634.000, dan belanja modal sebesar Rp5.002.353.000. Struktur anggaran pada tahun tersebut menunjukkan dukungan yang cukup besar pada belanja barang dan belanja modal guna menunjang operasional serta penguatan sarana prasarana pengawasan spektrum frekuensi radio.

Pada tahun 2023, pagu anggaran mengalami penyesuaian menjadi Rp16.929.207.000 dengan komposisi belanja pegawai sebesar Rp5.010.796.000, belanja barang sebesar Rp9.895.946.000, dan belanja modal sebesar Rp2.022.465.000. Penyesuaian ini menunjukkan upaya optimalisasi penggunaan anggaran dengan tetap mempertahankan dukungan signifikan pada belanja barang sebagai komponen utama dalam mendukung kegiatan operasional pengawasan dan pelayanan spektrum frekuensi radio.

Selanjutnya pada tahun 2024, pagu anggaran tercatat sebesar Rp17.465.679.000 yang terdiri dari belanja pegawai Rp5.685.783.000, belanja barang Rp10.502.674.000, dan belanja modal Rp1.277.222.000. Komposisi tersebut mencerminkan peningkatan dukungan pada belanja pegawai dan belanja barang sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia serta keberlanjutan kegiatan operasional dan layanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2025, terjadi penyesuaian struktur organisasi dan penganggaran dengan adanya pembagian menjadi dua satuan kerja, yaitu Satker 613462 dan Satker 694702, dengan total pagu masing-masing sebesar Rp6.223.024.000 dan Rp9.411.880.000. Pada Satker 613462, alokasi anggaran difokuskan pada belanja pegawai sebesar Rp3.360.655.000 dan belanja barang sebesar Rp2.862.369.000. Sementara itu, Satker 694702 memiliki komposisi belanja pegawai Rp3.481.492.000, belanja barang Rp4.979.388.000, dan belanja modal Rp951.000.000. Pembagian ini menunjukkan upaya penataan anggaran yang lebih adaptif dan terfokus sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta mendukung optimalisasi kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pengawasan spektrum frekuensi radio.

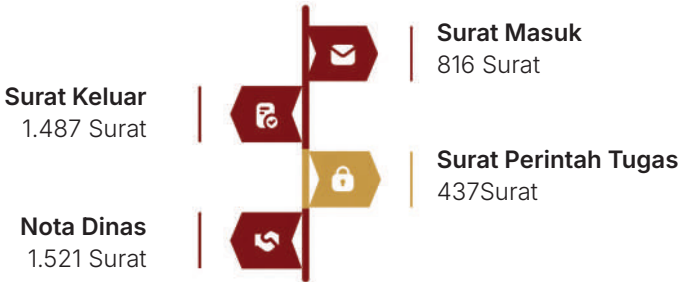
C. Penatausahaan dan Rumah Tangga

Pengelolaan Persuratan

Pengelolaan persuratan merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh surat yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta dapat diakses dengan mudah, terdokumentasi dengan baik, serta tersusun secara rapi sesuai dengan kebutuhan administrasi.

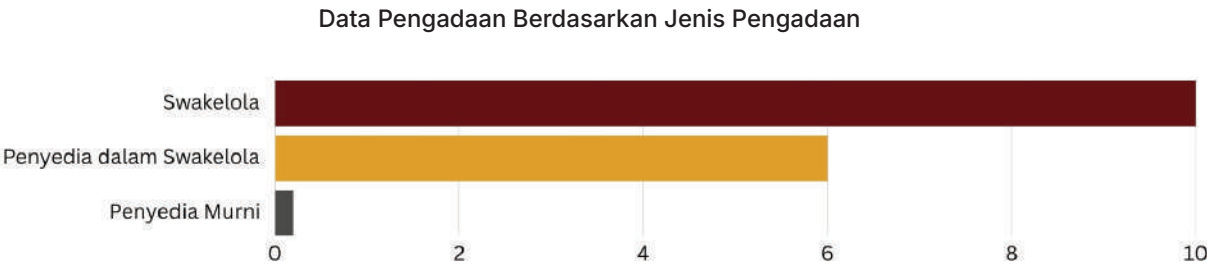
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ketatausahaan persuratan meliputi proses pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan secara tertib dan sistematis. Penerimaan surat dilakukan melalui beberapa media, yaitu melalui aplikasi SIMAYA serta melalui email resmi Balai Monitor Yogyakarta pada alamat *upt_yogyakarta@postel.go.id*. Setiap surat yang diterima kemudian dicatat, didistribusikan, dan diarsipkan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.

Melalui pengelolaan persuratan yang sistematis dan terstruktur, setiap dokumen dapat ditelusuri dengan mudah, terjamin keamanannya, serta mampu mendukung kebutuhan administrasi dan pengambilan keputusan organisasi. Berdasarkan proses pengelolaan tersebut, berikut disampaikan rincian surat masuk dan surat keluar Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Yogyakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut



Kerumahtanggaan

- 1. Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor, pemeliharaan perangkat pendukung monitoring serta peralatan rumah tangga kantor. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana perkantoran agar tetap terawat, berfungsi secara optimal, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan aktivitas kerja
- 2. Pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam operasional instansi pemerintah. Proses ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang dan layanan yang diperlukan guna mendukung kinerja organisasi secara efisien, transparan, dan akuntabel. Balmon Yogyakarta telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan total paket 3 yaitu pengadaan langsung, paket swakelola dan penyedia dalam swakelola dengan data sebagai berikut :



Sarana Prasarana Pendukung

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pengendalian spektrum frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dikelola sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan secara optimal untuk menunjang kinerja organisasi.

Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)

Inventarisasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa BMN yang dimiliki mencakup berbagai kategori aset, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud. Komposisi aset didominasi oleh peralatan dan mesin yang merupakan komponen utama dalam kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio.

Selanjutnya, dari keseluruhan aset tersebut, tanah dan bangunan menjadi sarana utama yang menunjang keberlangsungan operasional organisasi secara langsung.

Kategori	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
Tanah	3 Bidang	Rp. 19.892.861.000
Peralatan dan Mesin	952 Unit	Rp. 55.510.132.112
Gedung dan Bangunan	23 Unit	Rp. 9.042.778.552
Aset tetap Lainnya	32 Unit	Rp. 148.668.000
Software	13 Unit	Rp. 1.785.258.631
Aset tetap Dihentikan	0 Unit	-
Aset Tak Berwujud dihentikan	2 Unit	Rp. 460.950.543

1 Tanah dan Bangunan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta memiliki aset tanah dan bangunan di dua lokasi, sebagai berikut:

- a. Lokasi 1 : Jl. Veteran No. 30 A, Muja-muju, Umbulharjo Yogyakarta



Uraian	Luas
Luas Bangunan	740 m ₂
Lantai 1	370 m ₂
Lantai 2	370 m ₂
Luas Tanah	483 m ₂

b. Jl. Cangkringan - Prambanan, Dusun Kledokan, Selomartani, Kalasan, Sleman.



Uraian	Luas
Luas Tanah	10.719 m ₂
Luas Bangunan	
Gedung Kantor/Stasiun Monitoring Tetap	128 m ₂
Mess/Wisma Permanen, Type T-36 1 Unit	54 m ₂
Rumah Dinas Eselon III, 1 Unit	70 m ₂
Rumah Dinas Eselon IV, 3 Unit	150 m ₂
Mushola, 1 Unit	52 m ₂
Rumah Panel, 1 Unit	25 m ₂
Gazebo, 1 Unit	19 m ₂
Gedung Garasi Permanen, 2 Unit	204 m ₂
Bangunan Pos Satpam	15 m ₂
Gudang Semi Permanen	66m ₂
Rumah Kerja Slave Girijati	25m ₂

2 Stasiun Monitoring dan Ruang Monitoring

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta memiliki 2 ruang monitoring *fixed*, di 2 (dua) lokasi kantor yaitu di Kantor Veteran dan Kantor Kalasan, masing-masing dipergunakan untuk monitoring rutin stasiun tetap dan kegiatan posko, Ruangan di kantor Kalasan berfungsi sebagai stasiun monitoring.

3 Slave Stasiun (*Master Control, Slave, dan Transportable*)

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta memiliki 3 Slave Stasiun di 3

No	Lokasi	Wujud Aset/Status	Keterangan
1.	Kantor Balmon Kalasan Ds Kledokan Selomartani Kalasan Sleman	Kantor Balmon	<i>Master Control dan Slave</i>
2.	Slave Gunung Kidul	Yogyakarta	Tanah/Sewa <i>Shelter Fix</i> Stasiun <i>Slave Shelter</i>
3.	Slave Kulon Progo		Tanah/Sewa <i>Shelter Fix</i> Stasiun <i>Slave Shelter</i>
4.	Wonogiri, Jawa Tengah	Tanah/Sewa Shelter	<i>Transportable</i>
5.	Hotel Solia, Surakarta	Rumah Sewa	<i>Transportable</i>
6.	Kranon RT 05, RW 06 Kopek	Rumah Sewa	<i>Transportable</i>
7.	Wonosari Gunung Kidul Purworejo, Jawa Tengah	Rumah Sewa	<i>Transportable</i>
8.	Kebumen, Jawa Tengah	Rumah Sewa	<i>Transportable</i>
9.	Klaten, Jawa Tengah	Rumah Sewa	<i>Transportable</i>

4 Kendaraan Operasional Monitoring

No	Jenis Kendaraan	Merk/Type/Warna	No. Pol.	Perolehan Tahun	Kondisi
1.	Mobil Unit Monitoring	FORD	AB 1035 UH	2012	Baik
2.	Mobil Unit Monitoring	TOYOTA/TG40VM	AB 1939 UA	2010	Baik
3.	Mobil Unit Monitoring	TOYOTA / KIJANG INNOVA V	AB 1189 UH	2010	Baik
4.	Mobil Unit Monitoring	TOYOTA / KIJANG INNOVA 2.4 V A/T (GUN142R-MDTHXD)	AB 1054 IA	2022	Baik
5.	Mobil Unit Monitoring	TOYOTA / KIJANG INNOVA 2.4 V A/T (GUN142R-MDTHXD)	AB 1059 IA	2022	Baik
6.	Mobil Unit Monitoring	ISUZU / TFS6Y D-MAX RODEO 2.5L R1 (4X4) A/T	AB 8013 AI	2020	Baik
7.	Mobil Unit Monitoring	HILUX DOUBLE CABIN 2.4 (4X4) DSL	B 9092 PSE	2022	Baik
8.	Mobil Unit Monitoring	INOVA ZENIC 2.0 Q HV CVT HSS	AB 1135 IA	2024	Baik

5 Kendaraan Operasional Rutin

a. Kendaraan Operasional Roda 4 dan 6

No	Jenis Kendaraan	Merk/Type/Warna	No. Pol.	Perolehan Tahun	Kondisi
1.	Micro Bus	Mitsubishi	AB 7504 AI	2010	Baik
2.	Micro Bus	Mitsubishi	AB 7503 AI	2010	Baik
3.	Mobil	Toyota New Venturer 2.4 a/t diesel	AB 1726 UH	2018	Baik
4.	Operasional Mini Bus	Toyota Hiace Premio Putih	AB 7016 AI	2025	Baik

b. Kendaraan Operasional Roda 2

No	Jenis Kendaraan	Merk/Type/Warna	No. Pol.	Perolehan Tahun	Kondisi
1.	Sepeda Motor	Jupiter MX CW	AB 2886 IH	2007	Baik
2.	Sepeda Motor	Yamaha MX	AB 2306 IA	2020	Baik
3.	Sepeda Motor	Yamaha MX	AB 2419 IF	2023	Baik
4.	Sepeda Motor	Yamaha MX	AB 2420 IF	2023	Baik

6 Rekapitulasi Kondisi Perangkat

No	Jenis Perangkat	Jumlah Perangkat	Kondisi
1.	Spektrum Analyzer (SPA)	7 Unit	Baik
2.	TV Analyzer	2 Unit	Baik
3.	Software Argus	2 Unit	Baik
4.	Handle Digital Trunking Scanner	1 Unit	Baik
5.	Frekuensi Counter	2 Unit	Baik
6.	HT Digital dan Analog	17 Unit	Baik
7.	Mikrotik	1 set	Baik
8.	Line Amplifier	2 Unit	Baik
9.	Antena Module	14 Buah	Baik

Berdasarkan rekapitulasi kondisi perangkat pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta, seluruh perangkat monitoring dan pendukung operasional tercatat berada dalam kondisi baik. Perangkat tersebut meliputi berbagai alat utama dan pendukung kegiatan monitoring, seperti *Spektrum Analyzer*, *TV Analyzer*, *Software Argus*, *Handle Digital Trunking Scanner*, *Frekuensi Counter*, *HT Digital dan Analog*, *Mikrotik*, *Line Amplifier*, serta *Antena Module* dengan jumlah yang bervariasi sesuai kebutuhan operasional.

Kondisi perangkat yang seluruhnya dalam keadaan baik menunjukkan bahwa sarana dan prasarana monitoring spektrum frekuensi radio di Balmon Yogyakarta masih dalam kondisi siap operasional dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta pemantauan spektrum frekuensi radio secara optimal.

✉ Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pengendalian spektrum frekuensi radio secara optimal, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan proporsional sesuai kebutuhan organisasi.

1 Komposisi Kepegawaian

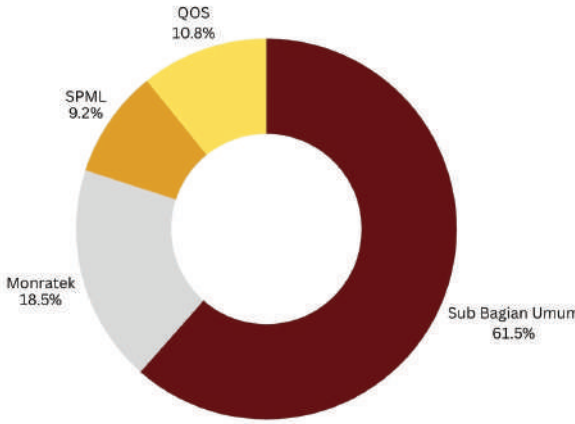
Komposisi pegawai merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Balmon Yogyakarta. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebanyak 70 orang.

Komposisi Pegawai Balmon Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan

Kabalmon	Kasubag Umum	Ketua Tim Kerja	PPNS	PFR	PPPK (Non PFR)	PJLP Sosial Media Strategic
1 Pegawai	1 Pegawai	3 Pegawai	10 Pegawai	21 Pegawai	28 Pegawai	1 Pegawai

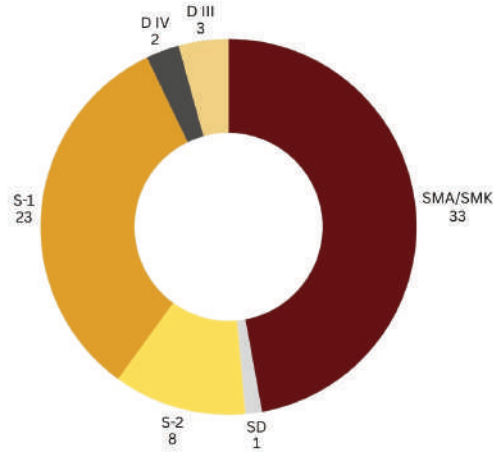
b. Komposisi Pegawai berdasarkan Penempatan pada Subagian dan Tim Kerja



c. Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



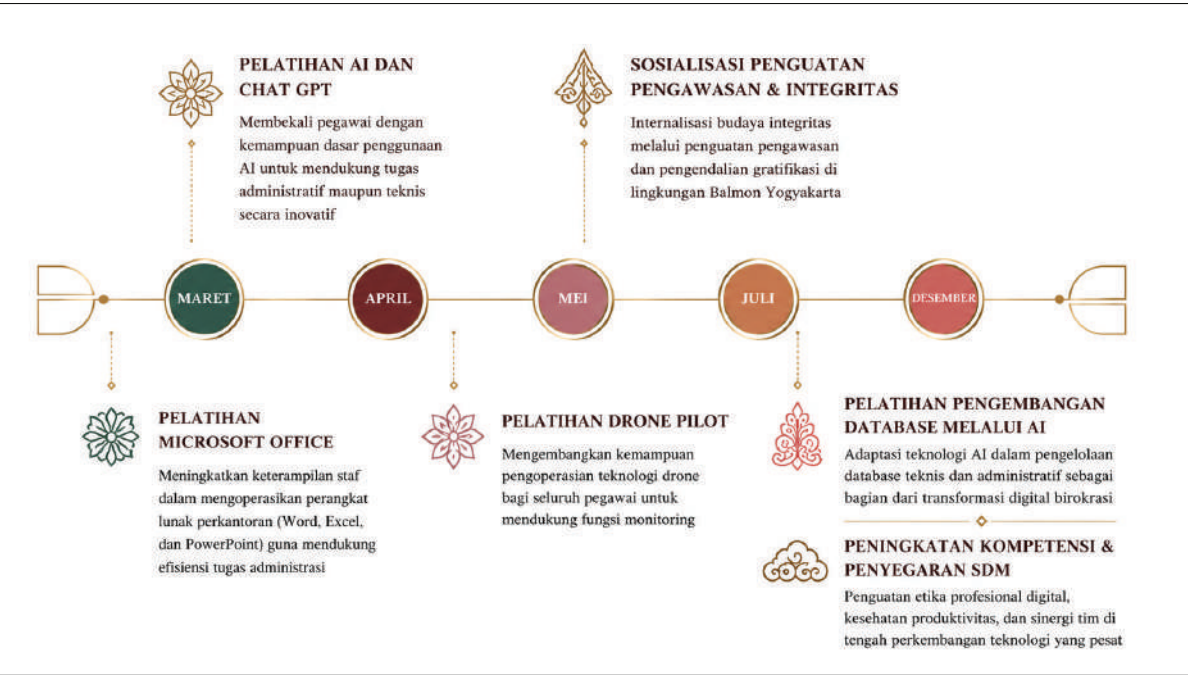
d. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



2 Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi Balmon Yogyakarta secara konsisten melaksanakan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sepanjang Tahun 2025. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi teknis, administratif, digital, serta integritas pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan spektrum frekuensi radio.





Timeline Pengembangan Kompetensi

3 Prestasi Balmon Yogyakarta

Balmon Yogyakarta berperan penting dalam menjaga ketertiban spektrum frekuensi agar tetap optimal dan tidak mengalami gangguan yang dapat berdampak pada berbagai sektor komunikasi, termasuk penerbangan, penyiaran, hingga telekomunikasi darurat. Berbagai prestasi telah dicapai oleh Balmon Yogyakarta sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun berbagai prestasi yang telah dicapai Balmon Yogyakarta dalam kurun waktu 2024 - 2025 yaitu sebagai berikut:



Satuan Kerja dengan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berpredikat Sangat Baik
Periode Semester 1 Tahun 2024
KPPN Yogyakarta



Peringkat III Satuan Kerja Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik
Periode Semester 1 Tahun 2024 Lingkup KPPN Yogyakarta



Juara 4 / Harapan 1 Turnamen Balmon CUP 2024.

Balmon CUP adalah turnamen futsal yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen Ditjen Infrastruktur Digital) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Turnamen ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan budaya hidup sehat di antara pegawai melalui olahraga futsal.



Juara 1 DJID Choice Award

pada Kategori Monitoring dan Penertiban Alat Perangkat Telekomunikasi Terbaik



Predikat Satuan Kerja Pilot Project Pembangunan ZI 2024.

Penghargaan ini diharapkan mendorong Balmon Yogyakarta untuk konsisten dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta integritas dalam pelaksanaan tugasnya.



Inisiator Pembangunan Zona Integritas 2024.

Penghargaan sebagai Inisiator Pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat memotivasi unit kerja lain untuk mengikuti jejak serupa, sehingga tercipta lingkungan birokrasi yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas



Predikat "Pelayanan Prima" dengan kategori A berdasarkan hasil PEKPPP Mandiri Tahun 2025

Kinerja Lainnya



Audit ISO 9001:2025

Pada Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta melaksanakan Audit ISO 9001:2015 sebagai bagian dari penerapan Sistem Manajemen Mutu. Kegiatan audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis dan pelayanan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi peluang perbaikan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan audit dilakukan secara periodik melalui audit internal dan eksternal, yang mencakup evaluasi terhadap kesesuaian prosedur, efektivitas implementasi, serta konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan pengguna layanan. Hasil audit menjadi dasar dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan guna meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas

Pada Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta terus melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Upaya yang dilakukan meliputi penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi Zona Integritas ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong terciptanya pelayanan yang prima dan berintegritas.

DigiWave dan Capaian Penghargaan DJID Choice Award

Pada Tahun 2025, pemanfaatan DigiWave berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio serta penertiban alat/perangkat telekomunikasi secara lebih efektif dan terintegrasi. Optimalisasi penggunaan aplikasi ini turut berkontribusi dalam peningkatan kinerja pengawasan di wilayah kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta berhasil meraih penghargaan **Juara 1 DJID Choice Award** pada kategori Monitoring dan Penertiban Alat/Perangkat Telekomunikasi Terbaik. Capaian ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja unggul dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP)

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta melaksanakan Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan, mencakup aspek kebijakan, pelaksanaan, serta hasil layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil PEKPP Mandiri Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta berhasil memperoleh predikat **"Pelayanan Prima" dengan kategori A.** Capaian ini mencerminkan komitmen dan keberhasilan unit kerja dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Implementasi Nilai BerAKHLAK dalam Capaian Kinerja

Seluruh capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Tahun 2025 tidak terlepas dari penerapan nilai-nilai dasar **ASN BerAKHLAK** yang terintegrasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam hal ini, prinsip **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan pengguna spektrum frekuensi radio, khususnya dalam penanganan gangguan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan responsif.

Aspek **Akuntabel** tercermin dari pelaksanaan kegiatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam pengelolaan anggaran maupun penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, nilai **Kompeten** diimplementasikan melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan guna mendukung profesionalisme dalam kegiatan monitoring dan penertiban frekuensi.

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, nilai **Harmonis dan Kolaboratif** diwujudkan melalui sinergi yang baik antar pegawai serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah maupun penyelenggara telekomunikasi. Sementara itu, nilai **Loyal** tercermin dari komitmen pegawai dalam mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu, nilai **Adaptif** ditunjukkan melalui kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan pengelolaan spektrum frekuensi radio, termasuk pemanfaatan sistem digital dalam mendukung pelaksanaan kinerja.

Dengan penerapan nilai-nilai **BerAKHLAK** tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta mampu mencapai target kinerja secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.



BAB IV PENUTUP

Pesan Penutup



Penutup



Laporan Kinerja ini mencerminkan pencapaian yang sangat positif dalam berbagai aspek pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, pelayanan publik, serta tata kelola organisasi di lingkungan UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta. Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2025, terlihat bahwa indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas secara profesional dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi kerja, serta penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai landasan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Capaian yang sangat menonjol dapat dilihat pada beberapa indikator layanan publik, antara lain penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio yang mencapai 216,66% dari target yang ditetapkan, serta pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik yang mencapai 122,80%. Selain itu, kegiatan pengawasan teknis seperti monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio, pemeriksaan stasiun radio, penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, serta monitoring operasional stasiun monitor frekuensi radio juga menunjukkan capaian yang optimal dengan realisasi mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, capaian dalam aspek tata kelola organisasi juga menunjukkan kinerja yang baik. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta Tahun 2025 tercatat sebesar 85,51 atau mencapai 98,34% dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu, indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 100 atau 103,09%, yang mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang berlaku.

Upaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan kinerja organisasi. Penguatan perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi digital, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia akan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pada periode mendatang.

Dengan demikian, laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta strategi peningkatan kinerja organisasi pada periode berikutnya, sehingga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.



LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

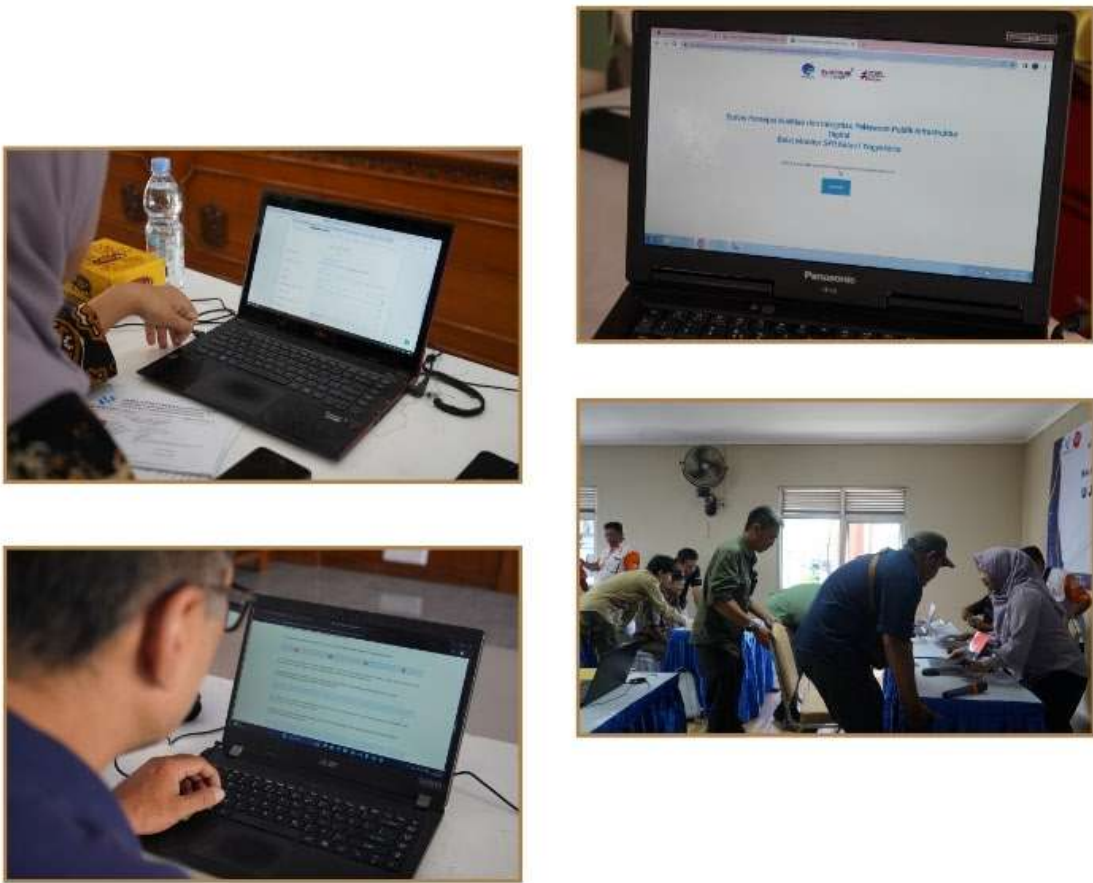
Pengajian dan Doa Bersama

2 Januari 2025



Ujian Negara Amatur Radio (UNAR)

14 Januari 2025



Friday Walk 0 KM Malioboro

17 Januari 2025



Muslok Orari Bantul

19 Januari 2025



Rapat Persiapan Pengukuran Radio FM

21 - 23 Januari 2025

Olahraga Pagi

24 Januari 2025



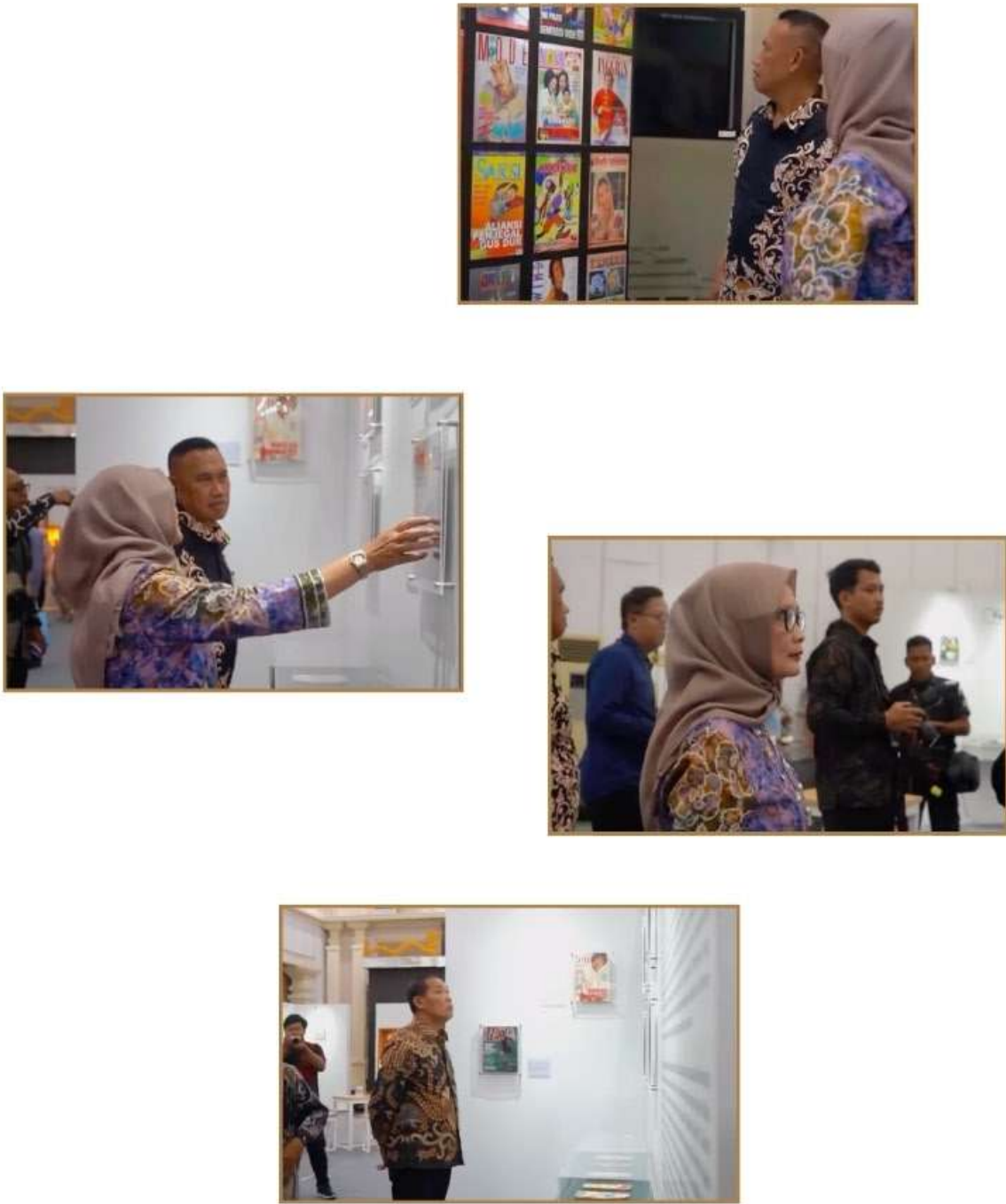
PRSSNI HARPER

30 Januari 2025



Pembukaan Pameran Koleksi Monumen Pers

1 Februari 2025



Pengukuran Radio Siaran FM

4 - 28 Februari 2025

UNAR Reguler

12 Februari 2025



Koordinasi dan Sosialisasi APJII DIY

14 Februari

Rapat Penyedia ISP

17 Februari 2025



Sosialisasi APJII Jateng

17 Februari 2025



Bimbingan Teknis Pemanfaatan Frekuensi Radio

19 Februari 2025



Kunjungan Kerja

Sekretaris Jenderal Komdigi Bapak Ismail,
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Bapak Wayan Toni Supriyanto,
Sekretaris Dirjen Infrastruktur Digital Bapak Indra Maulana,
Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Bapak Ervan F. Adiwidjaja



22 Februari 2025



Musyawarah Daerah PRSSNI



26 Februari 2025



Pembaruan ISR 10 Tahun

25 - 26 Februari 2025



Pengajian & Doa Bersama Menjelang Ramadhan

28 Februari 2025



Kunjungan Menkomdigi Ke Yogyakarta

5 Maret 2025



Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

11 Maret 2025



Kunjungan Kerja ke Kantor Walikota Yogyakarta

14 Maret 2025



Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Optimal 2025 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat.

25 Maret 2025



Simulasi Mitigasi Bencana di Underpass Yogyakarta International Airport (YIA)

22 Maret 2025

Rapat Koordinasi dengan Sejumlah Operator Seluler

25 Maret 2025



Halal Bihalal

8 April 2025



Halal Bihalal dengan Mitra Balmon Jogja

10 April 2025



Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

22 April 2025



Pelatihan Artificial Intelligence (AI) dan ChatGPT untuk Inovasi Kerja

25 April 2025



Upacara Hari Kebangkitan Nasioanl

20 Mei 2025

Pelatihan Drone

22 Mei 2025



Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

27 Mei 2025

Upacara Hari Lahir Pancasila

2 Juni 2025



Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

17 Juni 2025

Narasumber dalam Acara yang
diselenggarakan oleh RAPI (Radio Antar
Penduduk Indonesia) Kabupaten Kebumen.

25 Juni 2025



Narasumber dalam Acara yang diselenggarakan oleh RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) Kabupaten Kebumen.

25 Juni 2025



Penandatanganan Nota Kesepahaman UNY

4 Juli 2025



Car Free Day Surakarta

13 Juli 2025



Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan

16 Juli 2025



Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

15 Juli 2025



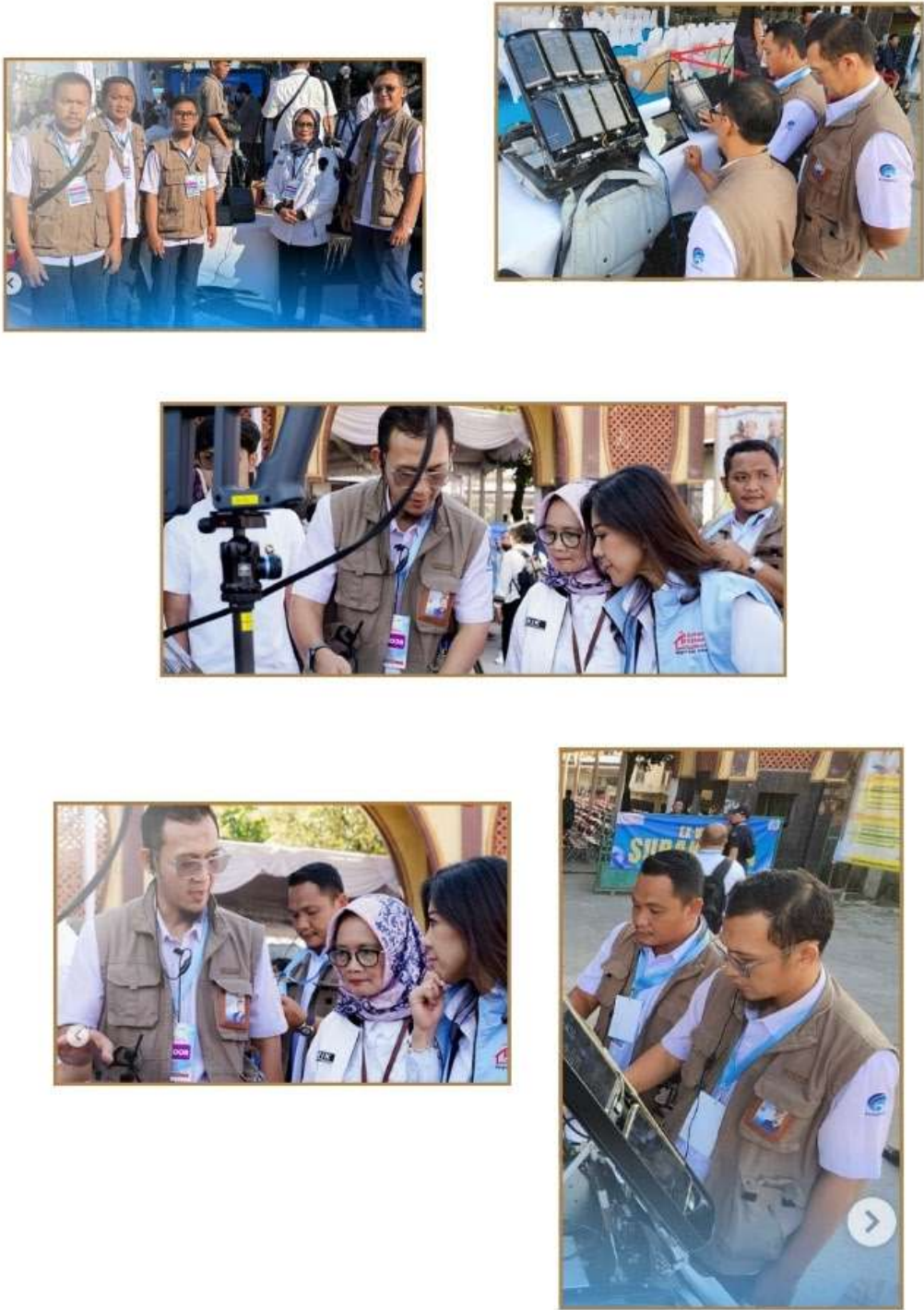
Hadir di Wisuda STMM "MMTC" Yogyakarta

18 Juli 2025



Apresiasi Peran Aktifnya dalam Mendukung Kelancaran Peresmian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bantangan

21 Juli 2025



Pemeliharaan dan Optimalisasi Fitur Perangkat SMFR

30 - 31 Juli 2025



Pelantikan Dewan Pengawas dan Pengurus ORARI Lokal Sleman

3 Agustus 2025



Upacara HUT RI ke - 80

17 Agustus 2025



Kunjungan Ibu Menteri Komdigi

28 Agustus 2025



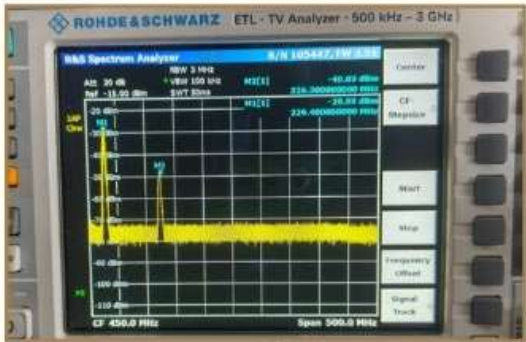
Pelatihan Videography Menggunakan Perangkat Smartphone

3 September 2025



DAB+ Workshop and Field Measurement

15 September 2025



Senam Bersama Hari Bhakti Postel

23 September 2025



Kanthi Pawiyatan Goes to Universitas Negeri Yogyakarta

23 September 2025



Upacara Hari Bhakti Postel

27 September 2025



Sarasehan Hari Bhakti Postel ke-80



Maritim on the spot - Bimtek SRC dan IKRAN

2 Oktober 2025



Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

11 Oktober 2025



Rapat koordinasi terkait Sertifikasi dan Perizinan ISR Perangkat Radar Cuaca X Band (frekuensi 9.3 – 9.5 GHz)

21 Oktober 2025



Upacara Sumpah Pemuda

28 Oktober 2025



Studi Tiru dari Balmon Spekfrekrad Kelas I Yogyakarta terkait Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

30 Oktober 2025



Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

11 November 2025

Bimtek SRC dan IKRAN

25 November 2025



Pemusnahan Alat Perangkat Illegal

27 November 2025



Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

9 Desember 2025



Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

14 Desember 2025



Prestasi Balmon Yogyakarta Dalam Penghargaan Digi Wave 2025

21 Desember 2025



Upacara Hari Ibu

22 Desember 2025



Bincang Sareng T2Net

23 Desember 2025



Posko Kualitas Layanan NATARU

26 Desember 2025



Rapat Pemantauan Posko NATARU

31 Desember 2025





BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA

**Alamat :**

Jl. Veteran No. 30 A, Muja-muju, Umbulharjo
Yogyakarta - 55164

**Telp/Fax :**

Telp. 0274 - 450150
Fax. 0274 - 450151

**e-Mail :**

upt_yogyakarta@postel.go.id

@balmonjogja

